

LAPORAN PEREKONOMIAN  
PROVINSI ACEH  
FEBRUARI 2023



## VISI

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas BI dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

## MISI

Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

## FUNGSI

1. Fungsi *Advisory* Kebijakan
2. Fungsi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
3. Fungsi Sistem Pembayaran
4. Fungsi Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
5. Fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS)
6. Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
7. Fungsi Pengawasan SP dan PUR
8. Fungsi Komunikasi Kebijakan

## TUGAS POKOK

1. Memberikan masukan kepada Dewan Gubernur kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
2. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset serta memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM
3. Melaksanakan kegiatan perizinan dan pengawasan serta operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan kebijakan stabilitas keuangan, program perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung fungsi-fungsi utama.

## Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

## Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh  
Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia  
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2023" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan IV 2022 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 5,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,51% (yoy). Pada sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh peningkatan Konsumsi Pemerintah dan Impor Luar Negeri. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, serta Lapangan Usaha Perdagangan.
2. Laju inflasi Aceh pada triwulan IV 2022 tercatat terkendali diorong oleh terkendalnya inflasi kelompok makanan. Pada periode laporan, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 5,89% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,38% (yoy).
3. Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Lebih lanjut, program vaksinasi massal dan vaksin *booster* tahap ketiga juga mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi realisasi belanja pemerintah daerah perlu terus didorong.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah tercipta dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Februari 2023  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Rony Widijarto P.  
Kepala Perwakilan

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
<b>BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>1</b>
1.1. GAMBARAN UMUM.....	2
1.2. SISI PERMINTAAN.....	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	8
<b>BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>14</b>
2.1. GAMBARAN UMUM.....	15
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	15
2.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT.....	17
<b>BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....</b>	<b>19</b>
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI.....	20
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI.....	20
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN II 2022.....	26
3.4. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	27
<b>BAB 4. STABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN UMKM.....</b>	<b>33</b>
4.1. KINERJA PERBANKAN.....	34
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	35
4.3. KINERJA KORPORASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN.....	41
4.4. KINERJA PEMBIAYAAN/PEMBIAYAAN RUMAH TANGGA.....	42
4.5. LANGKAH PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM.....	43
<b>BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....</b>	<b>47</b>
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI.....	48
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	50
5.3. KEGIATAN KUPVA BB.....	53
5.4. INKLUSI KEUANGAN.....	54
<b>BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....</b>	<b>58</b>
6.1. KETENAGAKERJAAN.....	59
6.2. KEMISKINAN.....	61
<b>BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.....</b>	<b>64</b>
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI.....	65
7.2. PROSPEK INFLASI.....	67
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	68

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw IV 2022 .....	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	2
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan dari Sisi Permintaan .....	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....	3
Grafik 1.5 Perkembangan Pembiayaan Konsumsi.....	4
Grafik 1.6 Perkembangan Hasil Survei Konsumen.....	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.....	5
Grafik 1.8 Pertumbuhan Investasi.....	5
Grafik 1.9 Realisasi Investasi.....	6
Grafik 1.10 SKDU Investasi.....	6
Grafik 1.11 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri.....	6
Grafik 1,12 Perkembangan Ekspor Batubara .....	7
Grafik 1.13 Pertumbuhan Impor Luar Negeri Aceh.....	7
Grafik 1.14 Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah .....	8
Grafik 1.15 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Aceh dari Sisi LU Utama .....	8
Grafik 1.16 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara dan Laut.....	9
Grafik 1.17 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian .....	9
Grafik 1.18 Nilai Tukar Petani .....	9
Grafik 1.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan.....	10
Grafik 1.20 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan.....	10
Grafik 1.21 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi.....	11
Grafik 1.22 Pertumbuhan Pengadaan Semen.....	11
Grafik 1.23 Pertumbuhan LU Pertambangan .....	12
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh.....	18
Grafik 3.1 Perbandingan Inflasi Sumatera Tw IV 2022 .....	20
Grafik 3.2 Perkembangan Harga Uang Basah.....	21
Grafik 3.3 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit.....	21
Grafik 3.4 Produksi Cabai Merah .....	21
Grafik 3.5 Perkembangan Harga Bawang Merah .....	22
Grafik 3.6 Perkembangan Harga Emas Dunia .....	26
Grafik 3.7 Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh .....	27
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh.....	32
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) (% , yoy) .....	33
Grafik 4.3 Realisasi Belanja APBD dan Perkembangan Giro .....	33
Grafik 4.4 Perkembangan Nilai Tabungan .....	33
Grafik 4.5 Jumlah Rekening per Saldo .....	34
Grafik 4.6 Proporsi DPK per Jenis.....	34
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Kepemilikan .....	35

Grafik 4.8 DPK Spasial .....	35
Grafik 4.9 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Proyek dan Jenis Penggunaan .....	35
Grafik 4.10 Penyaluran Pembiayaan Spasial.....	37
Grafik 4.11 Perkembangan NPL/NPF.....	37
Grafik 4.12 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMKM.....	38
Grafik 4.13 Penyaluran Pembiayaan UMKM Spasial .....	38
Grafik 4.14 Penyaluran Pembiayaan Korporasi.....	39
Grafik 4.15 Tenaga Kerja Berdasarkan LU.....	40
Grafik 4.16 Proporsi Pembiayaan RT .....	41
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas .....	46
Grafik 5.2 Pertumbuhan Inflow dan Outflow .....	46
Grafik 5.3 Transaksi Kas Titipan Triwulanan.....	47
Grafik 5.4 Transaksi Kas Titipan .....	47
Grafik 5.5 Nominal SKNBI .....	48
Grafik 5.6 Volume SKNBI.....	48
Grafik 5.7 Nominal BI RTGS .....	48
Grafik 5.8 Volume BI RTGS.....	49
Grafik 5.9 Transaksi ATM Debit .....	49
Grafik 5.10 Transaksi Kartu Kredit.....	50
Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik .....	50
Grafik 5.12 Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS .....	50
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB.....	51
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA.....	52
Grafik 5.15 Penyaluran PKH (KPM).....	53
Grafik 5.16 Penyaluran PKH (Nominal).....	53
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal).....	53
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM).....	54
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera .....	58
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota .....	60
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Sumatera .....	61
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh .....	62

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan IV 2022.....	15
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Transfer dan Dana Desa Triwulan IV 2022 .....	16
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan IV 2022 .....	16
Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN di Aceh Triwulan IV 2022 .....	17
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APB di Provinsi Aceh Triwulan IV 2022 .....	17
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD se-Provinsi Aceh .....	18
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh .....	18
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang .....	20
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau .....	20
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki .....	22
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar .....	22
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga .....	23
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	23
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	24
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	24
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	25
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan .....	25
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.....	25
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya .....	25
Tabel 5.1 Rasio Ketersediaan Layanan Lembaga Keuangan Formal .....	52
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	58
Tabel 6.2 Perkembangan TPT.....	58
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor .....	59
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan.....	59
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan .....	59
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani .....	60
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	61
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan .....	61

# TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

## A. PDRB

### PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral)

Sektoral (Rp Triliun)	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,06	9,18	9,26	9,13	9,64	9,23	9,78	9,25	9,17	9,47	9,46	9,61	9,35	9,65	9,31	10,71
Pertambangan dan Penggalian	2,41	2,35	2,5	2,43	2,33	2,98	2,73	2,45	2,49	2,15	2,98	2,76	2,63	2,70	2,77	2,74
Industri Pengolahan	1,47	1,67	1,64	1,55	1,39	1,61	1,62	1,44	1,53	1,62	1,65	1,42	1,43	1,68	1,66	1,70
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Konstruksi	2,81	2,66	3,18	3,91	3,35	3,3	3,64	3,61	3,32	3,21	3,53	3,77	3,04	2,96	3,51	3,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	5,27	5,01	5,03	4,74	4,78	4,69	5,03	4,48	5,18	4,96	5,41	5,18	5,27	5,19	5,69
Transportasi dan Pergudangan	2,43	2,39	2,54	2,49	2,32	1,18	1,76	1,8	2,12	1,93	2,06	2,31	2,25	2,25	2,25	2,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,43	0,46	0,45	0,45	0,41	0,39	0,4	0,44	0,36	0,34	0,35	0,50	0,47	0,51	0,53	0,54
Informasi dan Komunikasi	1,12	1,15	1,16	1,19	1,28	1,35	1,29	1,26	1,34	1,33	1,45	1,46	1,47	1,51	1,61	1,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	0,57	0,58	0,62	0,62	0,6	0,58	0,57	0,57	0,55	0,58	0,53	0,60	0,45	0,51	0,54
Real Estate	1,34	1,38	1,39	1,4	1,41	1,35	1,35	1,34	1,37	1,37	1,53	1,40	1,42	1,43	1,59	1,45
Jasa Perusahaan	0,21	0,22	0,21	0,23	0,21	0,2	0,21	0,22	0,20	0,19	0,23	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,56	3,02	3,01	3,26	2,67	2,94	2,81	3,05	2,62	3,30	2,98	3,29	2,56	3,04	3,32	3,26
Jasa Pendidikan	0,78	0,89	0,92	0,94	0,84	0,91	0,92	0,99	0,88	0,84	0,88	1,10	0,95	0,95	0,91	1,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,9	1,02	1,03	1,04	0,97	0,95	1,06	1,18	1,07	1,09	1,16	1,25	1,26	1,29	1,22	1,26
Jasa lainnya	0,45	0,47	0,48	0,48	0,48	0,45	0,48	0,51	0,48	0,44	0,47	0,56	0,54	0,56	0,57	0,56
<b>PDRB</b>	<b>31,62</b>	<b>32,8</b>	<b>33,43</b>	<b>34,2</b>	<b>32,71</b>	<b>32,3</b>	<b>33,4</b>	<b>33,21</b>	<b>32,07</b>	<b>33,10</b>	<b>33,34</b>	<b>35,66</b>	<b>33,45</b>	<b>34,57</b>	<b>35,27</b>	<b>37,66</b>
<b>PDRB Non Migas</b>	<b>29,21</b>	<b>30,44</b>	<b>30,93</b>	<b>31,8</b>	<b>30,38</b>	<b>29,3</b>	<b>30,67</b>	<b>30,75</b>	<b>29,58</b>	<b>30,95</b>	<b>31,36</b>	<b>32,90</b>	<b>30,82</b>	<b>31,87</b>	<b>32,50</b>	<b>34,92</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran

Komponen (Rp Triliun)	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
- Konsumsi Rumah Tangga	18,01	18,5	18,58	18,65	18,67	18,5	18,28	17,82	17,72	18,55	18,83	19,044	18,84	19,34	19,21	18,93
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,68	0,69	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,61	0,60	0,58	0,63	0,6391	0,64	0,64	0,67	0,68
- Konsumsi Pemerintah	3,03	5,94	6,12	8,26	3,24	5,95	5,85	6,44	5,24	6,54	5,87	7,2886	3,32	5,36	5,66	7,61
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10,02	10,02	11,35	12,13	10,92	10,78	11,53	11,92	10,32	10,97	11,36	11,97	10,96	10,94	11,37	11,86
- Perubahan Inventori	-0,01	0,01	0	0	-0,11	-0,29	0,05	0,28	0,18	-0,05	0,01	-0,034	0,06	0,03	-0,02	0,09
- Ekspor Luar Negeri	0,95	1,09	1,06	1,12	1,33	0,76	0,74	0,78	1,27	0,94	1,00	1,8484	1,69	1,66	1,71	2,12
- Impor Luar Negeri	0,37	0,77	1,12	0,52	0,27	0,07	0,06	0,2	0,08	0,19	0,12	0,6443	0,18	0,36	0,19	0,36
- Net Ekspor Antarprovinsi	-0,7	-2,68	-3,21	-6,06	-1,72	-4	-3,64	-4,45	-3,17	-4,24	-3,26	-4,449	-1,87	-3,04	-3,14	-3,27
<b>PDRB</b>	<b>31,62</b>	<b>32,8</b>	<b>33,43</b>	<b>34,2</b>	<b>32,71</b>	<b>32,3</b>	<b>33,4</b>	<b>33,21</b>	<b>32,07</b>	<b>33,10</b>	<b>###</b>	<b>35,66</b>	<b>33,45</b>	<b>34,57</b>	<b>35,27</b>	<b>37,66</b>
<b>PDRB Non Migas</b>	<b>29,21</b>	<b>30,44</b>	<b>30,93</b>	<b>31,8</b>	<b>30,38</b>	<b>29,3</b>	<b>30,67</b>	<b>30,75</b>	<b>1,4665</b>	<b>30,95</b>	<b>31,36</b>	<b>32,898</b>	<b>30,82</b>	<b>31,87</b>	<b>32,50</b>	<b>34,92</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## B. Inflasi

Inflasi (%, yoy)	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV												
<b>Banda Aceh</b>	2,01	2,77	2,22	1,38	3,72	1,31	1,90	3,46	1,25	1,87	2,07	2,41	3,95	6,31	7,85	6,00
<b>Lhokseumawe</b>	1,50	1,97	1,89	1,20	3,36	1,08	1,67	3,55	2,31	3,18	2,52	1,97	2,97	5,23	6,10	5,37
<b>Meulaboh</b>	1,74	4,38	5,21	4,28	5,49	2,13	2,30	4,23	1,62	2,86	1,48	2,08	3,56	6,22	8,02	6,56
<b>Aceh</b>	<b>1,82</b>	<b>2,73</b>	<b>2,51</b>	<b>1,69</b>	<b>3,84</b>	<b>1,36</b>	<b>1,89</b>	<b>3,59</b>	<b>1,61</b>	<b>2,37</b>	<b>2,12</b>	<b>2,24</b>	<b>3,62</b>	<b>5,99</b>	<b>7,38</b>	<b>5,89</b>

Kota	Kelompok (% yoy)												Total
	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar RT	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Trans.	Infokom, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pend.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya		
<b>Banda Aceh</b>	3,68	1,45	6,78	3,48	4,50	15,39	-0,13	-1,15	0,22	8,20	6,63	6	
<b>Lhokseumawe</b>	5,13	5,12	2,84	5,52	0,33	20,65	-0,59	7,49	1,13	3,76	3,47	5,37	
<b>Meulaboh</b>	6,45	1,91	4,23	4,47	8,56	18,96	-1,65	4,36	0,39	4,25	6,15	6,56	
<b>Aceh</b>	<b>4,59</b>	<b>2,72</b>	<b>5,45</b>	<b>4,26</b>	<b>3,20</b>	<b>16,89</b>	<b>-0,44</b>	<b>2,22</b>	<b>0,42</b>	<b>6,50</b>	<b>5,56</b>	<b>5,89</b>	

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## C. Perbankan

### Indikator Umum

Indikator	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV												
<b>Total Aset (Rp Triliun)</b>	<b>52,73</b>	<b>57,79</b>	<b>54,64</b>	<b>58,01</b>	<b>55,23</b>	<b>56,85</b>	<b>59,96</b>	<b>58,14</b>	<b>55,08</b>	<b>52,85</b>	<b>50,47</b>	<b>52,25</b>	<b>49,86</b>	<b>52,90</b>	<b>52,58</b>	<b>53,22</b>
Pertumbuhan (yoy)%	7,69	8,12	2,23	5,82	4,74	-1,61	9,73	0,22	-0,27	-7,04	-	15,83	10,13	-9,48	0,09	0,00
Pertumbuhan (mtm)%	0,66	9,40	0,91	2,64	3,74	8,93	-0,46	1,57	-0,74	-5,47	0,61	3,52	-0,89	0,63	0,00	0,00
<b>DPK (Rp Triliun)</b>	<b>38,46</b>	<b>42,45</b>	<b>39,68</b>	<b>42,24</b>	<b>39,02</b>	<b>40,23</b>	<b>43,39</b>	<b>41,72</b>	<b>38,46</b>	<b>38,96</b>	<b>39,90</b>	<b>39,50</b>	<b>38,47</b>	<b>41,11</b>	<b>40,14</b>	<b>40,09</b>
Pertumbuhan (yoy)%	5,49	7,60	-0,58	6,48	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,47	0,03	5,52	0,00	0,00
Pertumbuhan (mtm)%	-0,59	13,85	1,80	1,45	1,90	7,95	-0,60	-0,41	-1,61	-0,55	6,38	6,21	0,75	1,40	0,00	0,00
<b>Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)</b>	<b>36,37</b>	<b>36,63</b>	<b>37,92</b>	<b>38,27</b>	<b>37,62</b>	<b>37,66</b>	<b>37,32</b>	<b>36,84</b>	<b>35,12</b>	<b>33,82</b>	<b>33,16</b>	<b>31,02</b>	<b>31,92</b>	<b>32,65</b>	<b>33,45</b>	<b>49,29</b>
Pertumbuhan (yoy)%	8,29	7,69	8,07	6,62	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-	-	-	-9,13	-3,46	0,00	0,01
Pertumbuhan (mtm)%	2,19	0,22	1,25	2,61	2,56	7,65	-1,30	1,95	-1,04	-3,30	0,71	-6,45	2,30	1,03	0,00	0,00
<b>LDR %</b>	<b>94,58</b>	<b>86,28</b>	<b>95,56</b>	<b>90,59</b>	<b>96,42</b>	<b>93,61</b>	<b>86,00</b>	<b>88,30</b>	<b>91,33</b>	<b>86,81</b>	<b>83,09</b>	<b>78,99</b>	<b>82,97</b>	<b>79,42</b>	<b>83,33</b>	<b>122,95</b>
<b>NPL-gross %</b>	<b>1,61</b>	<b>1,71</b>	<b>1,63</b>	<b>1,01</b>	<b>1,44</b>	<b>1,87</b>	<b>2,50</b>	<b>2,26</b>	<b>1,84</b>	<b>2,25</b>	<b>2,86</b>	<b>1,94</b>	<b>2,02</b>	<b>1,92</b>	<b>1,78</b>	<b>3,40</b>
<b>NPL-Nominal (Rp Triliun)</b>	<b>0,58</b>	<b>0,63</b>	<b>0,62</b>	<b>0,39</b>	<b>0,54</b>	<b>0,70</b>	<b>0,93</b>	<b>0,83</b>	<b>0,65</b>	<b>0,76</b>	<b>0,95</b>	<b>0,60</b>	<b>0,64</b>	<b>0,63</b>	<b>0,60</b>	<b>1,67</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

### Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV												
<b>Total (Rp Triliun)</b>	<b>38,46</b>	<b>42,45</b>	<b>39,68</b>	<b>42,24</b>	<b>39,02</b>	<b>40,23</b>	<b>43,39</b>	<b>41,72</b>	<b>38,46</b>	<b>38,96</b>	<b>39,90</b>	<b>39,50</b>	<b>38,46</b>	<b>41,10</b>	<b>40,13</b>	<b>40,09</b>
Pertumbuhan (yoy)%	5,49	7,60	-0,58	6,48	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,32	0,03	5,52	0,58	1,48
<b>Giro (Rp Triliun)</b>	<b>8,70</b>	<b>12,01</b>	<b>9,15</b>	<b>8,63</b>	<b>7,80</b>	<b>8,25</b>	<b>11,20</b>	<b>9,23</b>	<b>7,30</b>	<b>7,97</b>	<b>7,99</b>	<b>9,05</b>	<b>10,61</b>	<b>9,25</b>	<b>7,28</b>	<b>6,32</b>
Pertumbuhan (yoy)%	24,04	28,12	-	22,49	-10,32	-31,21	22,39	6,97	-6,33	-3,54	-28,71	-1,95	45,23	16,16	-8,71	-30,22
<b>Tabungan (Rp Triliun)</b>	<b>18,98</b>	<b>19,92</b>	<b>20,21</b>	<b>24,41</b>	<b>20,54</b>	<b>21,19</b>	<b>21,81</b>	<b>23,33</b>	<b>19,4</b>	<b>19,33</b>	<b>21,04</b>	<b>22,09</b>	<b>20,27</b>	<b>21,45</b>	<b>21,49</b>	<b>24,06</b>
Pertumbuhan (yoy)%	3,38	4,20	6,52	9,88	8,20	6,38	7,92	-4,41	-5,54	-8,77	-3,51	-5,31	4,50	10,95	2,13	7,93
<b>Deposito (Rp Triliun)</b>	<b>10,78</b>	<b>10,52</b>	<b>10,32</b>	<b>9,21</b>	<b>10,67</b>	<b>10,77</b>	<b>10,38</b>	<b>9,16</b>	<b>11,75</b>	<b>11,66</b>	<b>10,88</b>	<b>8,15</b>	<b>7,58</b>	<b>10,40</b>	<b>11,35</b>	<b>9,71</b>
Pertumbuhan (yoy)%	-2,75	-4,00	-1,03	-11,60	-0,95	2,42	0,66	-0,57	10,03	8,14	4,74	-11,02	-35,47	-10,76	4,40	19,04

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

### Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV												
<b>Total Kredit (Rp Triliun)</b>	<b>36,37</b>	<b>36,63</b>	<b>37,92</b>	<b>38,27</b>	<b>37,62</b>	<b>37,66</b>	<b>37,32</b>	<b>36,84</b>	<b>35,12</b>	<b>33,82</b>	<b>33,16</b>	<b>31,20</b>	<b>31,91</b>	<b>32,46</b>	<b>33,45</b>	<b>34,23</b>
Pertumbuhan (yoy) %	8,29	7,69	8,07	6,62	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-10,21	-11,15	-15,30	-9,13	-3,46	0,87	9,71
<b>Modal Kerja (Rp Triliun)</b>	<b>10,95</b>	<b>10,96</b>	<b>11,76</b>	<b>11,14</b>	<b>9,87</b>	<b>11,17</b>	<b>10,74</b>	<b>10,32</b>	<b>9,63</b>	<b>8,47</b>	<b>8,26</b>	<b>7,36</b>	<b>7,33</b>	<b>7,54</b>	<b>7,26</b>	<b>6,8</b>
Pertumbuhan (yoy)%	10,20	7,16	10,40	-1,36	-9,82	1,95	-8,69	-7,41	-2,48	-24,21	-23,06	-28,68	-23,78	-10,87	-12,08	-7,63
<b>Investasi (Rp Triliun)</b>	<b>4,47</b>	<b>4,53</b>	<b>4,60</b>	<b>4,50</b>	<b>4,17</b>	<b>3,81</b>	<b>3,67</b>	<b>3,52</b>	<b>2,63</b>	<b>2,61</b>	<b>2,50</b>	<b>2,59</b>	<b>2,74</b>	<b>2,94</b>	<b>3,29</b>	<b>3,62</b>
Pertumbuhan (yoy)%	16,62	15,12	13,99	17,54	-6,66	-15,77	-20,28	-21,92	-36,90	-31,58	-31,77	-26,42	4,30	12,56	31,82	39,86
<b>Konsumsi (Rp Triliun)</b>	<b>20,95</b>	<b>21,13</b>	<b>21,55</b>	<b>22,61</b>	<b>23,57</b>	<b>22,66</b>	<b>22,91</b>	<b>23,00</b>	<b>22,86</b>	<b>22,73</b>	<b>22,39</b>	<b>21,24</b>	<b>21,83</b>	<b>22,15</b>	<b>22,88</b>	<b>23,79</b>
Pertumbuhan (yoy)%	5,73	6,49	5,68	8,96	12,50	7,27	6,31	1,70	-3,01	0,29	-2,26	-7,65	-4,51	-2,54	2,19	12,04

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV												
<b>Total Kredit (Rp Triliun)</b>	<b>42,57</b>	<b>42,78</b>	<b>43,51</b>	<b>43,98</b>	<b>43,88</b>	<b>43,00</b>	<b>43,54</b>	<b>41,64</b>	<b>40,62</b>	<b>42,37</b>	<b>44,86</b>	<b>46,46</b>	<b>47,21</b>	<b>47,57</b>	<b>47,09</b>	<b>49,29</b>
Pertumbuhan (yoy) %	6,69	2,76	0,49	4,21	3,07	0,52	0,07	(5,32)	(7,43)	(1,48)	3,03	11,58	16,22	12,28	5,00	6,09
<b>Modal Kerja (Rp Triliun)</b>	<b>12,42</b>	<b>12,59</b>	<b>13,48</b>	<b>12,55</b>	<b>12,16</b>	<b>13,20</b>	<b>13,73</b>	<b>12,13</b>	<b>11,77</b>	<b>11,49</b>	<b>14,38</b>	<b>13,70</b>	<b>14,03</b>	<b>13,63</b>	<b>12,24</b>	<b>12,89</b>
Pertumbuhan (yoy) %	6,25	(0,75)	0,25	(2,10)	(2,05)	4,82	1,86	(3,30)	(3,24)	(12,98)	4,73	12,94	19,23	18,67	(14,48)	(5,92)
<b>Investasi (Rp Triliun)</b>	<b>7,77</b>	<b>7,66</b>	<b>7,22</b>	<b>7,32</b>	<b>7,07</b>	<b>6,40</b>	<b>6,27</b>	<b>5,86</b>	<b>5,17</b>	<b>6,86</b>	<b>5,93</b>	<b>8,89</b>	<b>8,96</b>	<b>9,38</b>	<b>9,59</b>	<b>10,24</b>
Pertumbuhan (yoy) %	10,98	1,26	(8,42)	3,12	(9,00)	(16,36)	(13,10)	(19,87)	(26,89)	7,08	(5,46)	51,64	73,56	36,89	61,89	15,22
<b>Konsumsi (Rp Triliun)</b>	<b>22,39</b>	<b>22,53</b>	<b>22,81</b>	<b>24,11</b>	<b>24,65</b>	<b>23,40</b>	<b>23,54</b>	<b>23,64</b>	<b>23,68</b>	<b>24,02</b>	<b>24,55</b>	<b>23,86</b>	<b>12,20</b>	<b>24,55</b>	<b>25,25</b>	<b>26,15</b>
Pertumbuhan (yoy) %	5,51	5,37	3,83	8,20	10,10	3,85	3,19	(1,95)	(3,92)	2,67	4,29	0,95	2,22	2,20	2,88	9,64

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

## Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Pertanian</b>	3,02	3,05	3,59	3,55	3,29	3,6	3,47	2,63	1,78	1,99	1,81	1,29	1,27	1,23	1,39	1,57
<b>Pertambangan</b>	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,41	0,04
<b>Industri Pengolahan</b>	3	2,73	2,72	1,99	1,68	1,77	1,45	2,29	1,94	1,02	0,69	0,81	0,86	0,89	0,05	1,00
<b>Listrik Gas dan Air</b>	0,14	0,14	0,14	0,12	0,11	0,1	0,1	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07	0,89	0,06
<b>Konstruksi</b>	0,84	0,92	1,08	1,09	0,88	0,94	0,98	0,98	0,82	0,68	0,72	0,56	0,47	0,57	0,06	0,63
<b>Perdagangan</b>	6,67	6,59	6,62	6,54	5,78	5,83	5,64	5,19	4,97	4,9	5,04	4,39	4,43	5,02	0,65	5,06
<b>Pengangkutan</b>	0,22	0,23	0,23	0,25	0,22	0,33	0,21	0,2	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	5,19	0,17
<b>Jasa Dunia Usaha</b>	0,36	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,3	0,33	0,32	0,15	0,14	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16
<b>Jasa Masyarakat</b>	0,94	0,96	0,99	0,66	0,6	0,63	0,63	0,58	0,56	0,56	0,4	0,77	0,74	0,68	0,54	0,52
<b>Lainnya</b>	20,95	21,13	22,15	22,54	24,66	24,04	24,47	24,49	24,41	24,21	24,06	21,24	21,83	22,16	22,88	23,80
<b>Total</b>	<b>35,55</b>	<b>36,63</b>	<b>37,92</b>	<b>38,27</b>	<b>37,62</b>	<b>37,66</b>	<b>37,32</b>	<b>36,84</b>	<b>35,12</b>	<b>33,82</b>	<b>33,16</b>	<b>31,2</b>	<b>31,92</b>	<b>32,65</b>	<b>33,45</b>	<b>34,23</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Pertanian</b>	3,76	3,82	3,75	3,95	3,74	3,83	3,82	3,66	2,89	2,55	3,53	2,47	2,41	2,41	2,59	2,88
<b>Perikanan</b>	0,11	0,11	0,14	0,16	0,19	0,33	0,36	0,34	0,40	0,40	0,39	0,76	0,69	0,42	0,42	0,31
<b>Pertambangan</b>	1,55	1,38	1,51	1,19	1,35	1,16	1,24	0,98	1,08	1,06	0,87	3,91	4,78	4,94	4,72	5,52
<b>Ind. Pengolahan</b>	3,75	3,45	3,71	3,03	3,27	3,28	3,76	2,87	2,62	2,55	2,34	1,47	1,58	2,44	1,73	2,65
<b>Listrik, Gas &amp; Air</b>	0,63	0,65	0,50	0,49	0,52	0,62	0,63	0,60	0,60	2,63	0,78	0,49	0,37	0,36	0,35	0,35
<b>Konstruksi</b>	0,99	1,24	1,43	1,50	1,51	1,53	1,60	1,55	1,38	1,38	1,43	1,02	0,86	0,88	0,93	0,89
<b>Perdagangan</b>	7,10	7,23	7,23	7,14	6,34	6,30	6,02	5,54	5,53	5,45	6,70	6,31	6,18	6,70	6,83	6,64
<b>Hotel &amp; Restoran</b>	0,32	0,34	0,37	0,39	0,39	0,47	0,48	0,45	0,48	0,46	0,72	0,65	0,63	0,63	0,63	0,43
<b>Transportasi, Gudang &amp; Kom. Perantara</b>	0,49	0,50	0,50	0,52	0,49	0,45	0,44	0,40	0,38	0,33	0,98	0,92	1,00	0,41	0,40	0,34
<b>Kuangan</b>	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,01	0,17	0,01	0,01
<b>Perumahan, usaha sewa &amp; Js. Perusahaan</b>	0,37	0,40	0,39	0,40	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,34	1,22	3,31	3,35	2,39	2,33	2,22
<b>Adm Pemerintahan, Jasa Pendidikan</b>	0,09	0,08	0,08	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jasa Kesehatan &amp; Keg. Sosial</b>	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
<b>Jasa Masyarakat</b>	0,17	0,17	0,21	0,21	0,19	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,21	0,22	0,22	0,24
<b>Jasa Perseorangan</b>	0,72	0,73	0,74	0,72	0,65	0,66	0,66	0,60	0,59	0,59	0,47	0,81	0,79	0,72	0,57	0,55
<b>Kemasyarakatan</b>	0,06	0,08	0,08	0,08	0,07	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,22	0,15	0,12	0,09	0,08	0,06
<b>Jasa Badan Internasional</b>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya</b>	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,20	0,26	0,27	0,28	0,27	0,39	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha</b>	22,39	22,53	22,81	24,11	24,65	23,40	23,54	23,64	23,68	24,02	24,55	23,86	24,21	24,70	25,25	26,15
<b>Total</b>	<b>42,57</b>	<b>42,78</b>	<b>43,51</b>	<b>43,98</b>	<b>43,88</b>	<b>43,00</b>	<b>43,54</b>	<b>41,64</b>	<b>40,62</b>	<b>42,37</b>	<b>44,86</b>	<b>46,46</b>	<b>47,2096</b>	<b>47,51</b>	<b>47,10</b>	<b>49,29</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Perkembangan Ekonomi Daerah

Pada triwulan IV 2022 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 5,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,51% (yoy).

Pada triwulan IV 2022 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 5,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,51% (yoy). Pada sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh peningkatan Konsumsi Pemerintah dan Impor Luar Negeri. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, serta Lapangan Usaha Perdagangan. Pada keseluruhan tahun 2022, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,21% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 2,79% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri.

## Perkembangan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pada triwulan IV 2022 secara umum mengalami akselerasi, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBA.

Kinerja keuangan daerah pada triwulan IV 2022 secara umum mengalami akselerasi, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBD. Di sisi lain, realisasi belanja dan pendapatan APBN juga mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah melalui alokasi APBA dan APBK hingga triwulan IV 2022 mencapai 82,17% dari total pagu belanja (Rp44,78 triliun) atau sebesar Rp29,08 triliun, realisasi tumbuh 6,62% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

## Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 5,89% (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,38% (yoy).

Pada triwulan IV 2022 inflasi Aceh lebih terkendali didorong oleh terkendalnya inflasi kelompok makanan. Lebih lanjut pada triwulan I 2023, laju inflasi Aceh diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan di Provinsi Aceh. Kendati demikian, terdapat potensi kenaikan biaya yang dapat mendorong kenaikan harga, salah satunya bersumber dari UMP Aceh yang mengalami peningkatan pada awal tahun 2023 sebesar 7,8%.

## Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 tetap terjaga, yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, dan *Non Performing Financing* (NPF). DPK pada triwulan laporan tercatat Rp40,09 T dan NPF berdasarkan lokasi bank sebesar 1,53%. *Financing to Deposit Ratio* pun meningkat seiring pembiayaan yang meningkat, terutama untuk jenis penggunaan investasi sektor prioritas.

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan IV 2022, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh.

Selama triwulan IV 2022, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana terdapat peningkatan pada outflow dan inflow pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara sistem pembayaran nontunai, baik nilai besar maupun ritel, terus menunjukkan tren peningkatan. Di sisi lain, penggunaan kartu ATM/debit dan Uang Elektronik tumbuh positif pada triwulan laporan.

## Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, meskipun

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun berbanding terbalik pada aspek kemiskinan yang menunjukkan peningkatan persentase. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT

kemiskinan menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Aceh berada pada urutan keempat, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

## Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya, meskipun dengan kecenderungan lebih rendah dibanding tahun 2022.

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 3,20%-3,70%(yoy) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (4,21%, yoy). Kondisi tersebut diperkirakan oleh normalisasi ekspor luar negeri yang sudah tumbuh tinggi pada periode-periode sebelumnya. Laju inflasi tahun 2022 diperkirakan berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar  $3\pm 1\%$ , dengan perkiraan peningkatan inflasi didorong oleh bahan-bahan makanan.



## BAB I

# PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

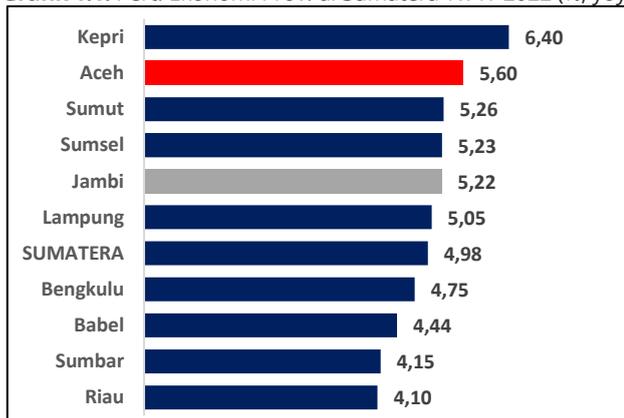
Pada triwulan IV 2022 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 5,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,51% (yoy). Pada sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh peningkatan Konsumsi Pemerintah dan Impor Luar Negeri. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, serta Lapangan Usaha Perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Aceh secara tahunan pada 2022 sebesar 4,21% (yoy) meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 2,79% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri.

## 1.1. Gambaran umum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022 melanjutkan kinerja yang positif dari triwulan sebelumnya. Perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,73% (yoy).

Perekonomian Sumatera pada triwulan IV 2022 juga tumbuh positif sebesar 4,98% (yoy). Namun berbeda dengan nasional, realisasi tersebut lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tumbuh 4,73% (yoy). Berdasarkan wilayah regional Sumatera (Grafik 1.1), semua wilayah mengalami pertumbuhan yang positif diatas 4,0% (yoy). Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,40%, diikuti oleh Provinsi Aceh sebesar 5,60% dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,26%.

**Grafik 1.1.** Pert. Ekonomi Prov. di Sumatera Tw IV 2022 (% ,yoy)

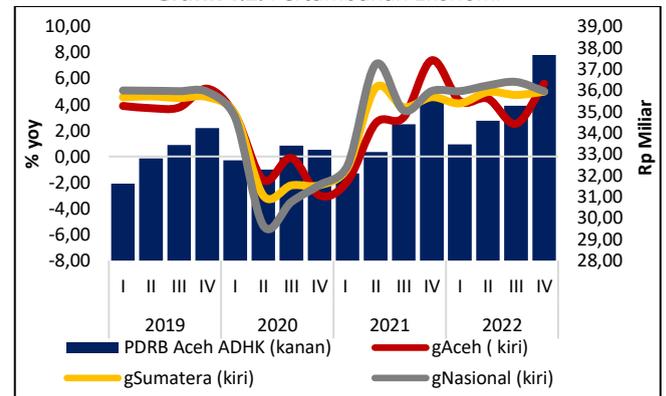


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Jika dilihat secara spasial, Aceh tercatat memiliki pangsa sebesar 5,30% terhadap perekonomian Sumatera. Sumbangan tersebut relatif tidak mengalami perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,18%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,23%). Sementara itu, Riau (23,21%), Sumatera Utara (22,73%), dan Sumatera Selatan (13,93%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut mencapai lebih dari 50% dari total ekonomi Sumatera.

Ekonomi Aceh triwulan IV tercatat tumbuh sebesar 5,60% (yoy) (Grafik 1.2), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,51% (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian Aceh pada triwulan laporan utamanya didorong oleh peningkatan Konsumsi Pemerintah dan Impor Luar Negeri. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, serta Lapangan Usaha Perdagangan.

**Grafik 1.2.** Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pertumbuhan ekonomi Aceh secara tahunan pada 2022 adalah sebesar 4,21% (yoy) meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 2,79% (yoy). Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2022 (c-to-c), komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 1,62%. Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah berasal dari komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 0,92%, dan impor luar negeri sebesar 0,02%. Sementara itu, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto menunjukkan sumber pertumbuhan yang negatif, dengan masing-masing -0,60% dan -0,23%.

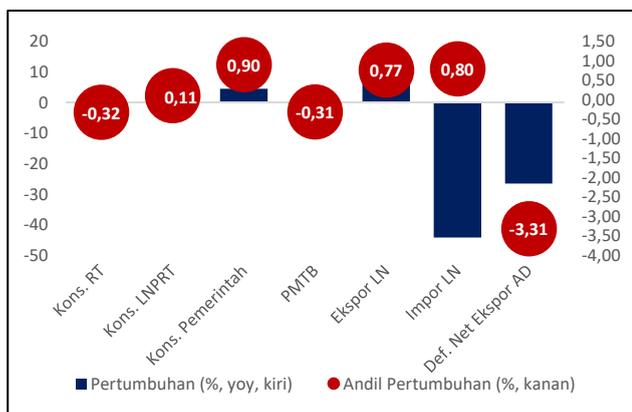
Dari sisi Lapangan usaha, LU yang mengalami pertumbuhan tertinggi (c-to-c) diantaranya perdagangan besar 0,94%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,92%, informasi dan komunikasi sebesar 0,46%, penyedia akomodasi makan dan minum sebesar 0,37%, pertambangan

dan penggalian sebesar 0,33%, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,33%. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi dengan kontraksi tertinggi diantaranya konstruksi sebesar -0,24%, jasa keuangan sebesar -0,10%, dan administrasi pemerintahan -0,01%.

## 1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2022 utamanya didorong oleh konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri. Konsumsi pemerintah menjadi komponen yang memberikan andil akselerasi tertinggi sebesar (0,90%) pada triwulan laporan yang diikuti ekspor luar negeri (0,77%), dan konsumsi LNPRRT (0,11%) (Grafik 1.3).

Grafik 1.3. Pert. dan Andil Pert. Sisi Permintaan Tw IV 2022



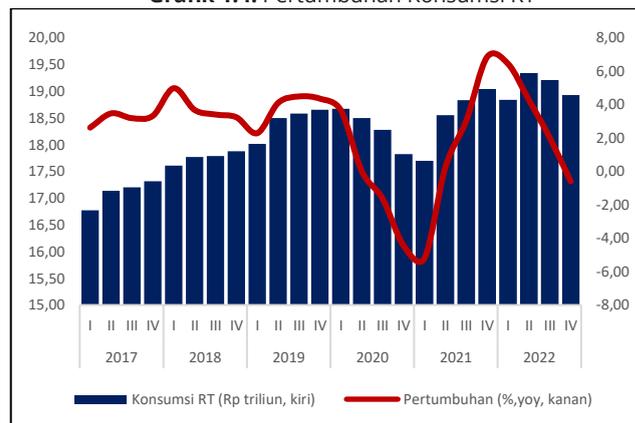
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2022, konsumsi rumah tangga tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,60% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,01% (yoy). Perlambatan tersebut memberikan andil sebesar -0,32% untuk konsumsi rumah tangga (Grafik 1.4). Perlambatan tersebut disebabkan oleh *baseline effect* di mana pada periode sebelumnya konsumsi rumah tangga telah tumbuh tinggi yang seiring pelonggaran kebijakan pembatasan sosial serta pandemi COVID-19 yang mulai surut. Perlambatan pada triwulan laporan juga disebabkan oleh telah berlalunya momentum Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha dan Tahun Baru Islam. Namun perlambatan yang lebih dalam pada triwulan IV tertahan oleh permintaan RT yang kembali

meningkat pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Sejalan dengan konsumsi RT, penyaluran pembiayaan konsumsi juga tumbuh melambat pada periode laporan. Secara nominal, pembiayaan kepada rumah tangga tercatat sebesar Rp26,1 triliun, atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu (Grafik 1.5). Peningkatan kinerja pembiayaan rumah tangga terjadi pada seluruh jenis pembiayaan, terutama pembiayaan dengan penggunaan yang bersifat multiguna. Namun demikian, pertumbuhan pembiayaan konsumsi tercatat mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 12,78% (yoy) menjadi sebesar 9,58% (yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 1.5. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi

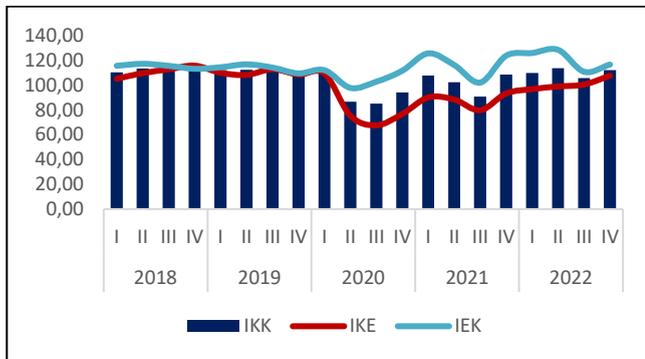


Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Meskipun mengalami perlambatan, konsumsi rumah tangga terindikasi masih kuat, sejalan dengan optimisme masyarakat pada triwulan IV

2022 yang masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) (Grafik 1.6) mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022 IKK tercatat sebesar 112,20, sementara itu pada triwulan III 2022, IKK tercatat sebesar 105,72.

**Grafik 1.6.** Perkembangan Hasil Survei Konsumen



Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) (Grafik 1.7) pada triwulan IV 2022 juga masih terjaga. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 110,18, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 103,90. NTP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi. Artinya pada triwulan laporan, daya tukar petani masih cukup baik, dimana indeks yang diterima lebih besar daripada indeks yang dibayarkan.

**Grafik 1.7.** Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Secara tahunan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 2,96% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,16% (yoy).** Kondisi pandemi COVID-19 yang melandai dan masyarakat yang sudah banyak melakukan aktivitas diluar rumah juga sangat

mempengaruhi pertumbuhan pada komponen ini.

## Konsumsi Pemerintah

**Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,41% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat -3,69% (yoy) (Grafik 1.8).**

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan IV tersebut didorong oleh realisasi belanja pemerintah yang pada triwulan laporan mampu tumbuh secara tahunan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp37,71 triliun (84,22% dari total pagu), meningkat 6,06% (yoy). Komponen tersebut didukung oleh realisasi belanja pegawai yang tumbuh sampai 23,87% pada triwulan IV 2022. Realisasi belanja APBN sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp47,60 triliun (99,17% dari total pagu). Secara proporsi, pertumbuhan didukung oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang tumbuh 4,53% secara tahunan.

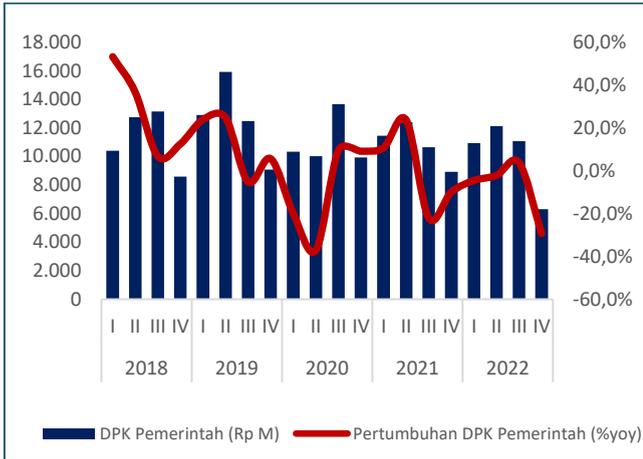
**Grafik 1.8.** Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kenaikan realisasi belanja pemerintah secara nominal pada triwulan laporan sejalan dengan dana simpanan pemerintah daerah di perbankan yang lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah tercatat sebesar Rp6,31 triliun, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp11,07 triliun (Grafik 1.9).

**Grafik 1.9.** Pertumbuhan DPK Pemerintah



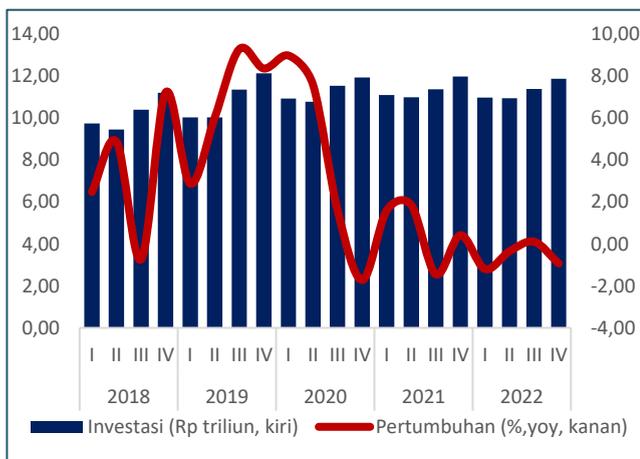
Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Secara tahunan, komponen belanja pemerintah terkontraksi sebesar **-4,35% (yoy)**, turun cukup dalam dibandingkan dengan periode tahun lalu yang tumbuh sebesar **6,83% (yoy)**. Perlambatan secara tahunan disebabkan *baseline* konsumsi pemerintah pada tahun 2021 yang meningkat cukup tinggi, diakibatkan oleh *baseline* tahun 2020 yang rendah (hanya mencapai 70% dari total pagu).

## Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi

Pada triwulan IV 2022, PMTB/investasi di wilayah Aceh terkontraksi sebesar **-0,93% (yoy)**, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar **0,10% (yoy)** (Grafik 1.10).

**Grafik 1.10.** Pertumbuhan PMTB/Investasi

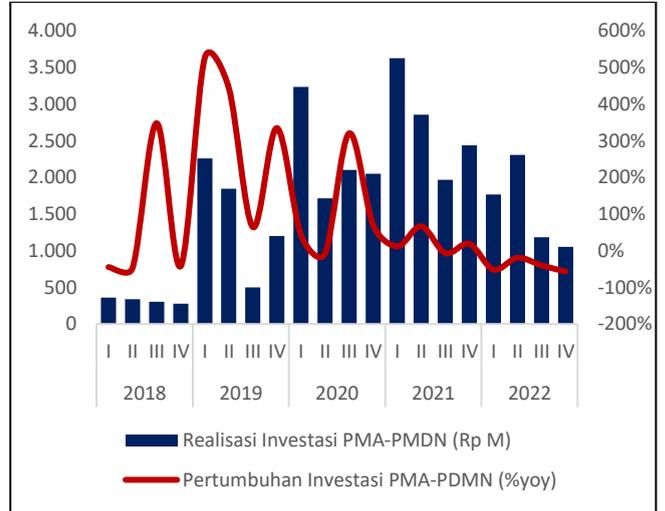


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konstraksi tersebut sejalan dengan penurunan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan data Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, investasi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp1.055,22 Miliar, atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1.186,06 Miliar. Secara tahunan, investasi juga tercatat mengalami perlambatan sebesar **-56,76% (yoy)** (Grafik 1.11).

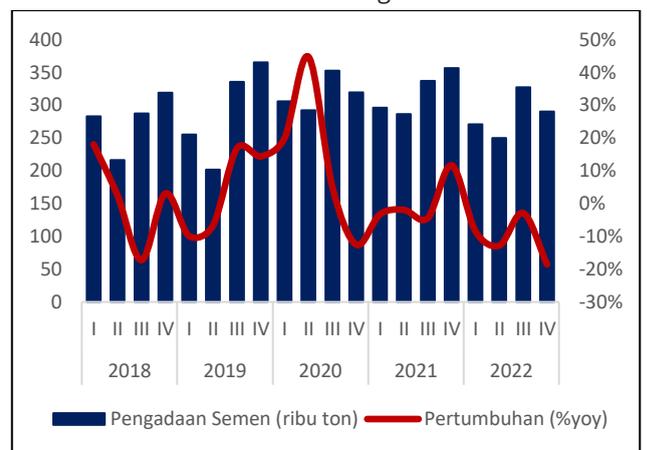
**Grafik 1.11.** Realisasi Investasi PMA-PMDN



Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), diolah

Selain itu, investasi bangunan yang diindikasikan dari pengadaan semen mengalami perlambatan pada triwulan IV 2022. Pengadaan semen pada triwulan IV 2022 terkontraksi sebesar **-18,56% (yoy)**, atau lebih dalam dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar **-2,91% (yoy)** (Grafik 1.12).

**Grafik 1.12.** Realisasi Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

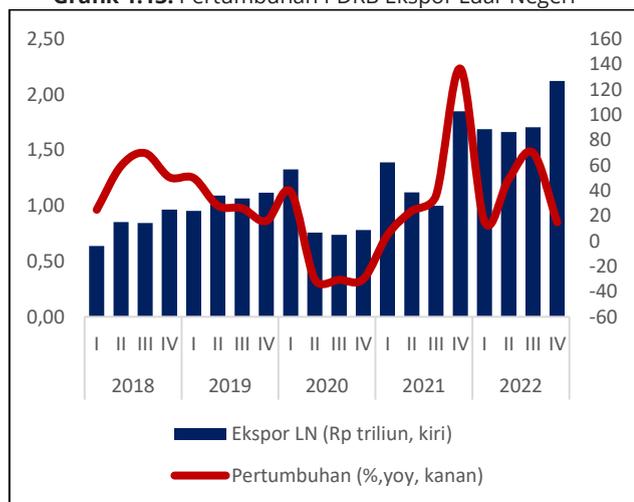
Secara keseluruhan tahun 2022, komponen PMTB melambat **-0,60% (yoy)**, turun dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang

sebesar 0,57% (yoy). Belum optimalnya belanja modal pemerintah di 2021 serta kondisi ketidakpastian yang masih berlanjut menjadi faktor penghambat kinerja investasi. Realisasi PMA-PMDN yang lebih rendah di tahun 2022 juga mendukung perlambatan kinerja PMTB. Kinerja PMTB terutama pada subkomponen nonbangunan yaitu dipengaruhi oleh pengadaan barang modal berupa mesin-mesin pendukung pembangunan pembangkit listrik.

## Ekspor Luar Negeri

**Ekspor luar negeri Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh sebesar 14,78% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 69,91% (yoy) (Grafik 1.13).** Dengan laju tersebut, ekspor luar negeri Aceh memberikan andil positif sebesar 0,77% terhadap kinerja ekonomi Aceh secara keseluruhan pada triwulan IV 2022.

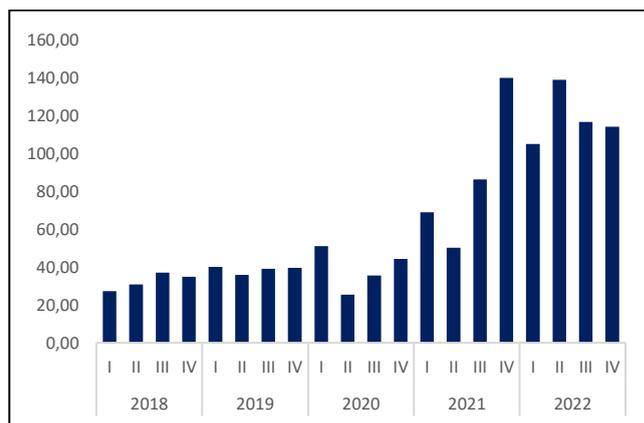
**Grafik 1.13.** Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kinerja komponen ekspor luar negeri yang tetap kuat tersebut didukung oleh realisasi ekspor barang asal Provinsi Aceh yang masih meningkat pada akhir tahun 2022. Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 secara nominal tercatat sebesar 212,36 juta USD (Grafik 1.14). Keseluruhan ekspor pada triwulan laporan semuanya berupa komoditas nonmigas terutama dari kelompok bahan bakar mineral; kopi, teh, rempah-rempah; dan buah-buahan.

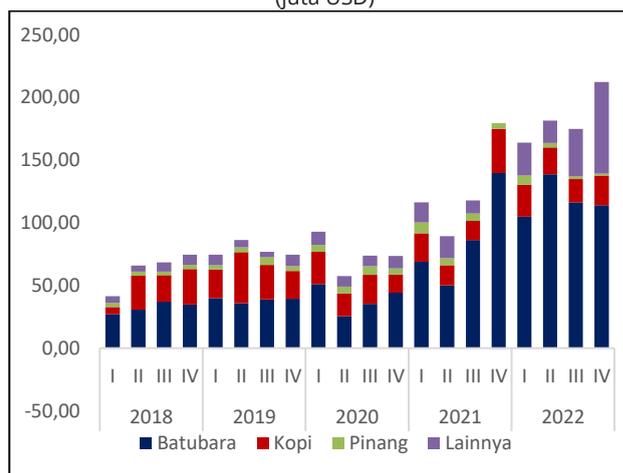
**Grafik 1.14.** Realisasi Ekspor Batubara (juta USD)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Secara umum, kinerja ekspor masih ditopang oleh komoditas batubara dan kopi, yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Aceh. Kedua komoditas tersebut memiliki pangsa sebesar 53,68% dan 11,14% dari total ekspor Provinsi Aceh. Ekspor komoditas batubara pada triwulan IV 2022 mencapai 114,01 juta USD, tercatat melambat sebesar -18,46% (yoy) (Grafik 1.15). Realisasi ekspor batubara tersebut masih berada di posisi yang tinggi, yang disebabkan oleh peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor akan kebutuhan energi. Komoditas ekspor kedua terbesar adalah kopi, di mana pada triwulan laporan ekspor komoditas tersebut mencapai 23,65 juta USD atau naik sebesar 27,24% (yoy).

**Grafik 1.15.** Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh (juta USD)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

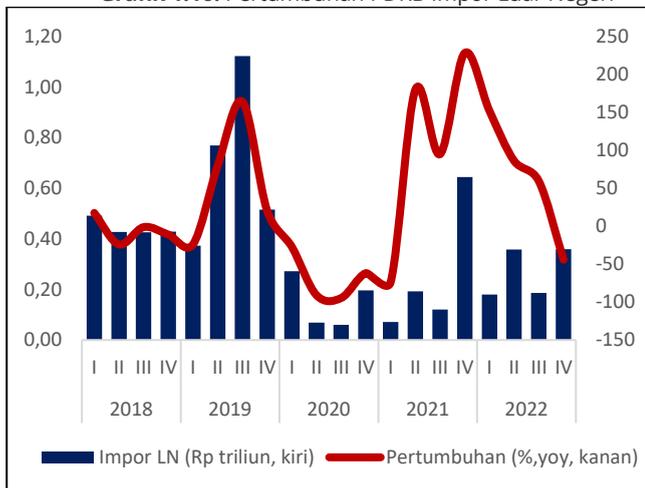
**Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja komponen ekspor luar negeri tumbuh melambat sebesar 32,17% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 50,78% (yoy).** Arah perbaikannya ekspor

beberapa komoditas utama seperti kopi dan batu bara setelah dibukanya kembali aktivitas di beberapa negara tujuan menjadi faktor pendorong kinerja ekspor. Ekspor juga ditunjang oleh meningkatnya harga-harga komoditas di tahun 2022 yang meningkatkan ekspor komoditas terutama batubara. Secara kumulatif, total nilai ekspor barang asal Aceh dari Januari hingga Desember 2022 adalah sebesar 733,08 juta USD, meningkat dibandingkan dengan kumulasi total nilai ekspor sepanjang tahun 2021 yang sebesar 502,93 juta USD. Kelompok ekspor nonmigas yang pangsa terbesar adalah bahan bakar mineral terutama batubara sebesar 53,68%, kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar 11,14%, dan kelompok buah-buahan (pinang) sebesar 0,79%.

## Impor Luar Negeri

**Komponen impor luar negeri pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 44,24% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 59,22% (yoy) (Grafik 1.16).**

**Grafik 1.16.** Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

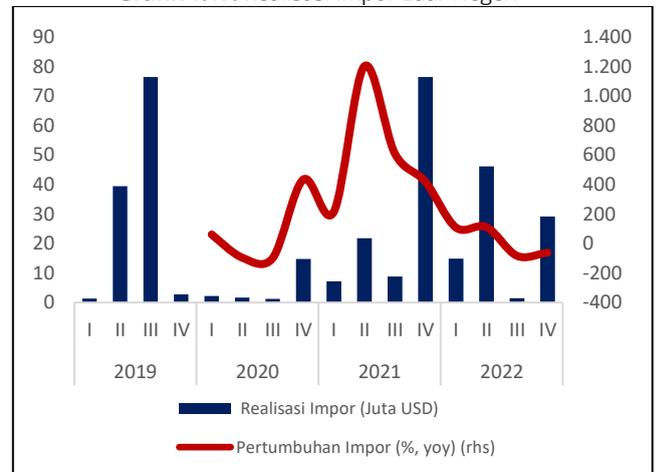


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, nilai impor barang ke Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 sebesar 29,20 juta USD, turun cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 76,47 juta USD (Grafik 1.17). Nilai impor barang mengalami penurunan

sebesar -61,82% pada triwulan IV. Secara umum, kinerja impor luar negeri masih didominasi oleh kelompok peralatan mesin dan bahan kimia. Secara lebih spesifik, barang impor utamanya merupakan peralatan mesin khusus *civil engineering and contractor plant and equipment and parts*. Penurunan impor menunjukkan bahwa proses pembangunan atau konstruksi di Aceh telah memiliki peralatan mesin khusus sehingga tidak memerlukan impor kembali. Meskipun terjadi penurunan impor, pertumbuhan ekonomi Aceh tetap kuat pada periode laporan.

**Grafik 1.17.** Realisasi Impor Luar Negeri



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

**Secara keseluruhan tahun 2022, impor luar negeri tumbuh sebesar 5,64% (yoy) melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh lebih tinggi sebesar 71,78% (yoy).**

Secara umum, perbaikan kinerja impor didorong oleh peningkatan konsumsi swasta yang meningkat pada tahun 2022. Nilai impor Aceh secara kumulatif Januari hingga Desember 2022 adalah sebesar 91,73 juta USD lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 114,31 juta USD. Negara asal impor didominasi oleh Tiongkok besar 49,38%, disusul oleh Rusia dan United Arab Emirates (UEA) dengan pangsa masing-masing sebesar 19,69% dan 9,33%. Lebih lanjut, barang-barang yang diimpor utamanya berasal dari kelompok mesin/pesawat mekanik sebesar 40,04%, kelompok pupuk sebesar 22,48% dan kelompok bahan bakar mineral (aspal) sebesar 19,35%.

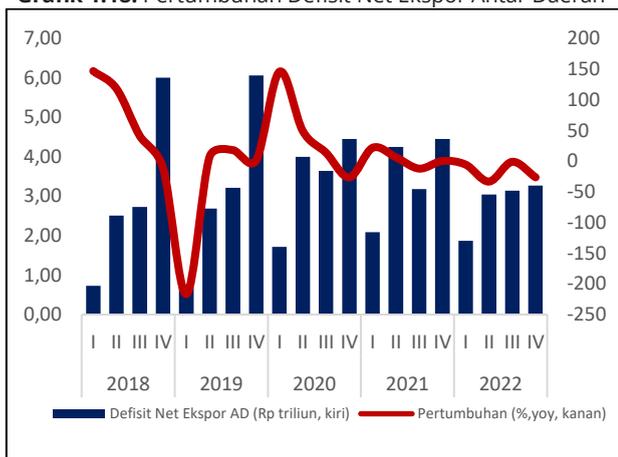
## Net Ekspor Antar Daerah

**Defisit neraca ekspor antar daerah Provinsi Aceh berkontraksi semakin dalam, dari sebesar -1,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar -26,54% (yoy) pada triwulan laporan.**

Pada triwulan IV 2022, defisit neraca ekspor antar daerah tercatat Rp3,26 triliun (ADHK), meningkat dibanding triwulan III 2022 sebesar Rp3,14 triliun (ADHK), namun mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,45 triliun (Grafik 1.18).

Defisit antar daerah mengindikasikan arus barang masuk lebih besar daripada barang yang keluar. Berdasarkan data perdagangan antar wilayah, Badan Pusat Statistik, penjualan antar wilayah paling besar di Provinsi Aceh dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang minyak mentah kelapa sawit dengan nilai penjualan sebesar Rp563 miliar. Di sisi lain, komoditas pembelian dari daerah lain didominasi oleh sepeda motor, alat transportasi umum jenis kendaraan bermotor untuk penumpang, minyak bahan bakar, gas alam (LPG), dan buah dan kernel kelapa sawit. Lima kelompok komoditas ini mencakup 45,17% pembelian antar wilayah di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh melakukan pembelian terbesar dari Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

**Grafik 1.18.** Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

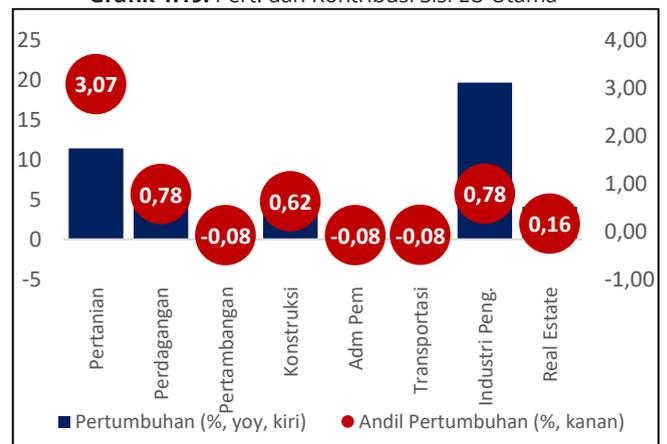
**Secara tahunan, pada tahun 2022 terdapat kontraksi pada laju pertumbuhan neraca ekspor antar daerah sebesar 21,17% (yoy).** Penurunan defisit perdagangan antar daerah

sejalan dengan melambatnya konsumsi pemerintah dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi barang-barang yang didatangkan dari daerah lain telah berkurang pada periode laporan.

## 1.3. Sisi Lapangan Usaha

**Perekonomian Aceh bersumber dari tiga lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (pangsa 28,43%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 15,10%), serta LU Konstruksi (pangsa 10,60%).** Kinerja ketiga LU utama Aceh menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Secara kumulatif, ketiga Lapangan Usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 54,13% terhadap struktur PDRB Provinsi Aceh. Meskipun demikian, perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian, LU Transportasi serta LU Administrasi Pertambangan menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh ke level yang lebih tinggi. Melihat dari sisi sumber pertumbuhan triwulan IV 2022, terdapat beberapa LU pendorong pertumbuhan. LU tersebut antara lain, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (andil 3,07%, yoy), LU Industri Pengolahan (andil 0,78%, yoy), dan LU Perdagangan Besar dan Eceran (andil 0,78%, yoy) (Grafik 1.19).

**Grafik 1.19.** Pert. dan Kontribusi Sisi LU Utama



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**  
**Kinerja lapangan usaha pertanian pada**

triwulan IV 2022 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -2,10% (yoy) (Grafik 1.20).

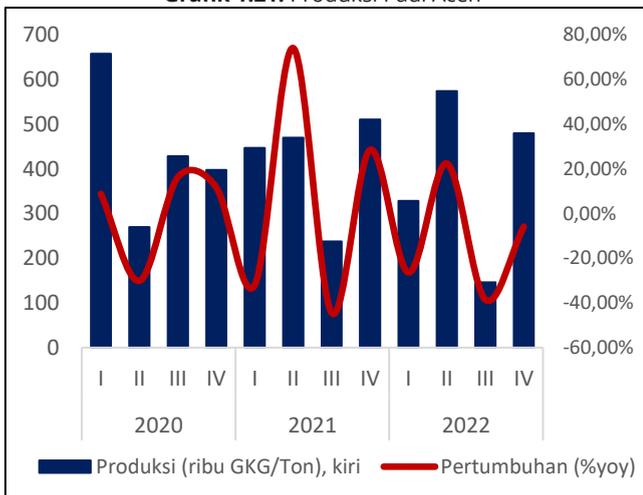
Peningkatan kinerja tersebut juga sejalan dengan produksi padi pada hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS yang menyatakan terjadi peningkatan produksi padi pada triwulan IV 2022 akibat pergeseran puncak panen. Pada triwulan IV, produksi padi tercatat sebesar 479,70 ribu GKG/ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan III yang hanya sebesar 146,06 ribu GKG/ton (Grafik 1.21).

**Grafik 1.20.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Grafik 1.21.** Produksi Padi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Selanjutnya, dari sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Pertanian mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp2,88 triliun atau berkontraksi sebesar -

12.45% (yoy) (Grafik 1.22).

**Grafik 1.22.** Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertanian



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya pada sektor perkebunan, hasil liason kepada pelaku usaha yang bergerak pada sektor tersebut menyatakan mengalami peningkatan kinerja. Hal tersebut terlihat pada produksi CPO yang meningkat sebesar 13% dan produksi TBS yang meningkat sebesar 11,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut didukung oleh pelaksanaan program *replanting* yang telah berjalan sejak tahun 2017. Hasil *replanting* dapat diperoleh perusahaan setelah 3 tahun.

**Secara keseluruhan tahun 2022, LU pertanian mengalami kenaikan dibandingkan kinerja tahun 2021.** Lapangan usaha pertanian mengalami akselerasi meskipun terjadi cuaca yang kurang baik serta banjir di beberapa titik. Produksi TBS masih dapat tumbuh di tahun 2022 menjadi sebesar 4,25 juta ton dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,14 juta ton, tumbuh 2,70% secara tahunan. Meskipun demikian, luas panen padi berdasarkan data BPS pada 2022 hanya sebesar 271,75 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 25,26 ribu hektar atau 9,30 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 297,01 ribu hektar.

## Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 5,13% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,50% (yoy) (Grafik 1.23).

Pertumbuhan LU perdagangan masih ditopang oleh lancarnya mobilitas masyarakat terutama di sektor ritel dan pusat perbelanjaan. Mobilitas (*google mobility index*) di sektor ritel per Oktober 2022 (data terakhir) tumbuh sebesar 14% dibandingkan dengan *baseline*. Lebih lanjut, sektor pusat perbelanjaan dan farmasi mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 23%. Naiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan tren penurunan COVID-19 di Aceh dan pelanggaran PPKM oleh pemerintah yang mendorong pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, pada triwulan IV terdapat HBKN Maulid Nabi yang sudah menjadi budaya di Provinsi Aceh untuk melakukan Kenduri. Umumnya, Kenduri berlangsung dengan waktu yang cukup lama, hampir sepanjang satu triwulan. Hal ini tentu saja meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Meskipun demikian, terdapat faktor penahan pertumbuhan yang lebih tinggi dari *second round effect* kenaikan BBM.

Grafik 1.23. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan

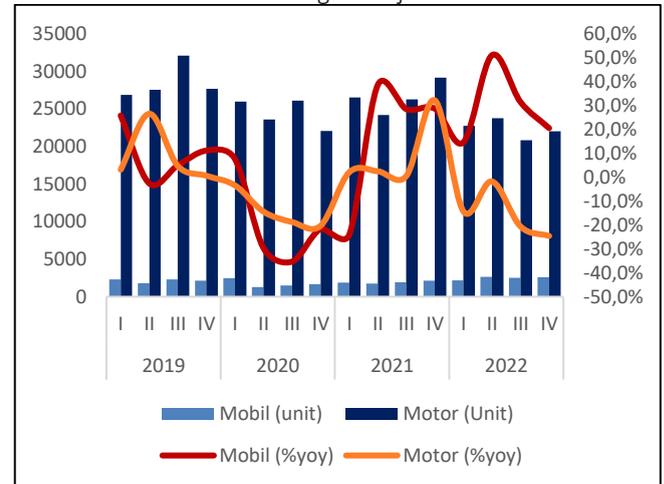


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lebih lanjut, LU Perdagangan dari sektor penjualan kendaraan secara umum mengalami perlambatan pada periode laporan. Total penjualan kendaraan mobil di Provinsi Aceh selama triwulan IV sebanyak

2587 unit kendaraan atau tumbuh sebesar 20,67% (yoy), sedangkan penjualan motor sebanyak 22.030 unit kendaraan atau turun sebesar -24,56% (yoy). (Grafik 1.24).

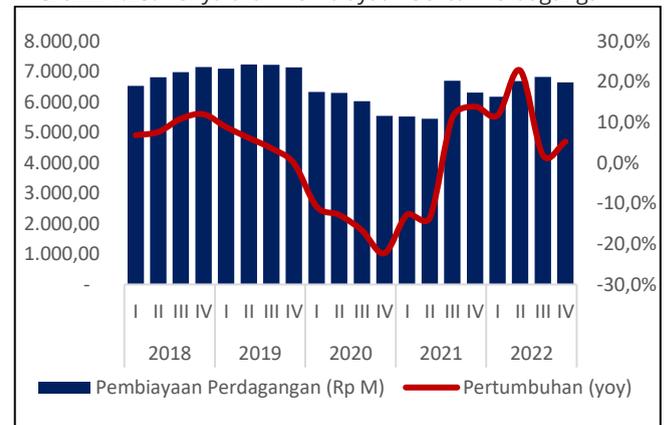
Grafik 1.24. Perkembangan Penjualan Kendaraan



Sumber: BPKA, diolah

Selanjutnya, dari sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Perdagangan kembali mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp6,68 triliun atau tumbuh sebesar 22,77% (yoy) (Grafik 1.25).

Grafik 1.25. Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan



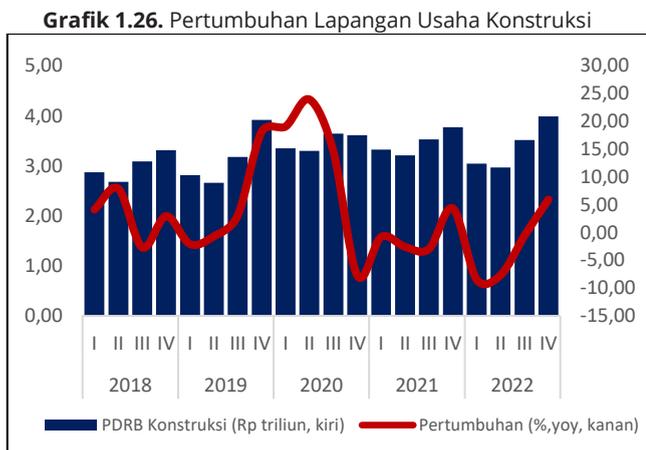
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya dari sisi pelaku usaha yang bergerak di sektor *books and stationary*, peningkatan kinerja usaha terkonfirmasi melalui hasil liason. Kontak menyatakan penjualan pada triwulan IV tahun 2022 secara *year on year* mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 7%. Peningkatan ini didorong oleh mulai pulihnya perekonomian secara global pasca pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan tahun 2022, lapangan usaha perdagangan tumbuh sebesar 6,36% (yoy) meningkatkan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,23% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan membaiknya konsumsi rumah tangga akibat relatif lebih lancarnya mobilitas masyarakat dimana pada tahun sebelumnya lebih rendah akibat himbuan untuk *stay at home*, *physical distancing* dan kebijakan *Work From Home* (WFH). Menurunnya aktivitas masyarakat ini berdampak langsung terhadap kinerja berbagai sektor yang pada akhirnya mengurangi pendapatan masyarakat dan melemahnya daya beli. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), penjualan kendaraan roda empat mengalami kenaikan menjadi 9.925 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7.703 unit, sehingga terjadi kenaikan sebesar 28,85% (yoy).

## Lapangan Usaha Konstruksi

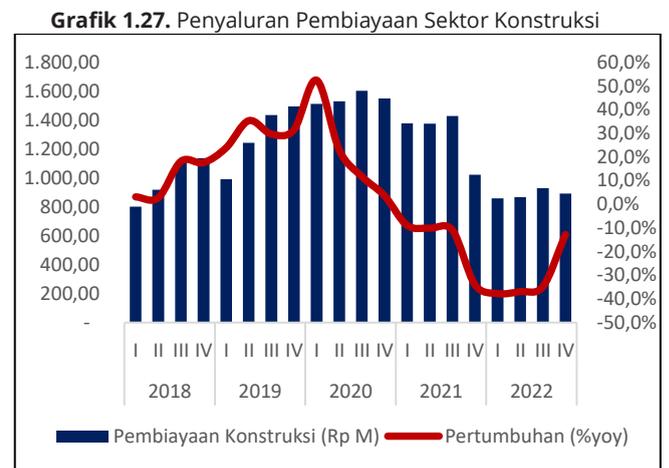
Secara umum pada triwulan IV 2022, kinerja lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 5,91% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -0,58% (yoy) (Grafik 1.26).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

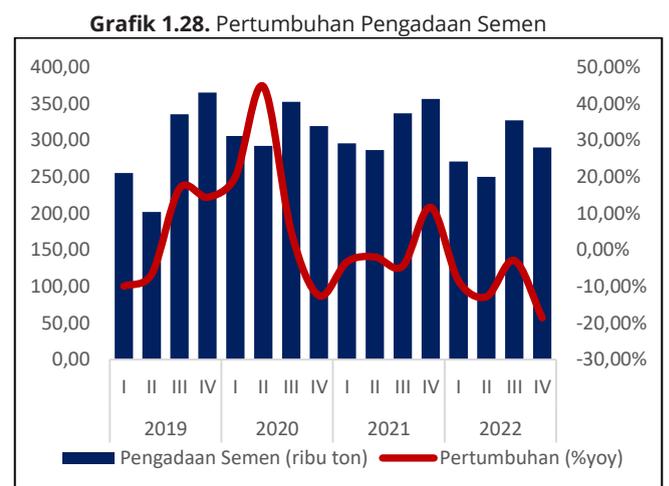
Kinerja yang membaik tersebut sejalan dengan data penyaluran pembiayaan sektoral. Pembiayaan pada LU Konstruksi mengalami pengurangan kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp891,96 miliar serta penurunan

kontraksi menjadi sebesar -12,76% (yoy) (Grafik 1.27). Lebih lanjut, kinerja yang lebih baik juga didukung oleh realisasi proyek pemerintah yang sudah cukup tinggi, sampai dengan triwulan IV belanja modal baru mencapai 96,61% dari Pagu Anggaran untuk APBN dan 43,41% dari Pagu Anggaran untuk APBD.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Di sisi lain, pertumbuhan LU Konstruksi masih terhambat yang diakibatkan oleh data realisasi pengadaan semen di Aceh. Pengadaan semen pada triwulan laporan hanya mencapai 290,02 ribu ton, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.28). Realisasi tersebut juga lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi sebesar -18,58% (yoy).



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Meskipun demikian, beberapa proses konstruksi telah menggunakan teknologi lebih baru dengan optimalisasi struktur-struktur besi, sehingga penggunaan semen lebih minim. Terlebih, pada

triwulan IV terdapat ketidakpastian cuaca yang lebih tinggi sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pengecoran yang membutuhkan waktu untuk mengering. Sehingga umumnya para kontraktor lebih mengejar pekerjaan pada proses konstruksi lainnya yang menggunakan semen lebih sedikit.

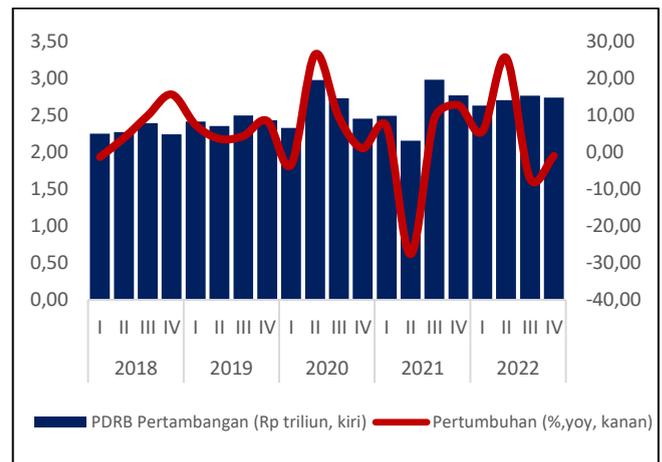
**Lapangan usaha konstruksi pada keseluruhan tahun 2022 terkontraksi sebesar 2,36% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,46% (yoy).** Meskipun pada triwulan IV 2022, LU konstruksi mampu tumbuh positif, namun dari triwulan I hingga triwulan III mencatatkan pertumbuhan negatif. Hal ini didorong oleh terhambatnya realisasi konstruksi proyek-proyek pemerintah akibat *refocusing* anggaran. Penurunan kinerja lapangan usaha konstruksi juga tercermin dari penurunan realisasi pengadaan semen sepanjang tahun 2021 menjadi 1,13 juta ton dari sebelumnya sebesar 1,26 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 10,8%.

## Lapangan Usaha Pertambangan

**Pada triwulan laporan, kinerja lapangan usaha pertambangan tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi cukup tinggi sebesar 7,15% (yoy) (Grafik 1.29).** Melalui pertumbuhan tersebut, lapangan usaha pertambangan memberikan andil faktor penahan pertumbuhan yang lebih kecil pada periode laporan yaitu sebesar -0,08% (yoy).

Penurunan kinerja di Sektor Pertambangan utamanya disebabkan oleh produksi batu bara yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan stok lama yang masih tersedia sehingga produksi baru dibatasi. Kondisi ini juga terkonfirmasi dari ekspor batu bara yang melambat pada triwulan laporan. Produksi batu bara secara tidak langsung tercermin dari nilai ekspor ke luar negeri. Nilai ekspor batu bara mengalami pertumbuhan sebesar -18,46% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.30).

**Grafik 1.29.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Grafik 1.30.** Perkembangan Ekspor Batu Bara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Selanjutnya, dari sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Pertambangan dan Penggalian masih mengalami pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, kredit mencapai Rp5,52 triliun atau tumbuh sebesar 40,90% (yoy) (Grafik 1.31).

**Grafik 1.31.** Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Kinerja lapangan usaha pertambangan pada keseluruhan tahun 2022 tumbuh sebesar 4,30% (yoy), berbalik arah dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,95% (yoy).** PT Medco EP Malaka yang pada tahun sebelumnya sempat *shutdown* selama sebulan dapat dimitigasi pada tahun ini sehingga beroperasi dengan lancar. Pertumbuhan pertambangan pada tahun 2022 terjadi paling tinggi pada triwulan II. Lebih lanjut, indikator kredit pertambangan juga mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 yang mendorong kinerja LU tersebut. Kredit pertambangan tumbuh 40,90% pada tahun 2022.

## Pesantren Melimpah, Modal Kuat Aceh Kembangkan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah di Aceh masih menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini mengingat peran masyarakat dalam industri halal masih relatif minim dan cenderung sebagai konsumen/pasar, bukan sebagai produsen. Salah satu sumber potensi besar yang masih tertidur adalah kekuatan ekonomi syariah berbasis Pesantren. Dengan jumlah sebaran Pesantren sebanyak 1.626 di seluruh Aceh dan jumlah santri yang mencapai 252.436 orang, Pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar meskipun hanya sirkulasi bisnis di dalam lingkungannya saja karena populasi penghuni dayah yang terdiri dari para santri, guru/ustad, serta pengurus dayah.

Pesantren atau dikenal dengan sebutan 'Dayah' merupakan institusi pendidikan yang telah melekat dengan masyarakat Aceh. Dayah berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Dayah menjadikannya memiliki reputasi sangat baik, sehingga berkedudukan sosial yang terpandang dan memiliki pengaruh yang besar bagi lingkungan masyarakat. Sejak awal didirikan, karakteristik Dayah ialah bersifat mandiri dari segala aspek. Dayah memiliki latar belakang yang tidak terikat kelompok atau politik manapun dan hanya berorientasi pada Pendidikan dan Dakwah saja. Selain itu, Dayah juga harus bersifat mandiri secara finansial sehingga seharusnya sumber keuangannya tidak bergantung pada sumbangan jenis apapun.

Mengingat perannya yang begitu penting, Aceh memiliki regulasi khusus untuk kesejahteraan Dayah dengan mendirikan Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang fokus pada pengembangan dan kompetensi Dayah. Namun begitu, potensi lain dari Dayah masih belum dioptimalkan yakni peningkatan produktivitas dan ekonomi Dayah. Kesadaran akan kemandirian ekonomi Dayah di Aceh masih rendah. Hal ini tercermin dari sebagian pengurus Dayah yang masih menganggap bahwa Dayah harus fokus melaksanakan tugasnya dalam Pendidikan dan dakwah. Padahal, dalam Undang-Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa fungsi utama Pesantren adalah sebagai Lembaga Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat. Fungsi pemberdayaan masyarakat di Dayah masih belum banyak digali, padahal fungsi ini dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya termasuk diantaranya adalah memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pesantren itu sendiri.

Idealnya, Dayah memang harus fokus pada fungsi pokoknya sebagai Lembaga Dakwah dan Pendidikan. Jika kedua fungsi tersebut telah optimal, maka Dayah dapat menjalankan fungsi ketiga yakni sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta dalam melaksanakan tugas ketiga ini harus dipastikan tidak mengganggu kedua fungsi utama lainnya. Sebaliknya, ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagi Dayah tersebut untuk memberdayakan masyarakat sementara mereka sendiri belum mampu berdaya dan mandiri sebagai sebuah lembaga.

Kendala lainnya dalam pengembangan kemandirian ekonomi Dayah adalah kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dayah tersebut masih terbatas dan belum kompeten untuk mengelola sebuah usaha. Umumnya, pengurus Dayah adalah murni tenaga pendidik atau santri alumni dari Dayah itu sendiri sehingga tidak memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam mengembangkan sebuah usaha.

Sebaran Dayah di seluruh Aceh menjadikan tiap Dayah memiliki karakter dan potensi ekonomi yang berbeda, sebagian dari mereka didukung oleh kekayaan alam dan lingkungan untuk menjalankan usaha pertanian holtikultura, perikanan, peternakan, maupun mengolah hasil

pertanian. Sementara sebagian lainnya memiliki posisi yang strategis untuk mengembangkan usaha perdagangan, logistik, maupun menjalankan usaha kerajinan tangan. Namun sayangnya, belum tersedia data yang memetakan potensi usaha setiap Dayah di Aceh. Bahkan data pokok yang berisi unit usaha yang dijalankan oleh setiap Dayah juga masih belum dapat ditemukan. Padahal, keberadaan data-data tersebut sangat penting agar setiap Dayah dapat melakukan transaksi dan mendukung usaha satu dan lainnya. Melalui keberadaan data tersebut mereka dapat menghubungkan unit usahanya, misal sebuah Dayah di Kabupaten Bireun yang memiliki potensi pengelolaan padi dan beras dapat menjalin kerja sama dengan Dayah di Kabupaten Bener Meriah yang memiliki potensi pertanian hortikultura. Selain itu, masing-masing Dayah juga dapat menjadi penopang unit usaha Dayah lainnya, contohnya jika antar Dayah di Aceh Tengah yang memiliki kesamaan potensi untuk mengelola pertanian kopi dengan Dayah lainnya yang memiliki unit usaha yang sama, mereka dapat mengekspor hasil pertanian tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Penguatan inilah yang dapat menjadi potensi utama pengembangan kemandirian ekonomi di Dayah.

Keberadaan Dayah yang tersebar diseluruh daerah di Aceh juga dapat menjadi penguat ekonomi dan keuangan Islam yang dikembangkan di Aceh. Dayah dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk melaksanakan ekonomi yang beretika sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, keberadaan Dayah di Aceh juga harus menjadi pendorong pengembangan industri halal. Dayah dapat menjadi *trace agent* yang mengawasi kehalalan proses dan produk yang beredar di masyarakat.

Pada hakikatnya, Dayah dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang paling esensial karena memiliki reputasi dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Namun, untuk dapat mengambil peran tersebut, seluruh potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh Dayah di Aceh harus dapat dioptimalkan melalui sinergi dan kolaborasi sehingga pada akhirnya menjadikan Dayah sebagai motor ekonomi syariah di Aceh.

--000--



## **BAB II**

# **PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH**

Kinerja keuangan daerah sampai dengan triwulan IV 2022 secara umum mengalami akselerasi, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBD. Di sisi lain, realisasi belanja dan pendapatan APBN juga mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase.

## 2.1. Gambaran umum

**Realisasi belanja dan pendapatan pemerintah di wilayah Provinsi Aceh sampai dengan triwulan IV 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.** Realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh yang terdiri dari belanja pusat, belanja pemerintah Provinsi dan belanja Kabupaten/Kota (APBN + APBD) mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, total belanja mencapai Rp52,46 triliun atau setara dengan 87,42% dari pagu agregat belanja tahun 2022. Kenaikan utamanya disumbangkan oleh realisasi APBA dengan dengan nilai Rp37,71 triliun atau realisasi sebesar 84,22% (lebih tinggi dibanding triwulan IV 2021 dengan selisih sebesar Rp2,15 triliun).

Pada sisi realisasi agregat pendapatan pemerintah (APBN + APBD) mengalami kenaikan baik dalam persentase maupun nominal realisasi. Secara persentase, realisasi pendapatan pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 99,57% dari pagu agregat pendapatan 2022, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai realisasi 91,40% dari pagu pendapatan 2021. Secara nominal realisasi pendapatan, terdapat kenaikan hingga Rp1,44 triliun pada periode laporan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat merupakan jenis pendapatan dengan *share* terbesar dari total realisasi pendapatan APBD di lingkup Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 86,02 persen. Persentase penyaluran pendapatan transfer sampai dengan triwulan IV 2022 tercatat sebesar 96,12 persen dari pagu tahun 2022.

## 2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

**Nilai pagu belanja pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh pada tahun 2022 berada pada nilai Rp44,77 triliun**

**dengan pertumbuhan realisasi sebesar -0,04% (yoy).**

Secara umum, pagu APBD baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada pagu belanja menurun pada tahun ini. Namun, terjadi peningkatan pagu pada belanja pegawai.

**Tabel 2. 1.** Realisasi Belanja APBD (APBA+APBK) Triwulan IV 2022

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TW-IV 2022	
 Belanja Barang & Jasa	95,50%
Belanja Modal	43,41%
Belanja Tidak terduga	9,38%
Belanja Pegawai	90,72%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah melalui alokasi APBA dan APBK hingga triwulan IV 2022 mencapai Rp29,08 triliun, atau sebesar 82,17% dari total pagu belanja (Rp44,78 triliun), realisasi tumbuh 6,62% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.** Capaian Belanja Pemerintah Daerah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja di triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar 73,90% dari pagu belanja 2021 dengan nominal realisasi belanja sebesar Rp27,28 triliun. Hampir seluruh komponen belanja pemerintah rata-rata mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Belanja Daerah pada triwulan IV 2022 umumnya didukung oleh Belanja Operasi dengan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai sebesar Rp12,05 triliun dengan realisasi terhadap Pagu sebesar 90,72% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11,52 triliun dengan realisasi terhadap pagu sebesar 95,50%. Secara *year on year* Belanja Pegawai meningkat sebesar 22,06% sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar 23,87%. Namun, Belanja modal tercatat memiliki realisasi sebesar 43,41% yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -48,46% secara *year on year*. Belanja Modal merupakan jenis belanja yang memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian. Sehingga, pertumbuhan kearah positif diharapkan dapat mendukung perekonomian Aceh.

**Tabel 2. 2.** Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan IV 2022.

REALISASI BELANJA TRANSFER TW-IV 2022		
	Belanja Bantuan Keuangan	91,14%
	Belanja Bagi Hasil	100,90%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Realisasi belanja transfer mengalami peningkatan dibanding triwulan IV 2021 dengan nominal Rp8,62 triliun atau 91,97% dari pagu.**

Komponen belanja transfer terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil. Pada triwulan laporan, realisasi Belanja Bantuan Keuangan tercatat mencapai Rp7,82 triliun atau sebesar 91,14% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2022, meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang terealisasi 85,43% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2021. Sementara itu, Belanja Bagi Hasil pada triwulan IV 2022 terealisasi sebesar 100,90% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 dengan realisasi sebesar 87,59%.

**Grafik 2. 1.** Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Realisasi Pendapatan Daerah terhadap target pendapatan terakselerasi secara persentase maupun nominal pada triwulan IV 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.** Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan IV 2022 mencapai 96,17% dari pagu Pendapatan Daerah 2022, meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang terealisasi 90,62% dari pagu pendapatan 2021. Secara nominal, realisasi mencapai Rp39,59 triliun atau

terdapat kenaikan sebesar Rp0,21 triliun (secara *year-on-year* naik 0,54%). Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 86,02% dari total realisasi pendapatan pada periode laporan atau sebesar Rp34,05 triliun. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp5,24 triliun pada triwulan IV 2022 hanya menyumbang 13,26% dari total realisasi pendapatan. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada Grafik 2.1. menunjukkan perbaikan pada kurun waktu 2016-2020 dengan semakin meningkatnya DDF, namun pada 2021 terdapat penurunan. Sementara demikian, hasil sementara pada triwulan IV 2022 kembali menunjukkan kenaikan DDF meskipun terjadi kenaikan realisasi pajak daerah. Kenaikan DDF disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pendapatan transfer yang mengindikasikan lebih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Aceh terhadap Pemerintah Pusat.

**Tabel 2. 3.** Realisasi Pendapatan APBD (APBA + APBK) se- Provinsi Aceh Triwulan IV 2022

REALISASI PENDAPATAN APBD TW-IV 2022		
	Pendapatan Asli Daerah	94,42%
	Pendapatan Transfer	96,12%
	Lain-Lain	161,99%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Pada triwulan IV 2022, tercatat kenaikan realisasi total Pendapatan yang ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Secara nominal, terdapat kenaikan realisasi pendapatan sebesar Rp0,21 triliun pada periode laporan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi terutama didorong oleh kenaikan PAD. Pada triwulan laporan, pemerintah provinsi membukukan PAD sebesar Rp5,24 triliun, atau meningkat 18,53% dari realisasi PAD periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,42 triliun. Sementara nominal realisasi Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain pada triwulan IV 2022 masing-masing sebesar Rp34,05 triliun dan Rp0,28 triliun,

mengalami penurunan sebesar -1,62% dan -13,60% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara persentase, realisasi PAD mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 82,33% dari pagu Pendapatan pada triwulan IV 2021, menjadi sebesar 94,42% dari pagu Pendapatan pada triwulan IV 2022. Peningkatan persentase realisasi pada periode laporan juga terjadi pada Pendapatan Transfer yang tercatat sebesar 96,12% dan Pendapatan Lain-lain sebesar 161,99%.

## 2.3. Belanja Pemerintah Pusat

**Pada triwulan IV 2022, realisasi belanja APBN secara persentase mengalami peningkatan meskipun secara nominal mengalami sedikit kontraksi. Sedangkan sisi pendapatan APBN meningkat secara persentase dan nominal pada triwulan laporan.** Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar 99,17% dari pagu Belanja Negara 2022 (secara nominal total pagu Rp48,00 triliun) meningkat dibanding triwulan IV 2021 yang terealisasi sebesar 98,98% dari pagu belanjanya (Rp48,47 triliun secara nominal). Realisasi pendapatan APBN hingga periode laporan tercatat secara persentase sebesar 125,25% dari pagu pendapatan APBN (secara nominal Rp5,45 triliun) atau lebih tinggi dari persentase realisasi pada triwulan IV 2021 yang sebesar 97,30% dari pagu pendapatan APBN 2021 (secara nominal Rp5,75 triliun).

**Tabel 2. 4.** Realisasi Belanja APBN di Aceh Pada Triwulan IV 2022

REALISASI BELANJA APBN TW-IV 2022		
	Belanja Pusat	96,80%
	Transfer	100,28%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (69,01% dari total Belanja APBN di Provinsi Aceh) mengalami kenaikan secara persentase namun sedikit terkontraksi secara nominal.** Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 100,28% dari pagu Transfer ke

Daerah 2022 (secara nominal Rp32,76 triliun) atau tumbuh negatif sebesar -2,98% (yoy) dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 99,28% dari pagu Transfer ke Daerah 2021 (secara nominal Rp34,11 triliun). Peningkatan realisasi tertinggi terjadi pada dana bagi hasil 19,19% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

**Tabel 2. 5.** Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2022

REALISASI PENDAPATAN APBN TW-IV 2022		
	Pajak	122,17%
	PNBP	140,44%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Penerimaan Pajak, yang memiliki share sebesar 81,11% dari total Pendapatan Negara di Provinsi Aceh, mengalami peningkatan realisasi baik secara persentase maupun nominal.** Secara persentase, Penerimaan Pajak pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 122,17% dari pagu Penerimaan Pajak 2022 (secara nominal Rp4,53 triliun), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 90,80% dari pagu Penerimaan Pajak 2021 (secara nominal Rp4,92 triliun).

Peningkatan Penerimaan Pajak secara nominal disumbang baik oleh Pajak Dalam Negeri maupun Pajak Perdagangan Internasional. Pada komponen Pajak Dalam Negeri, PPh Non Migas menjadi kontributor terbesar (55,72%) dengan total realisasi sebesar 39,74% dengan total realisasi Rp2,16 triliun. Sementara pada komponen Pajak Perdagangan Internasional pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp69,49 miliar, terdiri dari pendapatan Bea Keluar yang menyumbang sebesar 78,14 persen dan Bea Masuk yang menyumbang sebesar 21,86 persen dari total pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

**Tabel 2. 6.** Data Realisasi APBA & APBK Provinsi Aceh Triwulan IV 2022

APBA & APBK PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan IV (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan IV (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>PENDAPATAN</b>	43.454,06	41.166,54	39.377,67	39.591,48	90,62%	96,17%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.378,32	5.558,03	4.427,77	5.248,07	82,33%	94,42%
Transfer Pemerintah Pusat	37.320,51	35.430,81	34.616,72	34.055,55	92,76%	96,12%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	755,23	177,7	333,19	287,86	44,12%	161,99%
<b>BELANJA</b>	46.584,47	44.778,50	35.558,84	37.713,68	76,33%	84,22%
Belanja Daerah	36.918,75	35.399,99	27.282,64	29.088,46	73,90%	82,17%
Transfer	9.665,72	9.378,51	8.276,20	8.625,22	85,62%	91,97%
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-3.130,41	-3.611,96	3.818,82	1.877,80	-121,99%	-51,99%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh

**Tabel 2. 7.** Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan IV 2022

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan IV (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan IV (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>PENDAPATAN</b>	5.753,74	5.450,13	5.598,24	6.826,41	97,30%	125,25%
Pajak	4.926,44	4.531,80	4.472,98	5.536,67	90,80%	122,17%
PNBP	827,30	918,33	1.125,26	1.289,74	136,02%	140,44%
<b>BELANJA</b>	48.471,83	48.003,98	47.976,92	47.606,59	98,98%	99,17%
Belanja Pusat	19.197,84	14.812,44	6.254,79	5.981,07	32,58%	40,38%
Transfer ke Daerah	34.110,41	32.763,64	33.864,49	32.854,28	99,28%	100,28%
<b>SURPLUS/DEFISIT APBN</b>	-42.706,60	-41.585,66	-18.852,63	-18.682,38	44,14%	44,93%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh



## BAB III

# PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

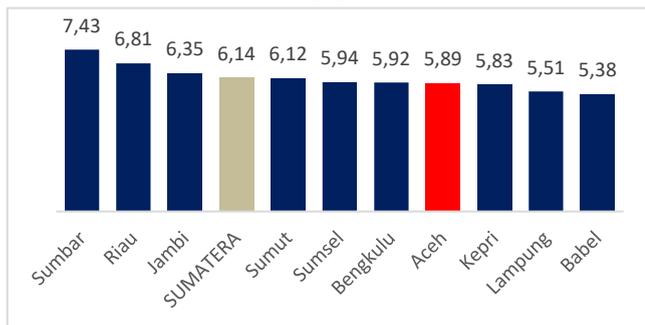
Pada triwulan IV 2022, Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh lebih terkendali dibanding triwulan sebelumnya yang didorong oleh terkendalnya inflasi kelompok makanan. Secara *full year*, Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding 2021 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 2,24% (yoy). Lebih lanjut pada triwulan I 2023, laju Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan di Provinsi Aceh. Kendati demikian, terdapat potensi kenaikan biaya yang dapat mendorong kenaikan harga, salah satunya bersumber dari peningkatan ekspektasi pedagang seiring potensi naiknya harga beli di tengah peningkatan UMP Aceh pada awal tahun 2023.

### 3.1. Perkembangan Umum Inflasi

**Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 5,89% (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,38% (yoy).**

Angka inflasi tersebut tercatat lebih rendah dari inflasi Gabungan Kota IHK di Sumatera (6,14%, yoy), namun lebih tinggi dibanding inflasi Nasional (5,51%, yoy). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, realisasi inflasi tersebut menempatkan Provinsi Aceh sebagai daerah inflasi terendah keempat di Sumatera. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan inflasi tertinggi di Sumatera pada triwulan IV 2022.

**Grafik 3.1.** Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2022 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

### 3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

**Tabel 3.1.** Inflasi Kelompok Barang

Kelompok Barang dan Jasa	Tw III 2022		Tw IV 2022	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	7,93	2,45	4,59	1,45
Pakaian dan Alas Kaki	2,55	0,18	2,72	0,20
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	5,81	1,05	5,45	1,00
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	4,42	0,19	4,26	0,19
Kesehatan	2,71	0,05	3,20	0,07
Transportasi	21,00	2,80	16,89	2,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,39	-0,01	-0,44	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,77	0,00	2,22	0,03
Pendidikan	0,57	0,01	0,42	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	6,41	0,55	6,50	0,56
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,99	0,33	5,56	0,38
<b>Inflasi Umum</b>	<b>7,38</b>		<b>5,89</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2022, laju inflasi Aceh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi pada triwulan IV 2022 utamanya didorong oleh kelompok transportasi dengan andil 2,03% dan tingkat inflasi 16,89%. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,45% dan tingkat inflasi 4,59%.

### Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

**Tabel 3.2.** Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 5,89% (yoy)		ANDIL 1,45%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Beras	0,36	Minyak Goreng	-0,29
Rokok Kretek Filter	0,25	Ikan Tongkol	-0,13
Udang Basah	0,14	Ikan Tuna	-0,12
Ikan Kembang	0,13	Cumi-cumi	-0,03
Telur Ayam Ras	0,12	Ikan Teri	-0,03

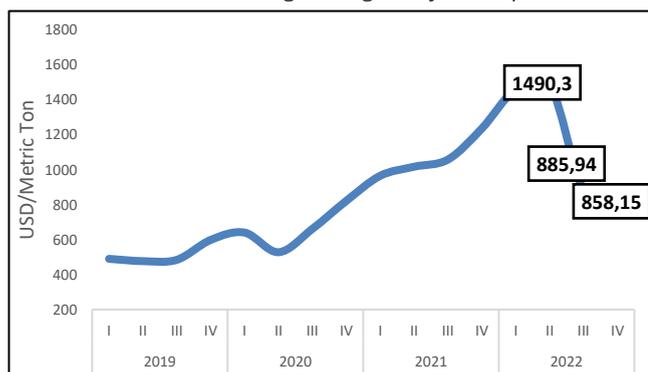
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode laporan tercatat mengalami inflasi 4,59% (yoy) dengan andil sebesar 1,45%.** Inflasi yang terjadi didorong oleh subkelompok tembakau yang mengalami inflasi sebesar 7,71% (yoy). Komoditas utama yang menyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain beras, rokok kretek filter, udang basah, ikan kembang, dan telur ayam ras. Harga beras yang masih cukup tinggi pada triwulan IV menjadi penyumbang inflasi terbesar dari kelompok ini. Hal ini disinyalir akibat bencana banjir yang kerap terjadi pada triwulan IV 2022 sehingga berdampak gagal panen untuk komoditas beras. Selain itu, komoditas yang memiliki andil yoy yang tinggi adalah rokok kretek filter dikarenakan terdapat kenaikan cukai rokok sebesar 10% di awal tahun 2022. Pengenaan cukai rokok ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokok di kelompok masyarakat miskin yang mencapai 11,6 hingga 12,2 persen dari pengeluaran rumah tangga.

Lebih lanjut, komoditas deflasi disumbang oleh minyak goreng, ikan tongkol, ikan tuna, cumi-cumi,

dan ikan teri. Harga minyak goreng pada triwulan IV lebih stabil bahkan cenderung lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia atau minyak kelapa sawit yang menunjukkan penurunan. Pada grafik 3.2 ditampilkan rata-rata harga minyak kelapa sawit secara triwulanan. Pada triwulan IV 2022, harga minyak kelapa sawit berada pada level USD 858,15/metric ton. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level USD 885,94/metric ton dan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada level USD 1.235,53/metric ton. Harga minyak goreng dalam negeri juga telah dapat ditekan dengan diberlakukannya *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) pada 31 Mei 2022.

**Grafik 3.2.** Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit



Sumber: Bloomberg, diolah

Selanjutnya, inflasi juga ditahan oleh komoditas ikan tongkol, ikan tuna, cumi cumi, dan ikan teri. Penurunan harga pada komoditas perikanan disebabkan oleh pasokan yang mencukupi dari nelayan sehingga menurunkan harga. Kondisi cuaca yang mendukung nelayan melaut juga membantu menurunkan harga komoditas perikanan. Meskipun demikian, tidak seluruh komoditas ikan menyumbang deflasi pada periode laporan.

## Kel. Pakaian dan Alas Kaki

**Tabel 3.3.** Inflasi Kel, Pakaian dan Alas Kaki

<b>INFLASI 2,72% (yoy)</b>		<b>ANDIL 0,20%</b>	
<b>PENYUMBANG INFLASI</b>		<b>PENYUMBANG DEFLASI</b>	
<b>KOMODITAS</b>	<b>ANDIL (%)</b>	<b>KOMODITAS</b>	<b>ANDIL (%)</b>

Celana Panjang Jeans Pria	0,03	-	-
Sandal Anak	0,02	-	-
Ongkos Jahit	0,01	-	-
Celana Panjang Katun Pria	0,01	-	-
Sepatu Anak	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Pada triwulan IV 2022, inflasi kelompok pakaian dan alas kaki di Aceh tercatat sebesar 2,72% (yoy) dengan andil 0,20%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,18%, yoy).** Tekanan inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh sub kelompok pakaian yang mengalami inflasi sebesar 2,59% (yoy) dan subkelompok alas kaki yang mengalami inflasi sebesar 3,47% (yoy).

Barang-barang penyumbang inflasi pada sub kelompok ini antara lain celana panjang jeans pria, sandal anak, ongkos jahit, celana Panjang katun pria, dan sepatu anak. Peningkatan harga produk pakaian tersebut terjadi seiring dengan terjadinya kenaikan BBM yang turut memberikan pengaruh terhadap harga komoditas pakaian. Kenaikan harga juga didukung oleh mulai berakhirnya masa pandemi Covid-19 yang meningkatkan mobilitas masyarakat.

## Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

**Secara tahunan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 5,45% (yoy) dengan andil sebesar 1,00%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (1,05%, yoy).** Inflasi pada kelompok ini secara tahunan terutama didorong oleh subkelompok listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 10,68% (yoy). Secara lebih detail, barang/jasa pemberi andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, cat tembok, semen, dan tarif listrik.

**Tabel 3.4.** Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

<b>INFLASI 5,45% (yoy)</b>	<b>ANDIL 1,00%</b>
----------------------------	--------------------

PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,50	-	-
Sewa Rumah	0,35	-	-
Cat Tembok	0,03	-	-
Semen	0,03	-	-
Tarif Listrik	0,02	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang andil tertinggi dalam kelompok setelah pemerintah menaikkan harga elpiji sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2022. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya harga gas alam dunia yang masih mengalami kenaikan hingga saat ini.

Selanjutnya penyumbang inflasi kedua terbesar adalah sewa rumah. Tarif sewa rumah mengalami peningkatan dikarenakan sudah meredanya Covid-19 sehingga anjuran kuliah dan kerja secara digital perlahan mulai tergantikan dengan pertemuan fisik.

Peningkatan harga barang konstruksi seperti cat tembok dan semen terjadi seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Aceh. Selain itu, peningkatan harga semen juga didorong oleh kenaikan harga batubara yang digunakan sebagai input pada produksi semen. Sehingga, biaya dalam memproduksi semen meningkat dan turut menaikkan harga jual.

Tarif listrik juga mengalami penyesuaian harga pada Triwulan IV untuk golongan rumah tangga dengan daya 3.500 VA keatas dan golongan pemerintah. Kenaikan dipatok 17,63% dan menjadikan tarif listrik menjadi Rp 1.699,53 per kWh.

## Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

**Tabel 3.5.** Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 4,26% (yoy)		ANDIL 0,19%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,50	-	-
Sewa Rumah	0,35	-	-
Cat Tembok	0,03	-	-
Semen	0,03	-	-
Tarif Listrik	0,02	-	-

Kulkas/Lemari Es	0.03	-	-
Pembasmi Nyamuk Spray	0.02	-	-
Sabun Deterjen Bubuk/Cair	0.02	-	-
Lemari Pakaian	0.01	-	-
Meja Kursi Makan	0.01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Pada triwulan IV 2022, inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga di Aceh tercatat sebesar 4,26% (yoy) dengan andil terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,19%, sama dengan periode sebelumnya (0,19%, yoy).** Inflasi pada kelompok ini secara tahunan terutama didorong oleh subkelompok barang dan layanan pemeliharaan rumah tangga rutin dengan inflasi sebesar 4,79% (yoy). Secara lebih detail, barang atau komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah kulkas/lemari es (andil 0,03%), pembasmi nyamuk *spray* (andil 0,02%), sabun deterjen bubuk/cair (andil 0,02%), lemari pakaian (andil 0,01%) dan meja kursi makan (andil 0,01%).

## Kel. Kesehatan

**Tabel 3.6.** Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 3,20% (yoy)		ANDIL 0,07%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Obat Dengan Resep	0.03	-	-
Tarif Rumah Sakit	0.01	-	-
Tarif Dokter Spesialis	0.01	-	-
Vitamin	0.01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Pada triwulan IV 2022, inflasi kelompok kesehatan tercatat sebesar 3,20% (yoy) dengan andil untuk inflasi keseluruhan sebesar 0,07%, meningkat dibanding periode sebelumnya (0,05%, yoy).** Tekanan inflasi pada triwulan laporan disebabkan oleh subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 4,61% (yoy). Secara lebih detail, komoditas penyumbang inflasi terbesar kelompok ini adalah

obat dengan resep (andil 0,03%), tarif rumah sakit (andil 0,01%), tarif dokter spesialis (andil 0,01%) dan vitamin (andil 0,01%). Harga obat-obatan tertentu mengalami kenaikan akibat melemahnya nilai tukar rupiah yang memberikan pengaruh terhadap harga industri farmasi yang 90% bahan bakunya diimpor dari luar negeri.

## Kel. Transportasi

**Tabel 3.7.** Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 16,89% (yoy)		ANDIL 2,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bensin	1,10	-	-
Angkutan Udara	0,45	-	-
Angkutan antar Kota	0,09	-	-
Sepeda Motor	0,09	-	-
Mobil	0,08	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok transportasi pada triwulan IV 2022 mengalami inflasi sebesar 16,89% (yoy) dengan andil 2,03% terhadap inflasi secara keseluruhan, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (2,80%, yoy). Inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh subkelompok jasa angkutan penumpang yang mengalami inflasi sebesar 29,61% (yoy). Inflasi subkelompok jasa angkutan penumpang juga didukung oleh kenaikan harga BBM yang efektif berlaku pada 3 September 2022. Peningkatan bensin pada September 2022 memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan harga angkutan antar kota yang juga menjadi komoditas inflatoir dari kelompok ini.

Pada triwulan IV 2022, jumlah penumpang yang tercatat di bandar udara SIM mencapai 147.980 orang atau mengalami peningkatan sebesar 51,86% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 97.558 orang. Kenaikan tersebut turut menunjang kenaikan harga tiket pesawat udara pada periode tersebut. Meskipun demikian, jumlah rute yang ditawarkan sudah mulai bervariasi.

Lebih lanjut, alat transportasi pribadi juga

mengalami inflasi pada sepeda motor dan mobil dengan andil masing-masing sebesar 0,09% (yoy) dan 0,08% (yoy). Harga kendaraan bermotor dapat dikatakan mengalami kenaikan secara rutin tiap tahunnya. Kenaikan dapat disebabkan karena adanya penambahan spek dan *features*, kenaikan Bea Balik Nama (BBN) setiap tahunnya, faktor kenaikan biaya produksi, dan penyesuaian kurs. Lebih lanjut, kenaikan harga kendaraan juga ditunjang oleh kelangkaan *chip* semikonduktor yang tengah berlangsung di seluruh dunia. Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), penjualan kendaraan baru seperti sepeda motor dan mobil di Aceh masih tinggi. Pada tahun Triwulan IV 2022, total penjualan kendaraan bermotor mencapai 29.158 unit.

## Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara tahunan pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,44 (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan adalah sebesar -0,02%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (-0,01%, yoy).

**Tabel 3.8.** Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI -0,44% (yoy)		ANDIL -0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
-	-	Biaya Administrasi Transfer Uang	-0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan deflasi yang terjadi tersebut disebabkan oleh komoditas biaya administrasi transfer uang dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Sedangkan, tidak ada komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini. Deflasi pada biaya administrasi transfer uang disebabkan oleh telah berjalannya layanan BI-FAST pada beberapa bank yang sudah dapat dinikmati masyarakat. BI-FAST menyediakan layanan transfer uang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan Transfer *Online*, SKN maupun RTGS.

## Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Pada triwulan IV 2022, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya secara tahunan tercatat sebesar 2,22% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan sebesar 0,03%. Lebih tinggi dibanding dengan periode sebelumnya (0,01%, yoy). Inflasi yang terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memiliki andil inflasi yang relatif kecil. Barang yang mengalami kenaikan harga yaitu buku tulis bergaris dan pulpen dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02% (yoy) dan 0,01% (yoy).

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 2,22% (yoy)		ANDIL 0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Buku Tulis	0,02	-	-
Pulpen	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Pendidikan

Inflasi kelompok pendidikan secara tahunan pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 0,42% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan adalah sebesar 0,01%, sama dengan triwulan sebelumnya (0,01%). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok pendidikan lainnya yang mengalami inflasi sebesar 2,68% (yoy). Kenaikan biaya terjadi pada bimbingan belajar dan kursus bahasa asing dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 0,42% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bimbingan Belajar	0,01	-	-
Kursus Bahasa Asing	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara umum, kenaikan biaya pendidikan terjadi setiap tahunnya. Kenaikan rata-rata biaya pendidikan di Indonesia sebesar 10%-15% per tahun untuk keperluan operasional, pengembangan, dan lain-lain.

## Kel. Penyedia Makanan dan

## Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 6,50% (yoy)		ANDIL 0,56%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Mie	0,09	-	-
Ketupat/Lontong Sayur	0,09	-	-
Nasi dengan Lauk	0,08	-	-
Bakso Siap Santap	0,07	-	-
Kopi Siap Saji	0,05	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada periode laporan tercatat mengalami inflasi sebesar 6,50% (yoy) dengan andil sebesar 0,56% terhadap inflasi secara keseluruhan, sedikit lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,55%, yoy). Inflasi terjadi pada subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang memberikan andil sebesar 0,56% (yoy). Kenaikan terjadi pada mie, ketupat/lontong sayur, nasi dengan lauk, bakso siap santap, dan kopi siap saji. Peningkatan harga pada produk makanan olahan tersebut sejalan dengan peningkatan inflasi kelompok bahan makanan yang salah satunya diakibatkan oleh penyesuaian harga pasca kenaikan BBM.

## Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 5,56% (yoy)		ANDIL 0,38%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,10	-	-
Sabun Mandi	0,05	-	-
Pasta Gigi	0,04	-	-
Shampo	0,04	-	-
Pembalut Wanita	0,02	-	-

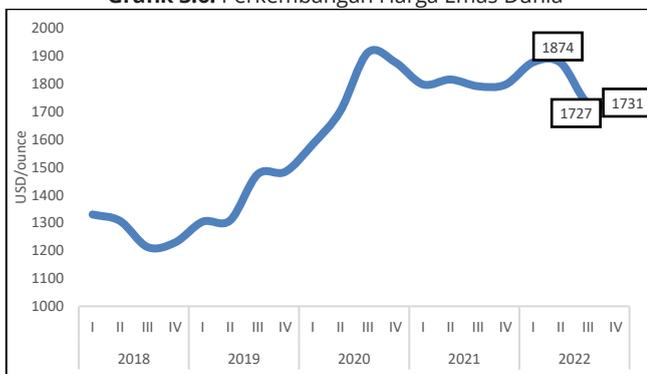
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2022, kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya secara tahunan mengalami inflasi sebesar 5,56% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan sebesar 0,38%. Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok perawatan pribadi dengan inflasi sebesar 6,53% (yoy).

Komoditas yang menyebabkan inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan (andil 0,10%), sabun mandi (andil 0,05%), pasta gigi (andil 0,04%), shampo (andil 0,04%), dan pembalut wanita (andil 0,02%). Kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh nilai tukar Rupiah yang melemah pada triwulan IV. Namun, hal ini juga didukung oleh *base effect* dimana harga emas cenderung berada pada posisi stagnan pada tahun 2022.

**Grafik 3.6.** Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, diolah

Harga emas dunia menunjukkan peningkatan dibanding triwulan III 2022, seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, harga emas dunia saat ini telah berada di posisi yang lebih rendah. Namun, belum mencapai level sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Data *Bloomberg* memperlihatkan rata-rata harga emas dunia (Grafik 3.6) pada triwulan IV berada pada level USD1.731/ounce. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada periode sebelumnya (USD1.727/ounce) dan lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2021 pada USD1.796/ounce.

### 3.3. Tracking Inflasi Triwulan I 2023

**Secara month-to-month pada bulan Januari 2023**

di Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 0,68% (mtm) sedangkan secara tahunan mengalami inflasi 5,52% (yoy). Angka inflasi Aceh pada bulan laporan (0,68%, mtm) tercatat terdeselerasi setelah pada bulan sebelumnya tercatat lebih tinggi (0,93%, mtm). Secara tahunan, inflasi pada Januari 2023 tercatat sebesar 5,52%, lebih tinggi dibandingkan pada Januari 2022 yang berada pada angka 2,49% (yoy). Secara *year-to-date*, inflasi di Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh pada Januari 2023 berada pada laju 0,68%. Secara bulanan, faktor pendorong utama inflasi di Aceh pada periode laporan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih detailnya, secara bulanan faktor pendorong utama inflasi di Aceh pada periode laporan berasal dari komoditas beras (0,11%), ikan tuna (0,06%), emas perhiasan (0,06%), minyak goreng (0,04%), dan pir (0,03%).

**Pada bulan Februari 2023, secara bulanan kota gabungan IHK di Provinsi Aceh diperkirakan akan mengalami deflasi secara mtm.** Diperkirakan akan terjadi deflasi berdasarkan hasil pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang menunjukkan penurunan harga untuk beberapa komoditas. Kondisi cuaca pada awal bulan Februari 2023 memiliki potensi cuaca yang cenderung normal dengan intensitas hujan lebih rendah dibanding tahun 2022. Lebih lanjut, risiko banjir di Provinsi Aceh tergolong rendah.

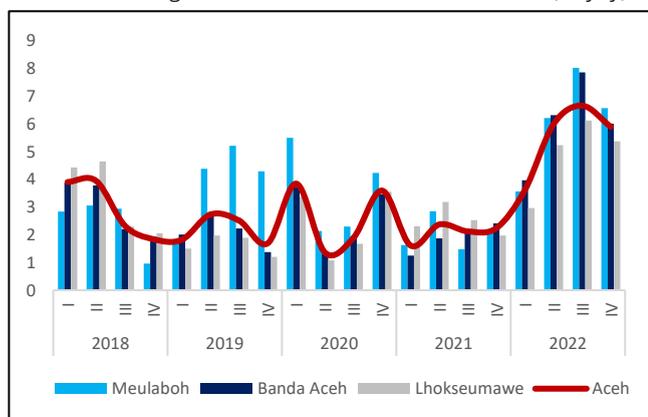
**Secara full year, pada triwulan I 2023, laju inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh diperkirakan akan melambat dibandingkan periode sebelumnya.** Hal ini sejalan dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan oleh TPID di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh. Kendati demikian, terdapat potensi kenaikan biaya yang dapat mendorong kenaikan harga, salah satunya bersumber dari peningkatan ekspektasi pedagang seiring potensi naiknya harga beli di tengah peningkatan UMP Aceh pada awal tahun 2023.

### 3.4. Inflasi Spasial

Apabila dilihat secara spasial, pada Januari 2023 inflasi terjadi di seluruh kota pantauan di Provinsi Aceh. Secara tahunan, Kota Meulaboh menjadi kota yang mengalami inflasi paling tinggi, yakni 6,3% (yoy), diikuti kota Banda Aceh (5,58%, yoy) dan kota Lhokseumawe (4,98%, yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara bulanan terjadi inflasi di 3 Kota pantauan IHK dimana kota dengan inflasi paling tinggi yaitu Kota Meulaboh dengan inflasi sebesar 0,76% (mtm), diikuti Kota Lhokseumawe dan kota Banda Aceh dengan laju inflasi masing-masing 0,75% (mtm) dan 0,61% (mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan pada bulan Januari di Meulaboh adalah beras (0,20%), emas perhiasan (0,09%), ikan dencis (0,08%), minyak goreng (0,07%), dan ikan tuna (0,06%). Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi adalah cabai merah (-0,09%), ikan kembung (-0,06%), bensin (-0,05%), daging ayam ras (-0,02%), kangkung (-0,02%) dan jeruk (-0,02%).

Grafik 3.7. Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh (% yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, penyumbang inflasi bulanan di Kota Banda Aceh adalah beras (0,06%), cabai merah (0,06%), emas perhiasan (0,06%), bawang merah (0,05%), dan ikan tuna (0,04%). Sementara komoditas penyumbang deflasi di Banda Aceh pada Januari 2023 adalah bensin (-0,08%), jeruk (-0,04%), daging ayam ras (-0,04%), celana Panjang jeans anak (-0,02%), dan ikan kembung (-0,01%). Selanjutnya, penyumbang inflasi bulanan di Kota Lhokseumawe adalah beras (0,18%), mie (0,09%), ikan tuna (0,09%), sewa rumah (0,07%), dan ikan

bandeng (0,06%). Sementara komoditas penyumbang deflasi di Lhokseumawe pada Januari 2023 adalah udang basah (-0,08%), ikan tongkol (-0,06%), bensin (-0,06%), jeruk (-0,05%), dan bawang merah (-0,03%).

**Inflasi Aceh pada triwulan I 2023 diperkirakan lebih terkendali dibandingkan dengan periode sebelumnya.** Hal tersebut diperkirakan turut dipengaruhi oleh gencarnya program GNPIP yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan koordinasi serta sinergi antar anggota TPID Provinsi Aceh yang intens dilakukan.

### 3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh akan terus berupaya melakukan pengendalian harga, melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam *High level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) triwulan I 2022, telah disepakati beberapa program kerja yang akan menjadi fokus pengendalian inflasi sepanjang tahun 2022-2024.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, tercatat berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan I, meliputi:

- Penyelenggaraan *capacity building* TPID se-Aceh dalam hal pelaporan kegiatan TPID yang telah dilaksanakan pada 21 Februari 2022 dan dihadiri oleh Biro Ekonomi seluruh Pemerintah Kab/Kota se-Aceh
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka implementasi HET dan pasokan minyak goreng di Aceh. Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Perdagangan, Pemerintah Aceh dan Kab/kota serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Rapat tersebut diselenggarakan pada 26 Februari 2022.
- Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Provinsi Aceh pada 8 Maret 2022. Rapat

Koordinasi *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh ini dilakukan dalam rangka evaluasi laju inflasi Aceh terkini terutama menjelang Ramadhan sekaligus mengevaluasi berbagai program kerja pengendalian inflasi. Pelaksanaan HLM TPID Provinsi Aceh juga disinergikan dengan Satgas Pangan.

- d. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. HLM TPID Kota Banda Aceh dilaksanakan pada 22 Maret 2022. Pelaksanaan HLM tersebut merupakan penguatan koordinasi utamanya dalam menyambut bulan Ramadhan serta HBKN Idul Fitri.

**Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, tercatat berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan II, meliputi:**

- a. Penyelenggaraan kegiatan Gelar Pangan Murah pada tanggal 30 Juni 2022 melalui Pasar Mitra Tani (PMT) Aceh Dinas Pangan Aceh yang berlokasi di gampong Baet kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar. PMT memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian khususnya beras, cabai merah keriting dan bawang merah yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan lainnya seperti minyak kemasan, gula pasir, telur lokal serta produk pangan lokal olahan dan UMKM lokal.
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah TPID se-Sumatera pada 23 Juni 2022. Rapat ini dilakukan dalam rangka meningkatnya inflasi sumatera akibat meningkatnya permintaan domestik atas bahan-bahan pokok, serta kebijakan restriksi ekspor beberapa komoditas pangan yang dilakukan oleh sejumlah negara. Rapat tersebut diusung dengan tema Sinergi Penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi di Daerah.
- c. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada saat menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 H,

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bekerjasama dengan BULOG Kanwil Aceh dan Dinas yang membidangi perdagangan melaksanakan kegiatan pasar murah di 22 Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh. Beberapa komoditi bahan pokok bersubsidi yang dijual kepada masyarakat berupa beras, gula, minyak goreng tepung terigu dan telur ayam. Kegiatan pasar murah tersebut merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Kegiatan tersebut dibuka secara simbolis oleh Bupati kabupaten Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn. bertempat di gampong Sungai Liput kecamatan Kejuruan Muda. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 20 sampai dengan 23 Juni 2022.

- d. Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh Triwulan I Tahun 2022 pada tanggal 21 Juni 2022 bertempat di Auditorium Teuku Umar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- e. Pelaksanaan Rapat koordinasi oleh Satgas Pangan Polda Aceh terkait penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan pemantauan lokasi isolasi sapi yang terinfeksi wabah PMK pada tanggal 12 Mei 2022 bertempat di gampong Payameta kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pertanian RI, Wakapolda Aceh, Bupati Aceh Besar, Bupati Aceh Tamiang, Walikota Langsa, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Utara dan unsur terkait.
- f. Rapat Penggunaan Aplikasi Satgas Pangan POLRI di wilayah Hukum Polda Aceh pada tanggal 26 April 2022 bertempat di ruang Dirreskrimsus POLDA Aceh dan ruang aula Ditreskrimsus Polda Aceh. Aplikasi tersebut digunakan untuk penginputan data pasar dan titik koordinat pasar serta data harga pangan. Sehingga harga di pasaran tetap stabil dan tidak terjadi penimbunan dan spekulasi harga.

**Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, tercatat berbagai**

**kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan III, meliputi:**

- a. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Kota Banda Aceh pada 23 Agustus 2022 dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden mengenai perlunya usaha yang tidak biasa dalam pengendalian inflasi. Rapat dilakukan untuk menguatkan koordinasi dalam pengendalian inflasi yang diperlukan pada kedua sisi, *supply* dan *demand*.
- b. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Kabupaten Aceh Barat pada 24 Agustus 2022 dalam rangka pengendalian inflasi khususnya pada komoditas perikanan. Koordinasi yang komprehensif perlu untuk dilakukan untuk melakukan optimalisasi pada hasil perikanan dan kelautan melalui SKPA terkait.
- c. *Launching* Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Aceh pada 6 September 2022. Telah disalurkan bantuan 60 ribu bibit kepada petani maupun dayah di sekitar Provinsi Aceh dalam upaya normalisasi stok komoditas pangan, Gerakan tanam 17 ribu bibit cabai dengan Kodam Iskandar Muda dalam upaya penerapan *urban farming*, bantuan pembuatan pupuk organik dan alsintan, penandatanganan KAD cabai merah antara pedagang pasar Lambaro dan kelompok Juli Tani, serta *Ground Breaking Cold Storage* di Kabupaten Pidie.
- d. Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh Triwulan II Tahun 2022 pada tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di Auditorium Teuku Umar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- e. Rapat koordinasi nasional TPID pada 18 Agustus untuk mengantisipasi lonjakan harga yang signifikan pada beberapa komoditas pangan.
- a. Penjajakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) antara pedagang besar lambaro dengan 2 poktan binaan KPwBI Lhokseumawe yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2022
- b. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kota Banda Aceh pada 4 Oktober 2022.
- c. Rapat Koordinasi Bupati Walikota se-Aceh pada tanggal 13-14 Oktober 2022 yang salah satu agenda utamanya adalah membahas pengendalian inflasi di daerah.
- d. Rapat TPID Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Pj Gubernur Aceh pada tanggal 28 Oktober 2022
- e. Operasi pasar khusus di 3 Kabupaten/Kota pemantauan IHK pada 3 November 2022
- f. Rapat TPID Provinsi Aceh bersama Dinas terkait pada tanggal 4 November 2022
- g. Pelaksanaan pasar murah di 23 Kabupaten/Kota se-provinsi Aceh pada tanggal 7 November 2022
- h. Pelaksanaan pasar murah tahap II di 23 Kabupaten/Kota se-provinsi Aceh pada tanggal 1 Desember 2022
- i. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh pada tanggal 11 November 2022
- j. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh pada tanggal 18 November 2022
- k. Rapat tindak lanjut Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.10/7924/SJ (6 November) pada tanggal 21 November 2022
- l. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh dan Kabupaten/Kota se-Aceh secara *hybrid* pada tanggal 22 November 2022
- m. Pekan UMKM dan Pasar Murah Pemko Banda Aceh pada tanggal 29 November 2022
- n. Penandatanganan MoU KAD antara Banda Aceh dengan Aceh Besar pada tanggal 29 November 2022
- o. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kabupaten Aceh Barat pada 9 Desember 2022
- p. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Aceh pada 15 – 16 Desember 2022

**Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, tercatat berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan IV, meliputi:**

q. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kota Banda Aceh pada 19 Desember 2022

**Lebih lanjut, untuk menekan laju inflasi dalam jangka menengah, maka telah disusun *Roadmap* (peta jalan) Pengendalian Inflasi Daerah Aceh tahun 2022-2024** dengan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dengan rincian program sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- Pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan)
- Optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas Beras
- Pelaksanaan pasar murah (Menjelang HBKN)
- Pelaksanaan Sidak Pasar
- Menetapkan harga eceran tertinggi pada komoditas bahan pangan melalui penyusunan Qanun (Perda)

2. Ketersediaan Pasokan

- Peningkatan produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit)
- Peningkatan produksi peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam)
- Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi
- Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian:
  - Pembangunan jaringan irigasi
  - Rehabilitasi jaringan irigasi
  - Kanal pengendalian banjir (Aceh Tamiang)
- *Learning Center* untuk peningkatan produksi komoditas hortikultura,

peternakan, dan perikanan (UPTD)

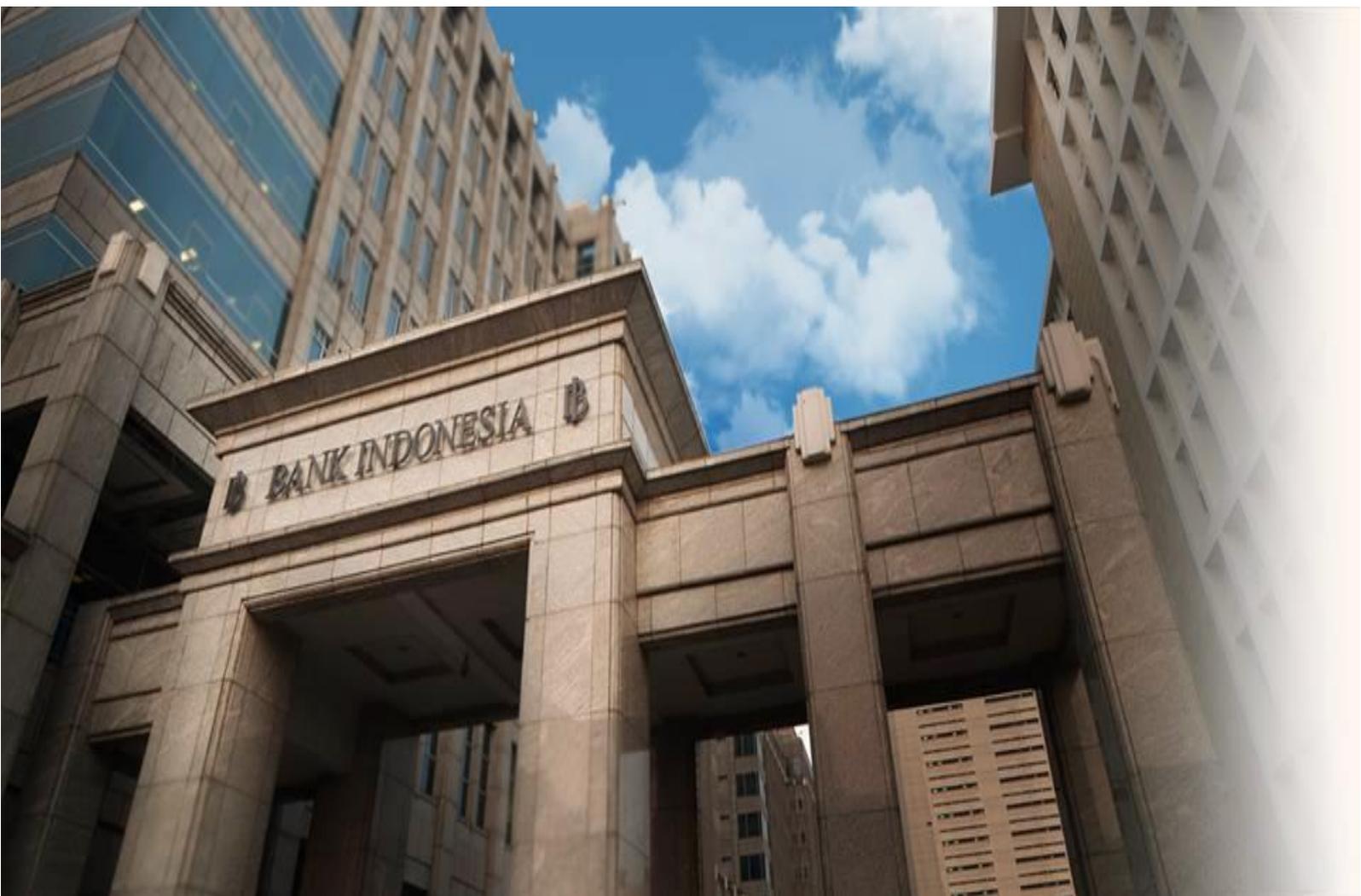
- Korporatisasi kluster petani pangan
- Pengaturan jadwal tanam komoditas pangan
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk kuota impor komoditas bawang putih dan gula

3. Kelancaran Distribusi

- Inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intraprovinci maupun antar provinsi
- Peningkatan transaksi KAD
- Fasilitas Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI)
- Simulasi pengendalian inflasi di daerah
- Pelaksanaan pasar lelang (komoditas lokal dan ekspor)
- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistic bahan pangan, antara lain: pemanfaatan tol laut
- Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: fasilitasi UMKM pangan binaan dengan *e-commerce*
- Optimalisasi pemanfaatan *Cold Storage* untuk komoditas perikanan

4. Komunikasi Efektif

- Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kab/kota
- Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota
- Penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota
- Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID
- Pelaksanaan *Capacity Building* TPID
- Rilis pers/media terkait perkembangan harga dan ketersediaan pasokan.



## BAB IV

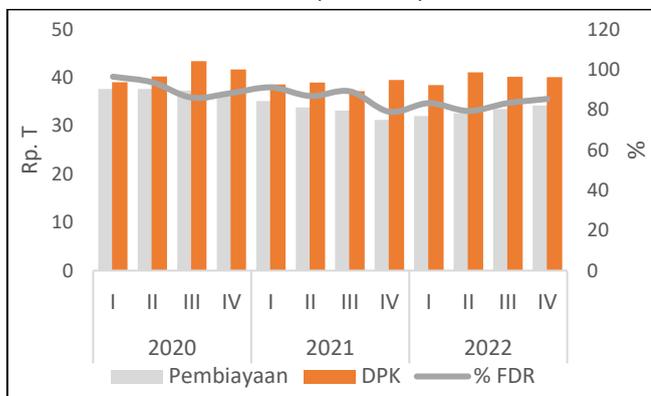
# PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 tetap terjaga, yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, dan *Non Performing Financing* (NPF). DPK pada triwulan laporan tercatat Rp40,09 T dan NPF berdasarkan lokasi bank sebesar 1,53%. *Financing to Deposit Ratio* pun meningkat seiring pembiayaan yang meningkat, terutama untuk jenis penggunaan investasi sektor prioritas.

## 4.1. Kinerja Perbankan

Stabilitas sistem keuangan menunjukkan kondisi yang terjaga. Aktivitas Perbankan di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 masih terpantau membaik. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran pembiayaan yang meningkat sebesar 9,71% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 1,48% (yoy). Perbaikan kinerja sektor perbankan didorong oleh kembali normalnya aktivitas masyarakat paska pandemi Covid-19. Meskipun demikian, ketidakpastian global harus tetap diwaspadai. Kondisi geopolitik dunia yang masih belum stabil tentunya akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian global dan Indonesia. Hal ini juga berdampak pada kinerja sektor perbankan. Adapun kinerja sektor perbankan dapat tercermin dari beberapa indikator utama seperti penyaluran pembiayaan dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).

**Grafik 4.1.** Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank)



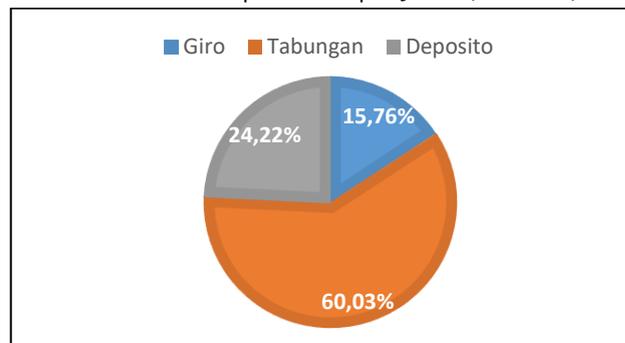
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, pembiayaan di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan. Hal ini diiringi dengan indikator *Finance to Deposit Ratio* (FDR) yang juga meningkat. FDR pada triwulan laporan adalah sebesar 85,39%.

Grafik 4.1 di atas menunjukkan perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Aceh yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Per Desember 2022, simpanan masyarakat yang tercermin dari

DPK tercatat sebesar Rp40,09 T. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan nilai DPK Rp40,14 T, terjadi sedikit penurunan sebesar Rp0,5 M atau sebesar 0,125% (qtq). Namun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu, terjadi peningkatan DPK sebesar Rp0,59 T atau naik sebesar 1,48% (yoy).

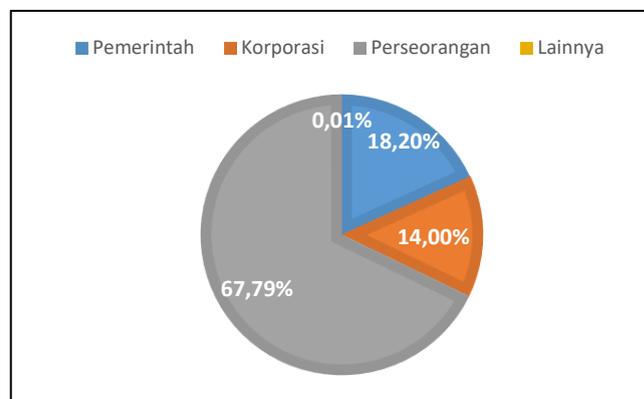
**Grafik 4.2.** Proporsi DPK per Jenis (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan jenisnya, DPK terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Adapun pada triwulan laporan, DPK didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 60,03%, diikuti deposito sebesar 24,22%, dan giro sebesar 15,76%.

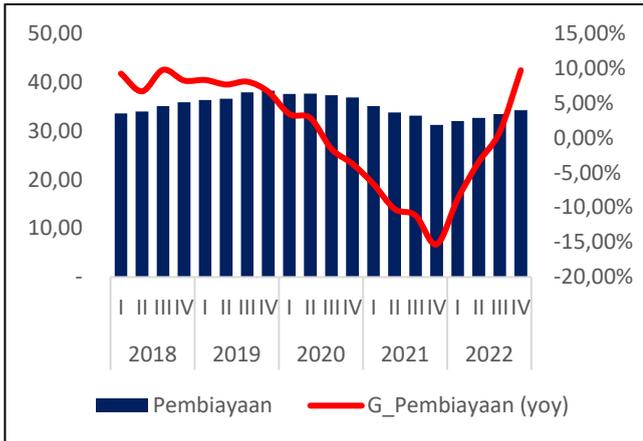
**Grafik 4.3.** Proporsi DPK per pemilik (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan pemiliknya, DPK terdiri dari DPK pemerintah, DPK korporasi, DPK perseorangan, dan lain-lain. DPK perseorangan memiliki proporsi terbesar yaitu 67,79%, diikuti DPK Pemerintah sebesar 18,20% dan DPK korporasi sebesar 14%.

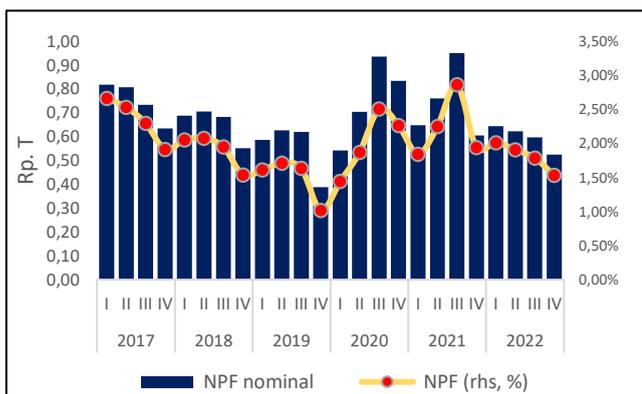
**Grafik 4. 3.** Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Sementara itu, pembiayaan perbankan di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar Rp34,23 T, meningkat 9,71% (yoy), atau lebih baik dibandingkan peningkatan pada triwulan sebelumnya yaitu 0,87% (yoy). *Financing to Deposit Ratio* (FDR)<sup>1</sup> perbankan di Provinsi Aceh berada pada level 85,39% atau meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 83,33%. Pertumbuhan pembiayaan menunjukkan tren peningkatan kinerja pada sektor perbankan yang masih berlanjut. Tren peningkatan rasio FDR lebih disebabkan karena mulai normalnya kegiatan perbankan paska implementasi Qanun LKS. Secara keseluruhan indikator kondisi sektor perbankan masih terjaga.

**Grafik 4. 4.** Perkembangan NPF (Lokbank)



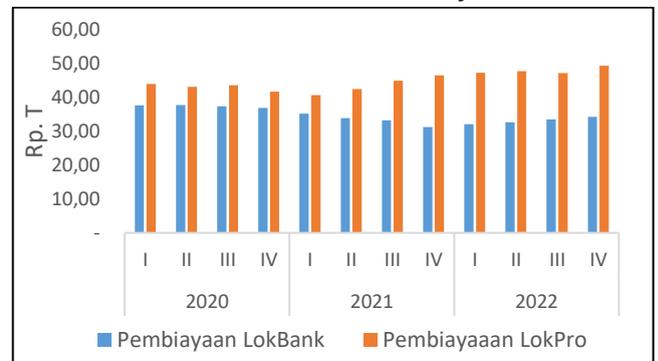
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, tercatat NPF sebesar 1,53%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,78%. Terjadi perbaikan kualitas

<sup>1</sup>FDR merupakan rasio intermediasi, yaitu rasio antara total pembiayaan (lokasi bank) dibagi dengan total DPK.

pembiayaan yang diindikasikan dengan menurunnya tingkat NPF pada triwulan laporan. Secara umum kualitas pembiayaan yang tercermin dari indikator NPF masih berada pada level yang terjaga pada bulan Desember 2022.

**Grafik 4. 5.** Perkembangan pembiayaan berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

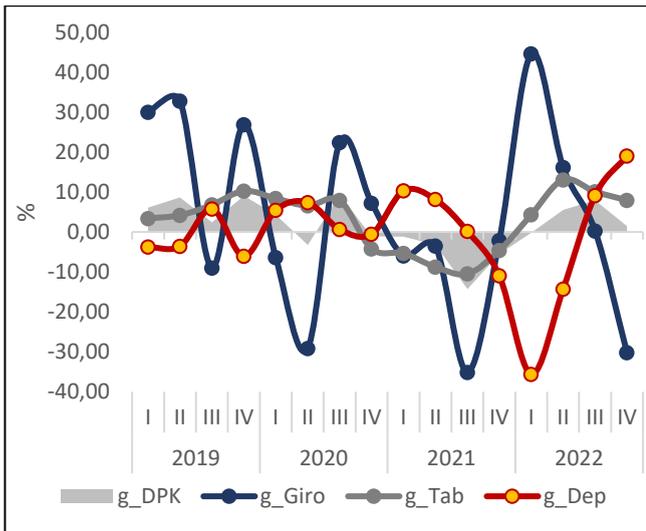
Berdasarkan data, pembiayaan yang disalurkan di Aceh tidak hanya dilakukan oleh perbankan di Aceh. Hal tersebut terkonfirmasi dari nominal penyaluran pembiayaan lokasi proyek yang lebih besar dari nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan di Aceh mencapai Rp49,29 T. Sementara itu, penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank pada triwulan laporan adalah sebesar Rp.34,23 T.

## 4.2. Intermediasi Perbankan

### 4.2.1. Kenaikan DPK Jenis Deposito Menjadi Faktor Pendorong Peningkatan DPK

**Penghimpunan DPK tahunan mengalami peningkatan dengan laju 1,48% (yoy).** Kenaikan DPK jenis deposito menjadi penyumbang tertinggi kenaikan DPK secara keseluruhan. Selain pertumbuhan dari DPK jenis deposito, kenaikan DPK jenis tabungan juga turut mendorong pertumbuhan DPK. Sementara DPK jenis giro pada triwulan laporan mengalami penurunan.

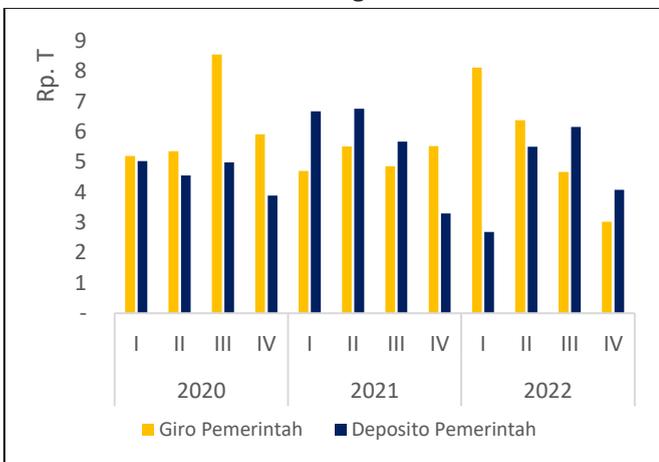
**Grafik 4. 6.** Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, pertumbuhan DPK jenis deposito meningkat sebesar 19,04% (yoy). Sementara itu, DPK jenis tabungan menurun sebesar 7,93% (yoy) dan DPK jenis giro juga mengalami penurunan sebesar 30,22% (yoy). Penurunan paling signifikan terjadi pada penurunan DPK jenis giro. Di sisi lain, DPK jenis tabungan mengalami kenaikan di akhir tahun 2022 ini.

**Grafik 4. 7.** Perkembangan DPK Pemerintah



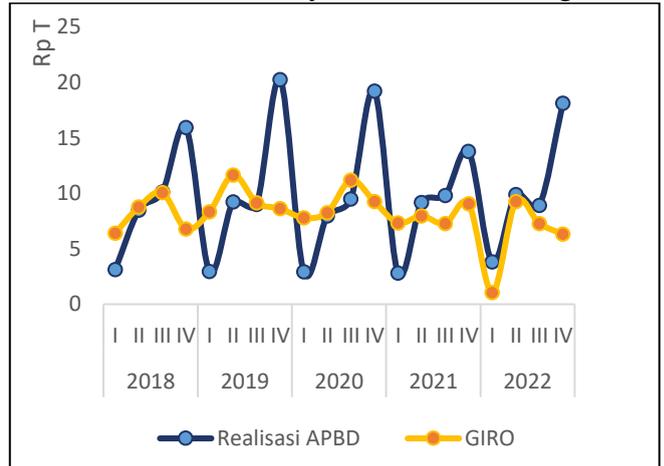
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Sebagian besar DPK pemerintah adalah berjenis giro dan deposito. Perkembangan DPK pemerintah pada triwulan laporan masih terjaga meskipun mengalami penurunan. Pada triwulan laporan penurunan DPK pemerintah sebesar 18,41% (yoy). Penurunan DPK pemerintah disumbang paling besar oleh DPK jenis giro. DPK pemerintah jenis giro mengalami penurunan sebesar 45,27% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa

terjadi realisasi belanja daerah yang tinggi.

**Giro tercatat mengalami penurunan sebesar 30,22% (yoy).** Dilihat dari proporsinya, giro pemerintah memiliki proporsi paling besar dari total giro. Giro pemerintah memiliki porsi sebesar 60%, diikuti giro perseorangan sebesar 28%, giro korporasi sebesar 11%, dan giro yang bersumber dari lain-lain sebesar 1%.

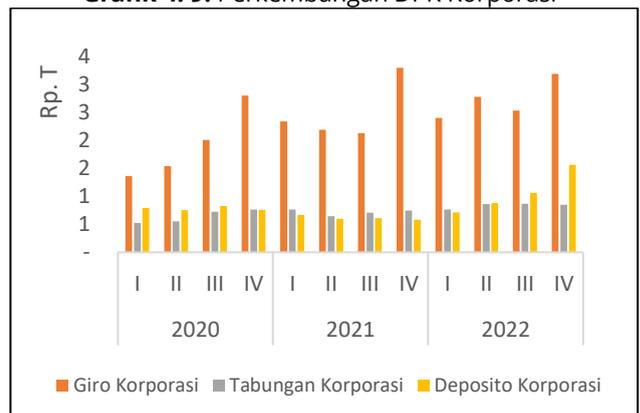
**Grafik 4. 8.** Realisasi Belanja APBD & Perkembangan Giro



Sumber: Laporan Bank Umum & DJPbn Prov Aceh, diolah

Dilihat dari nominalnya, jumlah giro pada triwulan laporan lebih kecil dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, jumlah giro adalah sebesar Rp6,31 T, atau mengalami penurunan sebesar 0,13% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp7,28 T. Secara tahunan, jumlah giro juga mengalami penurunan sebesar 30,22% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan realisasi APBD yang bersumber dari dana transfer (TKDD). Selain itu, peningkatan realisasi APBD ini disebabkan pemulihan ekonomi yang semakin baik di triwulan IV 2022. Selain itu penggunaan BTT juga mendorong penurunan giro pemerintah.

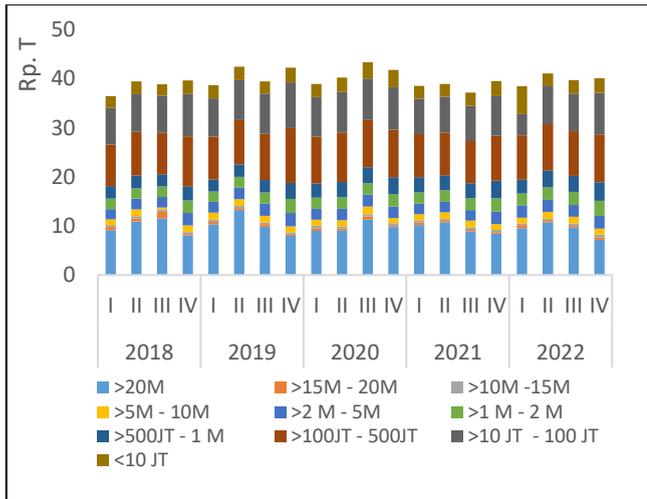
**Grafik 4. 9.** Perkembangan DPK Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Selanjutnya adalah mengenai DPK jenis korporasi. Proporsi DPK jenis korporasi pada triwulan laporan antara lain terdiri dari giro sebesar 57%, deposito sebesar 28%, dan tabungan sebesar 15%. DPK jenis giro mengalami penurunan sebesar 3,27% (yoy). Sementara itu, untuk deposito dan tabungan masing-masing meningkat sebesar 13,95% dan 167,98%.

**Grafik 4. 10.** Perkembangan Nilai Tabungan (Rp T)

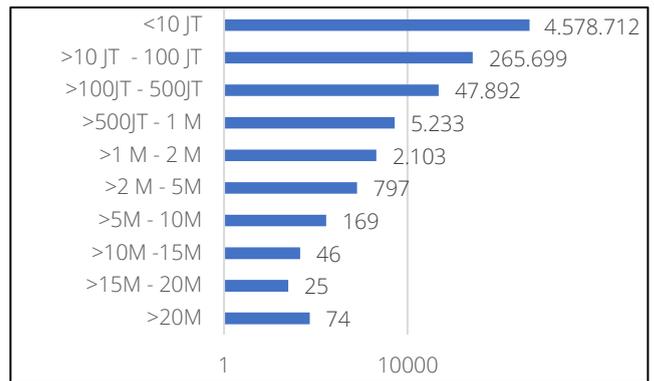


Sumber: Laporan Bank Umum diolah

Secara nominal atau kelompok nilai, tabungan pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp24,06 T, meningkat sebesar 11,95% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp21,49 T. Peningkatan tabungan paling banyak didorong oleh kelompok >10 M - 15 M. Kelompok ini meningkat sebesar 30,66% (yoy). Selanjutnya kelompok >15 M - 20 M juga mengalami kenaikan sebesar 27,91% (yoy)

**DPK jenis tabungan dan deposito mengalami peningkatan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya.** Tabungan pemerintah pada triwulan IV 2022 memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung kenaikan DPK. Tabungan pemerintah meningkat sebesar 92,37% (yoy). Sementara itu, DPK jenis deposito mengalami kenaikan sebesar 12,01% (qtq) dan 8,52% (yoy).

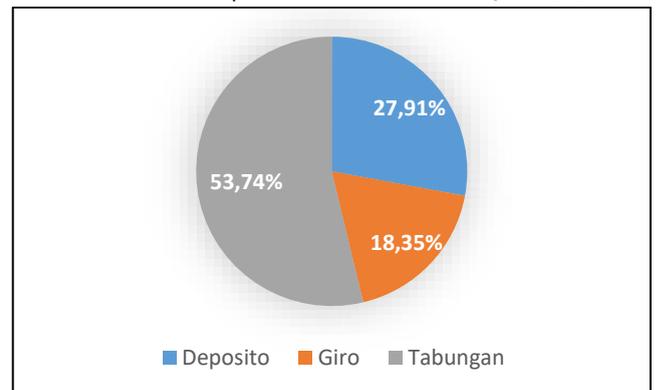
**Grafik 4. 11.** Jumlah Rekening per Saldo



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Hingga triwulan IV 2022, terdapat 4,9 juta pemegang rekening di Aceh. Terjadi peningkatan dari triwulan III yang berjumlah 4,78 juta pemegang rekening. Kenaikan pemegang rekening pada triwulan laporan menunjukkan adanya geliat masyarakat yang masuk dalam sistem perbankan. Hal ini merupakan salah satu indikator yang baik untuk inklusi keuangan. Dari keseluruhan jumlah rekening, pemegang rekening dengan saldo dibawah Rp10 juta mendominasi dengan porsi 93,96% dari total nasabah. Jumlah pemegang rekening dengan nominal tabungan di bawah 10 juta adalah sebesar 4,57 juta orang pemegang rekening.

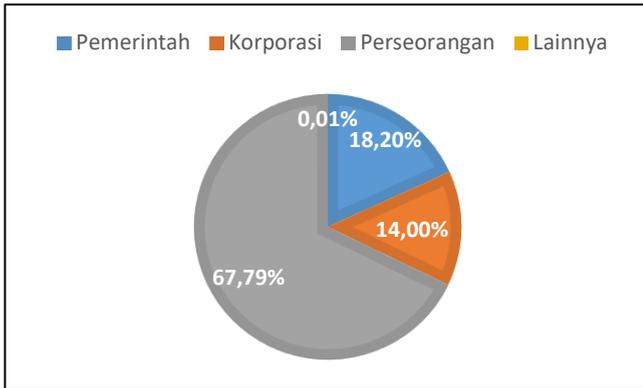
**Grafik 4. 12.** Proporsi DPK Berdasarkan Jenis (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan proporsinya, DPK di Provinsi Aceh mayoritas berupa tabungan dengan proporsi pada triwulan laporan 53,74%. Sedangkan jenis deposito dan giro masing-masing memiliki porsi berturut-turut sebesar 27,91% dan 18,35%.

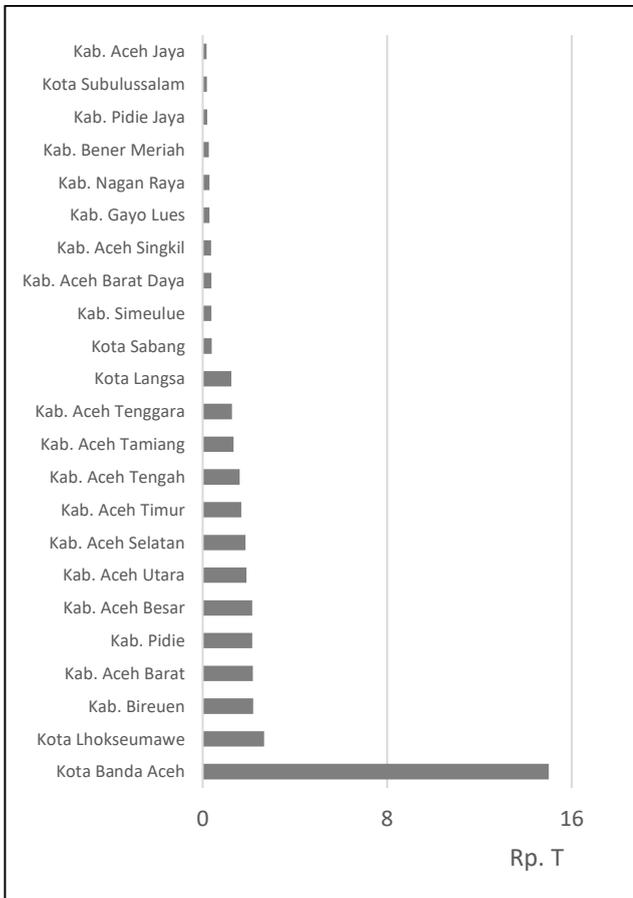
**Grafik 4. 13.** Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK berdasarkan jenis tabungan seluruhnya berada pada perbankan syariah. Hal ini setelah diterapkannya LKS Qanun secara keseluruhan. Selaras dengan tabungan, DPK jenis deposito dan giro secara keseluruhan berada pada perbankan syariah. Berdasarkan kepemilikan, mayoritas dana pihak ketiga berasal dari perseorangan dengan kontribusi sebesar 67,79%. DPK yang berasal dari pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki proporsi sebesar 18,20% dan 14%.

**Grafik 4. 14.** Penghimpunan DPK Spasial (Rp T)



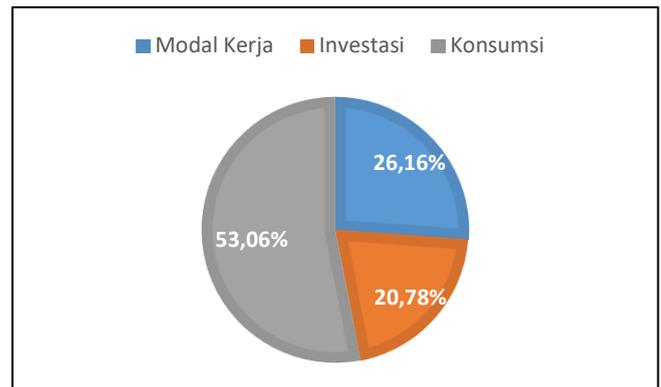
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara spasial, penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Aceh belum tersebar secara merata dan masih terkonsentrasi di wilayah ibu kota provinsi. Kota Banda Aceh menyerap 45,44% dari total DPK di Aceh atau setara dengan Rp18,04 T. Setelah ibu kota provinsi, wilayah Kabupaten/Kota yang mendominasi penghimpunan DPK diantaranya adalah Lhokseumawe (Rp4,41 T), Langsa (Rp2,16 T) dan Pidie (Rp2,05 T), Bireun (Rp2,03 T).

#### 4.2.2. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Didorong Konsumsi

Secara umum, laju penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh berdasarkan lokasi proyek mengalami pertumbuhan sebesar 5% (yoy) pada triwulan laporan.

**Grafik 4.15.** Proporsi pembiayaan berdasarkan penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 53,06%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 46,94%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja dimana masing-masing memiliki porsi sebesar 20,78% dan 26,16% dari total pembiayaan yang disalurkan pada triwulan laporan

Penyaluran pembiayaan yang ada di Provinsi Aceh masih didominasi oleh pembiayaan sektor konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sektor-sektor produktif belum tersalurkan secara optimal.

**Grafik 4. 16. Pembiayaan Konsumsi**

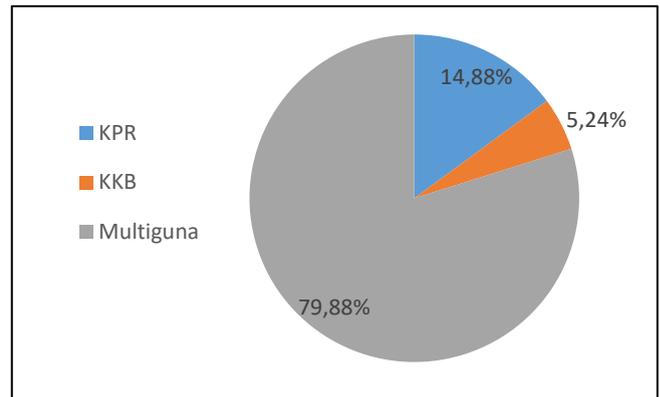


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pembiayaan RT terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna. Pada triwulan laporan, kredit RT meningkat sebesar 9,55% (yoy). Laju pertumbuhan kredit RT mulai mengalami laju pertumbuhan yang stabil semenjak penurunan yang drastis di tahun awal terjadinya pandemi Covid-19. Pembiayaan konsumsi pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan didorong oleh perayaan HBKN yang cenderung lebih longgar dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun belum kembali pada laju pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19, tren peningkatan kredit RT sudah mulai menunjukkan konsistensi.

Sejalan dengan kembali normalnya konsumsi, nilai Survei Konsumen juga terjaga di zona optimis. Survei Konsumen yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis meskipun sedikit melambat pada bulan Desember 2022. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Desember 2022 tercatat sebesar 112,19. Nilai ini lebih tinggi dari IKK pada bulan September yang bernilai 105,72. Hal ini mengindikasikan daya beli masyarakat masih kuat.

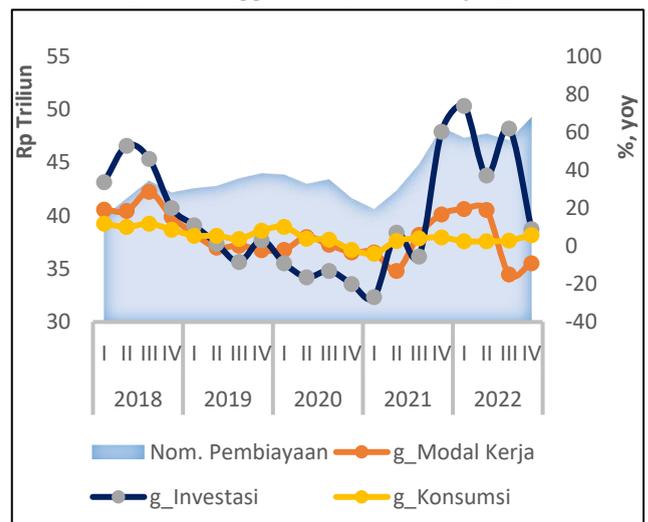
**Grafik 4. 17. Proporsi Pembiayaan Konsumsi pembiayaan berdasarkan penggunaan**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pembiayaan produktif memiliki porsi 46,38% dari total seluruh pembiayaan. Pembiayaan sektor produktif berasal dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Akselerasi pertumbuhan pembiayaan pada triwulan laporan disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dari jenis pembiayaan investasi. Pada periode laporan, kredit investasi meningkat sebesar 61,89% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang meningkat sebesar 37,19% (yoy). Sedangkan untuk kredit modal kerja menurun sebesar 14,84% (yoy).

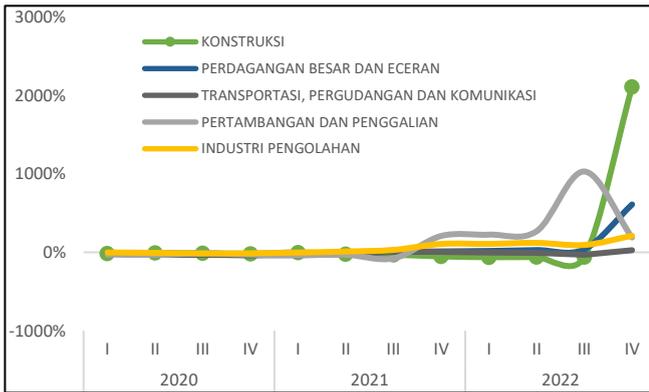
**Grafik 4.19. Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan (Lokasi Proyek)**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pertumbuhan pembiayaan investasi terbesar pada triwulan laporan berasal dari LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan, LU Pertambangan dan Penggalian, dan LU Industri Pengeloahaan.

**Grafik 4.20.** Penyaluran Pembiayaan berdasarkan LU



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

### 4.2.3. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Didorong Oleh LU Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan pembiayaan pada triwulan laporan didorong oleh tumbuhnya pembiayaan pada LU Konstruksi, dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan laporan, penyaluran pembiayaan LU Konstruksi tercatat sebesar Rp.891,59 M, mengalami kenaikan sebesar 2110% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp40,33 M. Peningkatan penyaluran pembiayaan juga terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 610% (yoy). LU Perdagangan Besar dan Eceran juga merupakan salah satu LU yang memiliki andil besar terhadap PDRB Aceh. Adapun LU yang mengalami penurunan penyaluran pembiayaan pada triwulan laporan adalah LU Real Estate, Jasa Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang mengalami kontraksi sebesar 1% (yoy).

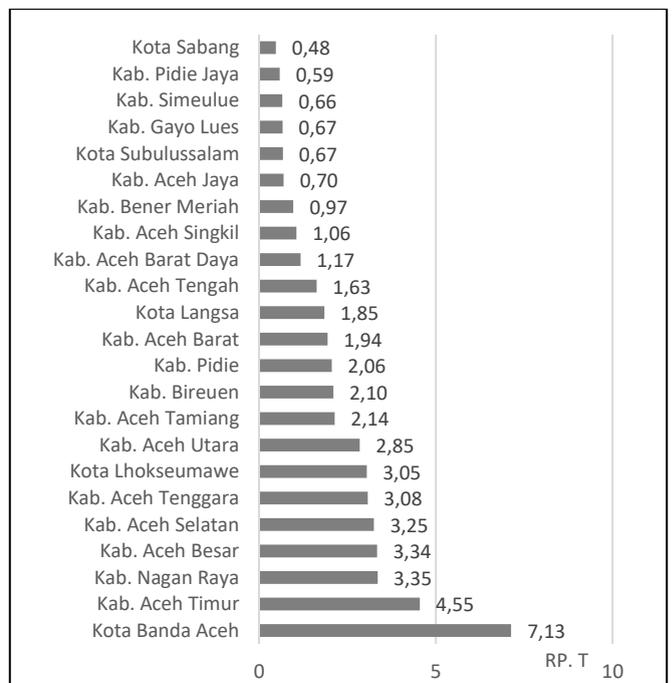
**Grafik 4. 21.** Penyaluran Pembiayaan LU (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Secara spasial, penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata.** Pada triwulan IV 2022, penyaluran pembiayaan paling banyak terdapat di Kota Banda Aceh sebesar Rp7,13 T, Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp4,55 T, Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp3,34 T, Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp3,25 T. Terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan di 5 Kota/kabupaten ini menjadi indikator bahwa penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh masih belum merata

**Grafik 4. 22.** Penyaluran Pembiayaan Spasial (Rp T)

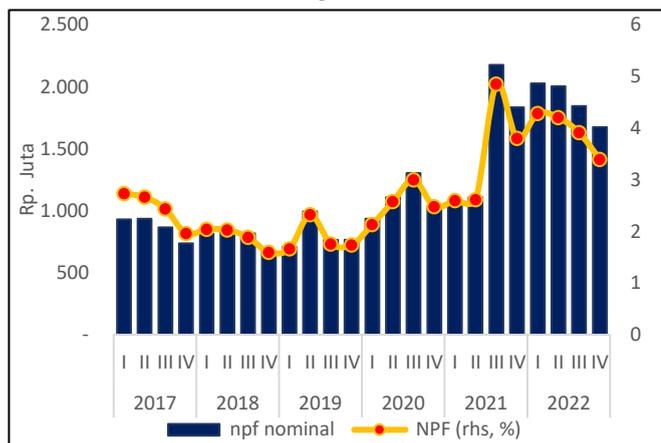


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Kualitas pembiayaan di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 (berdasarkan lokasi proyek)**

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yang tercermin dari penurunan NPF pada semua jenis penggunaan pembiayaan baik modal kerja, konsumsi, dan investasi. Peningkatan kualitas tersebut tercermin dari penurunan rasio NPF menjadi 3,40% (yoy) pada periode laporan setelah sebelumnya berada pada 3,92% (yoy).

**Grafik 4. 23.** Perkembangan NPF Perbankan Aceh

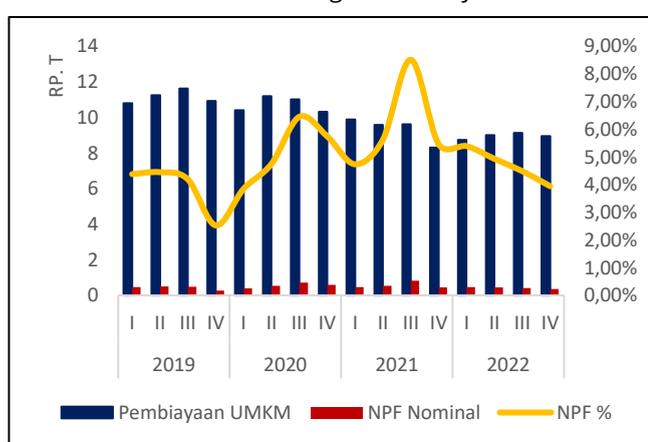


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

#### 4.2.4. Penyaluran Pembiayaan Kepada UMKM Sedikit Menurun, Namun Risiko Pembiayaan Mulai Membaik

Kualitas pembiayaan UMKM mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya pembiayaan macet/*non-performing financing* dari sebesar 4,49% pada triwulan sebelumnya, menjadi 3,94% pada triwulan laporan.

**Grafik 4. 24.** Perkembangan Pembiayaan UMKM



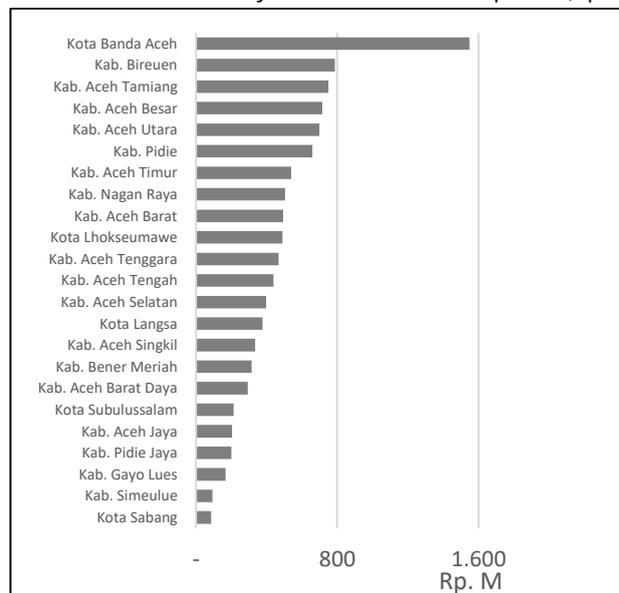
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan kepada UMKM pada triwulan IV 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,81% (yoy). Jumlah penyaluran pembiayaan untuk

pelaku UMKM pada triwulan III adalah sebesar Rp819,892 M. Jika dibandingkan dengan jumlah yang pembiayaan UMKM yang disalurkan pada triwulan IV dengan nilai Rp894,99 M. Maka secara triwulanan dapat dilihat terjadi penurunan sebesar 2,07% (qtq). Meskipun secara triwulanan terjadi penurunan penyaluran dibandingkan triwulan laporan sebelumnya, secara umum penyaluran pembiayaan UMKM sudah mulai kembali membaik paska pandemi Covid-19. Hal ini juga disadari oleh kepatuhan perbankan untuk mencapai target penyaluran pembiayaan UMKM sesuai dengan PBI No. 23/13/PBI 2021 tentang rasio pembiayaan inklusif Makroprudensial (RPIM)

Secara spasial, penyaluran pembiayaan/kredit berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Hal tersebut terlihat dari terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mendominasi setengah dari total pembiayaan yang tersalurkan. Pada triwulan laporan ini 5 kab/kota dengan total pembiayaan UMKM terbesar antara lain kota Banda Aceh, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Besar, dan Kab. Aceh Utara.

**Grafik 4. 25.** Pembiayaan UMKM Secara Spasial (Rp T)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank

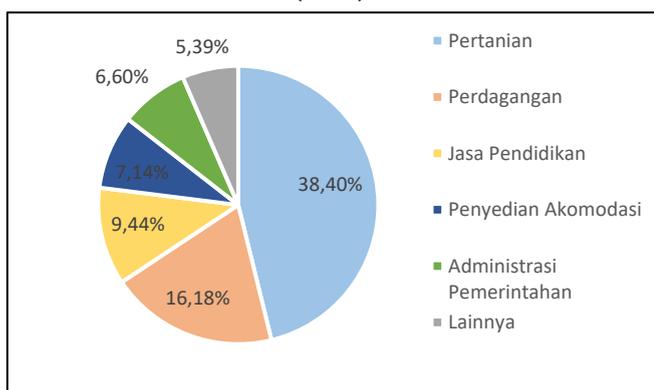
Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional KPw Bank Indonesia juga turut mendorong UMKM dengan melaksanakan program pengembangan UMKM di masing-masing daerah baik melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, maupun klaster.

### 4.3. Kinerja Pembiayaan Rumah Tangga

#### 4.3.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga

**Pada penyaluran pembiayaan kepada rumah tangga, sumber kerentanan terletak pada kinerja perekonomian, kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan.** Penghasilan rumah tangga di Provinsi Aceh relatif belum terdiversifikasi. Hal tersebut tergambar dari jumlah tenaga kerja di Aceh yang mayoritas bekerja di lapangan usaha pertanian (36,13%). Sehingga, tekanan pada lapangan usaha tersebut mengakibatkan rumah tangga di Aceh terpapar risiko yang cukup tinggi di tahun 2022.

**Grafik 4. 26.** Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (2022)



Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

### 4.4. Langkah Peningkatan Akses Keuangan

#### 4.4.1. Pengembangan Infastruktur Pendukung Sistem Keuangan di Aceh

**Kerja sama antara Bank Aceh Syariah dengan penyedia jasa transaksi lintas negara melalui ATM seperti Visa/Mastercard baik sebagai *issuer* maupun *acquirer* perlu diakselerasi.** Minimnya keberadaan ATM Bank Syariah di Aceh yang terintegrasi dengan jaringan internasional menjadi isu tersendiri pasca implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Terlebih lagi dengan mulai dibukanya pintu masuk wisatawan asing seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi. Solusi jangka pendek yaitu mendorong transaksi non tunai khususnya untuk wisatawan asing dengan memperbanyak EDC di *merchant* khususnya di kawasan wisata yang dapat melayani transaksi menggunakan kartu kredit/debit berlogo Visa/Mastercard.

#### 4.4.2. Langkah KPw BI Aceh dalam mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM

**Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif guna meningkatkan roda perekonomian yang ada di Provinsi Aceh, Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Forum Percepatan Ekspor Produk UMKM Unggulan ataupun memfasilitasi kegiatan *business matching*.**

Pada 18 Januari 2023 dilaksanakan Sosialisasi Percepatan Ekspor Aceh di Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan sosialisasi ini dikhususkan untuk menyoar pelaku UMKM, utamanya dari para petani kopi gayo dan eksportir kopi gayo. Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kebijakan dari Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, DJBC Kanwil Aceh, Stasiun Pertanian Kelas I Banda Aceh, dan Stasiun Karantina Ikn. Selain itu dari pihak BUMN yaitu PT Pos Indonesia (Persero) juga hadir

sebagai perusahaan di sektor transportasi dan logistik. Harapan ke depan, peran PT Pos Indonesia (Persero) Aceh sebagai konsolidator ekspor dapat berjalan optimal. Selain itu, dengan dibuka penerbangan di bandara Rembele di Kabupaten Rembele pada awal Januari 2023, diharapkan mampu mendorong kinerja ekspor Aceh khususnya yang berasal Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

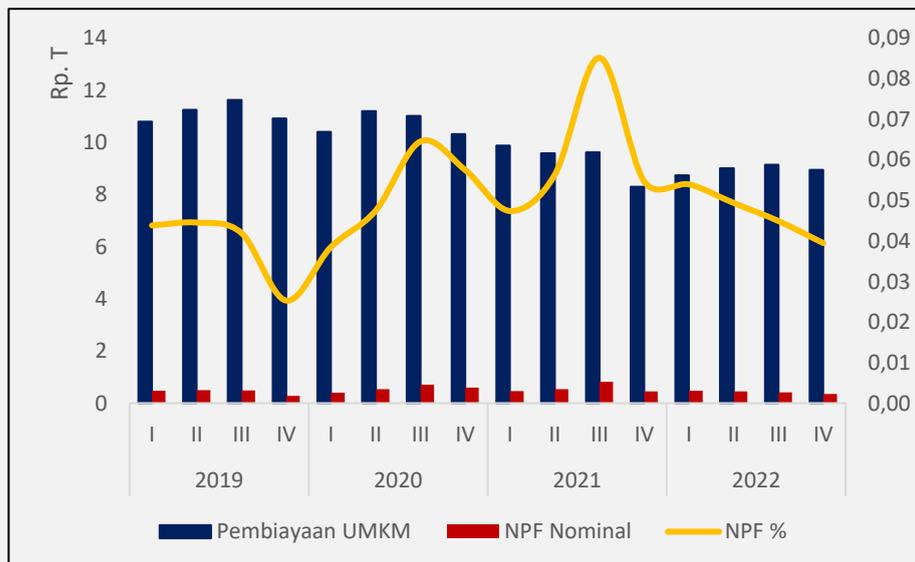
Kemudian, pada 20 Februari 2023 juga telah dilaksanakan kembali Forum Percepatan Ekspor Unggulan Aceh di Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan kurasi UMKM bersama dengan pemangku kebijakan yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bank Indonesia Provinsi Aceh, DJBC Kanwil Aceh dan dari sisi perbankan ada Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah. Dari sisi pembiayaan, tentunya pelaku sektor perbankan dalam hal ini BSI dan BAS akan dapat melakukan *assesment* mengenai kondisi arus keuangan dari UMKM.

## Bank Indonesia Terbitkan Kebijakan untuk Mendorong Pembiayaan pada Sektor Prioritas dan Inklusif

Bank Indonesia terbitkan peraturan baru mengenai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. Peraturan tersebut adalah PBI No.24/3/PBI/2022, yang menggantikan PBI No.23/13/PBI/2021. Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung upaya bersama pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perorangan berpenghasilan rendah (PBR). Dalam PBI No.24/3/PBI/2022 disebutkan bahwa RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya adalah sebesar 30%. Adapun jika rasio yang telah ditetapkan tidak tercapai maka perbankan wajib memenuhi Giro RPIM yang telah ditentukan dalam peraturan. Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2023 namun pemberlakuan sanksi baru akan dilakukan di tahun 2024.

Dengan berlakunya sistem perbankan syariah berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, lembaga perbankan yang diperbolehkan di Aceh hanya perbankan syariah. Berikut di bawah ini adalah grafik perkembangan pembiayaan UMKM di Aceh dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada triwulan IV ini terjadi peningkatan pembiayaan UMKM sebesar 7,81% (yoy). Adapun rasio *non-performing loan* dengan jumlah pembiayaan UMKM adalah sebesar 3.94% di triwulan laporan.

**Grafik 4.27.** Perkembangan Pembiayaan UMKM

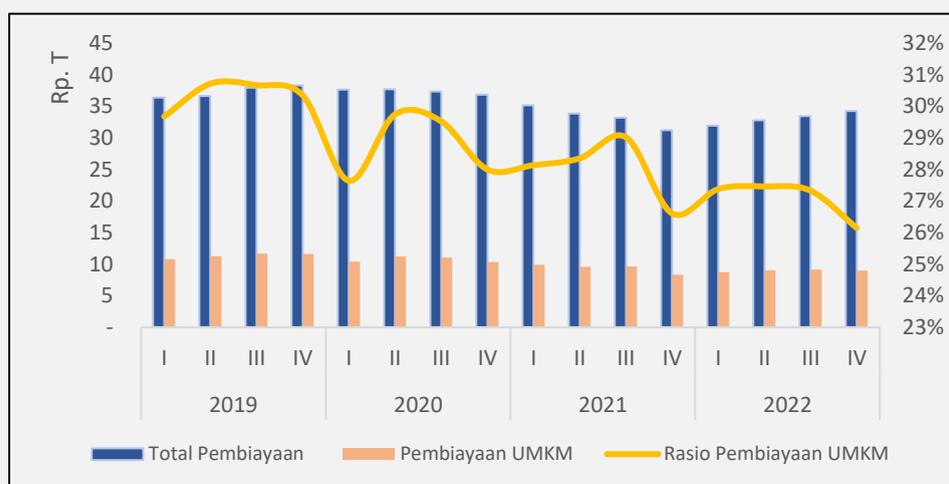


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Rasio pembiayaan UMKM di Aceh sempat mencapai angka tertingginya pada triwulan II 2019 yaitu dengan rasio 30,17%. Namun untuk sekarang pada triwulan IV 2022, rasio pembiayaan UMKM berada pada level 26,14%.

Selain menerbitkan PBI Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, Bank Indonesia juga menerbitkan PBI Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi tertentu dan Inklusif, dan PADG Nomor 24/12/PADG/2022 tentang Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

Grafik 4.28. Rasio Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

PBI Nomor 24/5/PBI/2022 mengatur tentang pemberian insentif kepada perbankan yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dengan besaran insentif maksimal 1% (100 *basis points*). Insentif dapat diperoleh jika perbankan memberikan pembiayaan pada sektor prioritas dan mencapai nilai rata-rata pertumbuhan pembiayaan sektor prioritas paling sedikit 1%. Selain itu, insentif juga dapat diperoleh jika bank dapat memenuhi target RPIM yang telah tercantum dalam rencana bisnis bank dan mencapai nilai RPIM paling sedikit 10%.

Kinerja penyaluran pembiayaan adalah indikator intermediasi yang sepatutnya ditingkatkan. Penyaluran pembiayaan UMKM tentunya akan membantu perputaran perekonomian berjalan lebih cepat. Untuk itu, ke depan penyaluran pembiayaan UMKM dapat ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

--000--



## BAB V

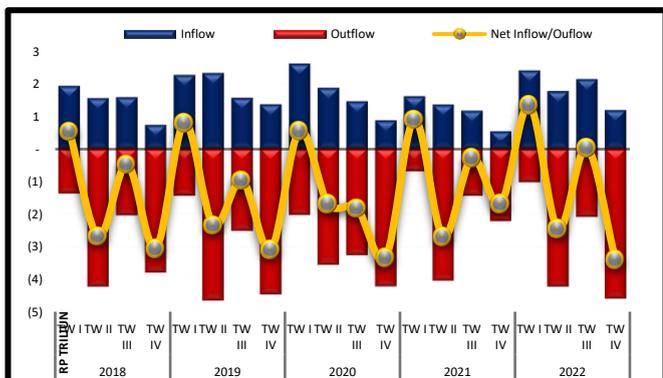
# PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Selama triwulan IV 2022, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana terdapat peningkatan pada *outflow* dan *inflow* pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara sistem pembayaran nontunai, baik nilai besar maupun ritel, terus menunjukkan tren peningkatan. Di sisi lain, penggunaan kartu ATM/debit dan Uang Elektronik tumbuh positif pada triwulan laporan. Selama tahun 2022 sistem pembayaran tunai mengalami peningkatan baik itu *inflow* maupun *outflow* dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara sistem pembayaran nontunai, untuk nilai besar mengalami peningkatan dan *retail* mengalami penurunan selama tahun 2022 dibanding tahun 2021. Di sisi lain, penggunaan kartu ATM/debit dan Uang Elektronik tumbuh positif di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

## 5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pada triwulan IV 2022, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net outflow*<sup>1</sup>. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp3,4 triliun dengan total *inflow* sebesar Rp1,19 triliun dan total *outflow* sebesar Rp4,59 triliun (Grafik 5.1). Kondisi ini selaras dengan data historis 3 tahun terakhir yang menunjukkan *net outflow* selalu terjadi pada triwulan IV. *Net outflow* pada triwulan laporan mengimplikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal lebih besar dibandingkan masuknya uang kartal dari masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia. *Net outflow* pada triwulan laporan merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2022, bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID 19. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat terhadap uang kartal telah mengalami pemulihan pasca kondisi pandemi COVID 19 sejalan dengan pola konsumsi masyarakat yang selalu meningkat pada akhir tahun.

Grafik 5.1. Netflow Kas (Rp Triliun)

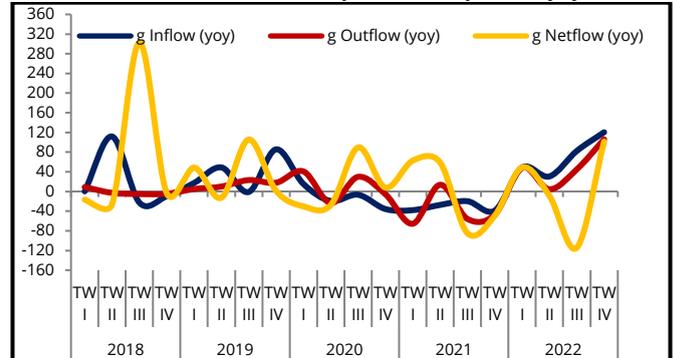


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara *year on year*, tingkat *inflow* pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 120,42% (yoy), sementara *outflow* tumbuh sebesar 106,01% (yoy) (Grafik 5.2). Nilai *Outflow* dan *Inflow* yang jauh meningkat dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya merupakan indikator yang menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022 yang tetap tumbuh positif sebesar 5,01% (yoy) di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Sejalan dengan hal tersebut pada triwulan IV 2022 Ekonomi Provinsi Aceh juga tercatat tumbuh lebih tinggi

dari pertumbuhan nasional dengan nilai sebesar 5,60% (yoy). Peningkatan kebutuhan uang yang terjadi pada triwulan laporan sesuai dengan pola historis di akhir tahun yang cenderung lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

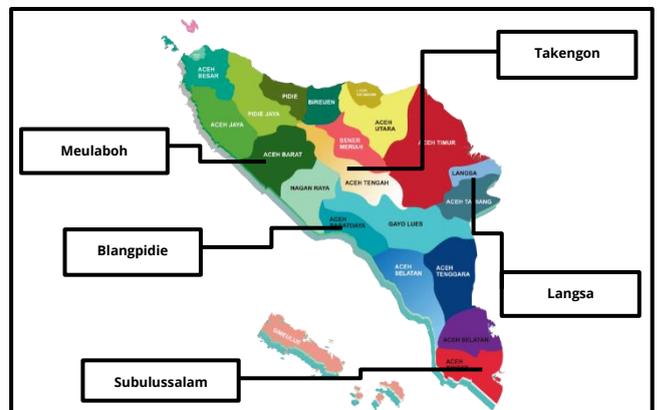
Grafik 5.2. Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat melalui pembukaan Kas Titipan. Kas Titipan merupakan kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada kantor bank umum untuk mencukupi persediaan kas perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

Gambar 5.3. Kas Titipan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

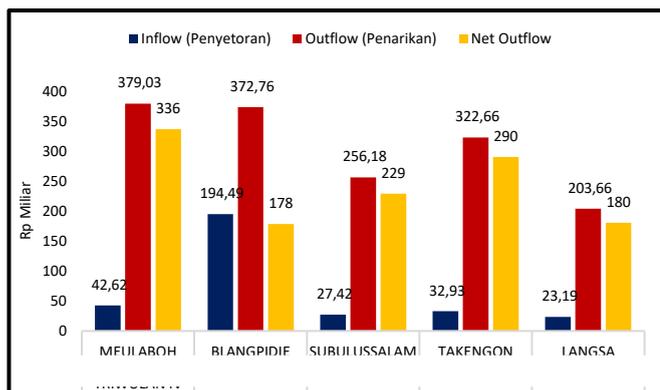
Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) kantor kas titipan di Provinsi Aceh yaitu di Blangpidie, Meulaboh, Subulussalam, Takengon, dan Langsa. Namun beberapa Kas Titipan mengalami penutupan pada triwulan IV tahun 2020, yaitu di Meulaboh (ditutup November 2020), Takengon (ditutup November 2020), Langsa (ditutup Desember 2020), dan Blangpidie (ditutup Desember 2020). Penutupan tersebut dikarenakan adanya proses konsolidasi dan transisi Bank Pengelola Kas Titipan sehubungan dengan implementasi Qanun Nomor 11

<sup>1</sup> Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih kecil

dari pada aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

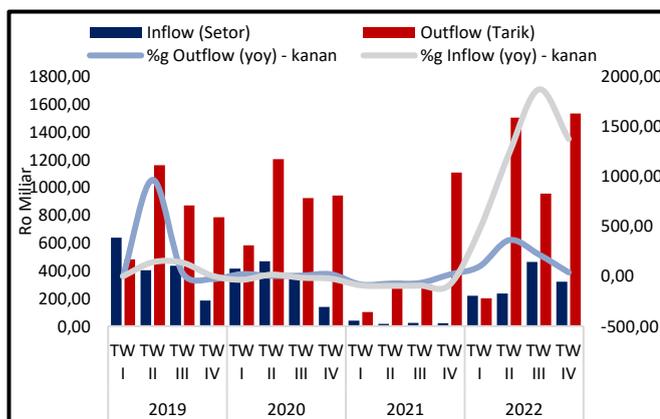
Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan perbankan yang beroperasi di Aceh seluruhnya harus berbentuk syariah, dengan masa transisi paling lama tiga tahun atau hingga tahun 2021. Setelah selesai masa transisi oleh perbankan, terdapat beberapa Kas Titipan yang kembali dibuka pada tahun 2021, yaitu Kas Titipan Blangpidie yang kembali beroperasi pada Agustus 2021 dan Kas Titipan Takengon pada November 2021. Selain itu, kas titipan di Meulaboh dan Langsa juga dibuka kembali (*relaunching*) pada April 2022.

**Grafik 5.4.** Transaksi *Inflow Outflow* per Kas Titipan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.5.** Total Transaksi Kas Titipan Triwulanan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

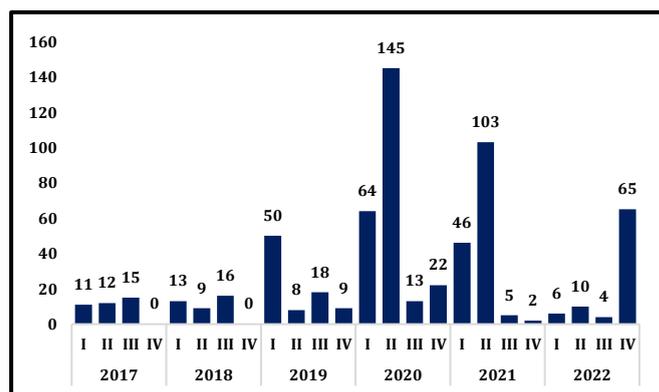
Secara agregat, Kas Titipan di Provinsi Aceh pada triwulan laporan mengalami *net outflow* sebesar Rp1.213 miliar (Grafik 5.5). Jumlah tersebut berasal dari lima Kas Titipan di Meulaboh, Subulussalam, Blangpidie, Takengon, dan Langsa. Aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) sebesar Rp320,65 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 1.375% (yoy). Di sisi lain, *outflow* tercatat sebesar Rp1.534 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,36% (yoy).

Di samping itu, untuk tetap menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat (*clean money policy and fresh for circulation*) serta meningkatkan kualitas uang beredar di masyarakat selama masa pandemi COVID-19, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Aceh

melaksanakan beberapa kebijakan terkait layanan sistem pembayaran tunai. Pertama, melakukan penyesuaian terhadap jadwal penyetoran dan penarikan uang perbankan. Kedua, melaksanakan operasi terpisah (*split operation*) atas layanan perbankan untuk mengantisipasi apabila terdampak gangguan operasional akibat pandemi. Ketiga, memberikan imbauan kepada perbankan untuk mematuhi protokol kesehatan yang harus diterapkan selama masa pandemi serta mengoptimalkan penukaran uang kepada masyarakat melalui perbankan. Keempat, mengajak masyarakat melakukan transaksi secara non tunai untuk memitigasi penularan melalui tatap muka. Kebijakan tersebut selaras dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah dan telah dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan layak edar.

Temuan uang yang diragukan keasliannya (palsu) pada triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah temuan pada triwulan IV 2022 sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar, jauh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 4 (empat) lembar (Grafik 5.6). Adapun temuan uang palsu tersebut berasal dari penyidikan Polri sebagaimana permintaan menjadi saksi ahli pada tanggal 13 Desember 2022 di Polres Aceh Tamiang. Sementara jika ditinjau dari sisi pecahan, uang Rupiah dengan pecahan Rp100.000,- dan Rp50.000,- menjadi pecahan yang mendominasi hasil temuan.

**Grafik 5.6.** Temuan Uang Palsu (Lembar)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

## 5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun

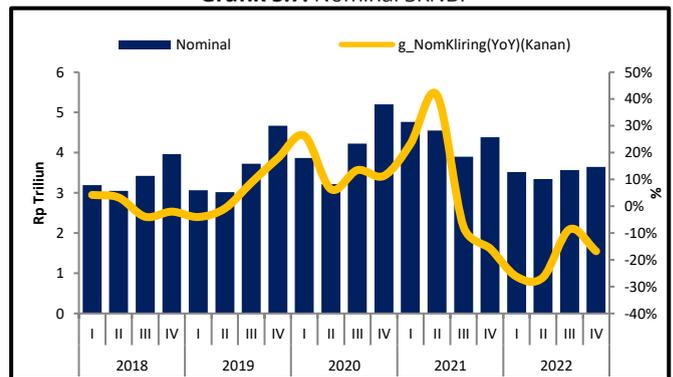
**industri, menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.** Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri juga tercatat mengalami pertumbuhan secara agregat yang tercermin dari peningkatan nominal transaksi instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Tren peningkatan tersebut juga terjadi pada penggunaan instrumen Uang Elektronik baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh. Secara umum, sistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

Memasuki triwulan IV tahun 2022, transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya transisi pengguna sistem pembayaran ritel yang beralih menggunakan BI-FAST. Pada triwulan laporan, nilai penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI tercatat sebesar Rp3,65 triliun atau menurun sebesar 17% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,38 triliun (Grafik 5.7).

Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebesar 77.114 Data Keuangan Elektronik (DKE) atau tumbuh sebesar 5,58% (qtq) dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 73.039 (Grafik 5.8). Sementara itu secara tahunan, volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan sebesar 18,90% (yoy) bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

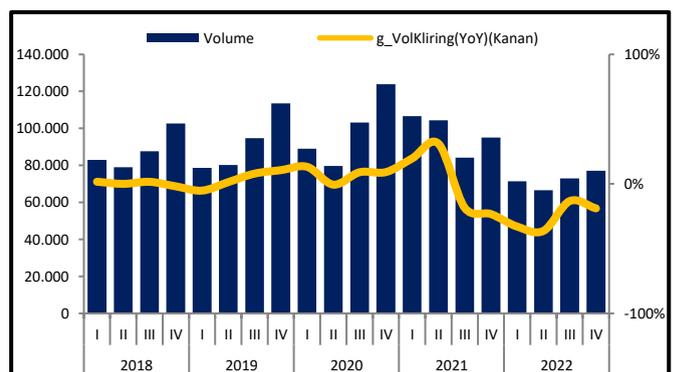
Sementara itu, perkembangan sistem pembayaran nilai besar tercermin dalam perkembangan data *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Pada periode laporan, transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp15,74 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 17,77% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 5.9). Sementara secara triwulanan, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tumbuh sebesar 41,28% (qtq) dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp11,14 triliun.

**Grafik 5.7. Nominal SKNBI**



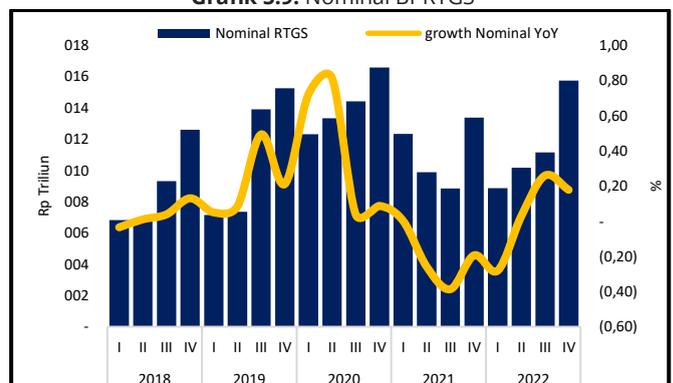
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 5.8. Volume SKNBI**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

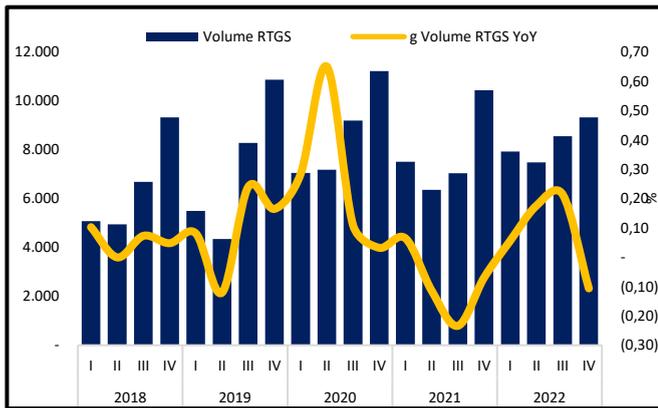
**Grafik 5.9. Nominal BI-RTGS**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi, BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebanyak 9.325 transaksi, mengalami pertumbuhan sebesar 9,06% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 8.550 transaksi (Grafik 5.10). Sementara itu secara tahunan, volume transaksi BI-RTGS tercatat turun 10,62% dibanding triwulan IV tahun 2021 yang mencapai 10.433 transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa rata rata nilai transfer pada periode laporan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, mengingat meskipun secara volume transaksi menurun namun secara nominal jauh meningkat.

Grafik 5.10. Volume BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan transaksi nilai besar melalui BI-RTGS maupun ritel melalui SKNBI secara agregat tahunan mengalami pertumbuhan di triwulan IV 2022. Sesuai pola historisnya, pertumbuhan tersebut diperkirakan terjadi karena mulai meningkatnya realisasi belanja fiskal oleh pemerintah daerah dan belanja korporasi pada akhir tahun anggaran. Di samping itu, penurunan jumlah dan volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan secara yoy diperkirakan karena terjadinya *user shifting* pasca implementasi BI-FAST<sup>2</sup> oleh Bank Indonesia sejak Desember 2021.

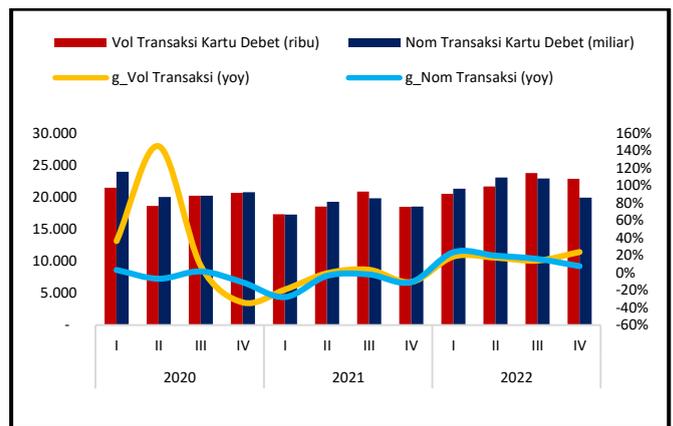
Selanjutnya, transaksi non tunai menggunakan APMK baik kartu kredit, kartu ATM/debit, dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami perkembangan. Perkembangan transaksi kartu ATM/debit, kartu kredit dan Uang Elektronik menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi kartu ATM/debit, volume transaksi tercatat tumbuh meningkat sebesar 23,65% (yoy) menjadi 22,808 juta transaksi (Grafik 5.11). Selaras dengan volume transaksi, nominal transaksi ATM/debit tercatat sebesar Rp19,89 triliun, juga mengalami peningkatan sebesar 7,46% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kartu ATM/debit mayoritas digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas tarik tunai sebanyak Rp17,75 triliun (77,84%) dan untuk transfer antarbank sebesar Rp1,43 triliun (6,29%).

Sementara itu dari sisi kartu kredit, volume transaksi mengalami peningkatan sebesar 7,77% (yoy) dari 112.490 transaksi menjadi 121.240 transaksi (Grafik 5.12). Secara nominal, transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp121,74 miliar, atau meningkat sebesar 38,11% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar Rp88,15 miliar.

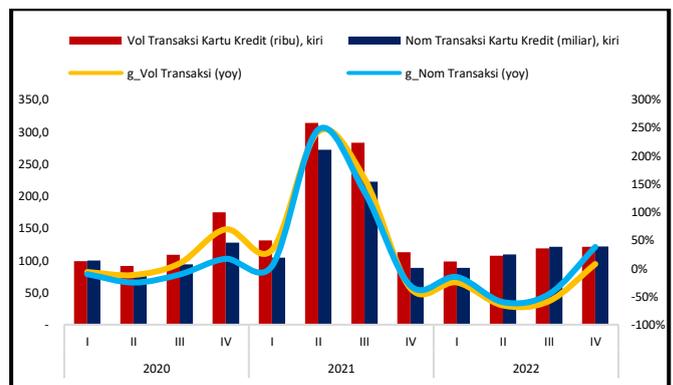
Grafik 5.11. Transaksi ATM Debit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan transaksi kartu kredit pada triwulan laporan yang mengalami ekspansi dari triwulan sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan peningkatan konsumsi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pola transaksi masyarakat yang semakin masif dalam menggunakan Uang Elektronik sebagai basis untuk bertransaksi secara *online*. Selama triwulan IV 2022, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp116,99 miliar atau 96,10% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 117.045 transaksi atau 96,54% dari total volume transaksi.

Grafik 5.12. Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

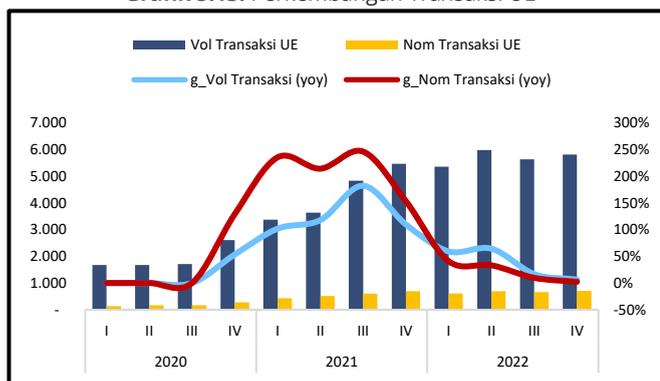
Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan IV 2022 mencapai Rp704,60 miliar, atau meningkat sebesar 2,27% (yoy). Sementara volume transaksi UE juga tumbuh sebesar 6,45% (yoy) atau

<sup>2</sup> BI-FAST adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7) yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan Sistem Pembayaran Ritel nasional

dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran nasional eksisting.

mencapai 5,80 juta transaksi selama triwulan IV 2022 (Grafik 5.13). Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce* selama masa pandemi. Selama triwulan IV 2022, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp422,05 miliar atau 59,90% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 4.237.293 transaksi atau 72,95% dari total volume transaksi.

Grafik 5.13. Perkembangan Transaksi UE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

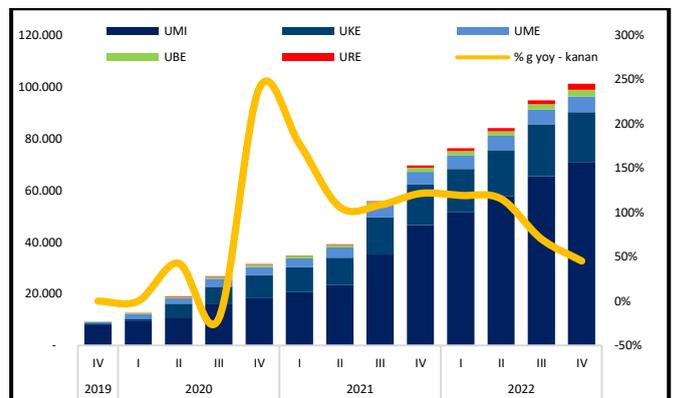
Transaksi uang elektronik berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless* untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Hingga triwulan IV 2022, terdapat 102.245 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran nontunai (Grafik 5.14). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 46,6% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69.740 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 7,8%

(qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 94.850 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 71.649 *merchant* (70,17%).

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan IV 2022 telah terdapat 281.391 pengguna atau bertambah sebanyak 254.853 sepanjang tahun 2022. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan IV terdapat 701.823 transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp132 miliar. Dengan tambahan volume transaksi tersebut menjadikan total volume selama tahun 2022 menjadi 2,32 juta transaksi dan total nominal sebesar Rp511,69 miliar.

Grafik 5.14. Pertumbuhan Merchant QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

### 5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

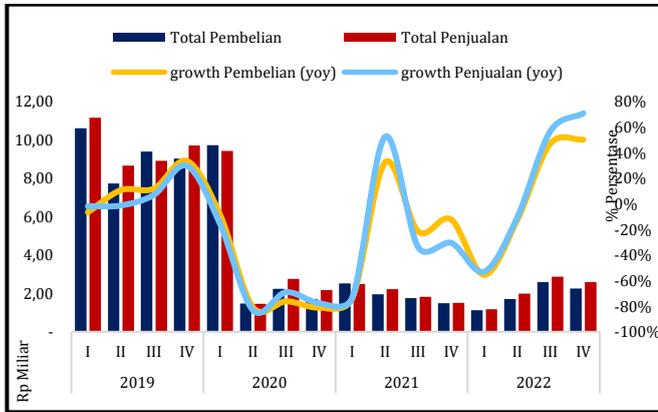
**Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (valas).**

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan valas yang sehat, profesional, dan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Hingga triwulan IV 2022, terdapat 16 (enam belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 8 (delapan) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sedangkan 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan meningkat sebesar 60,64% (yoy) menjadi Rp4,83 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp3,01 miliar.

**Grafik 5.15.** Transaksi KUPVA BB



Sumber: LKPBU, diolah

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 50,29% (yoy) menjadi Rp2,25 miliar dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,50 miliar (Grafik 5.15).

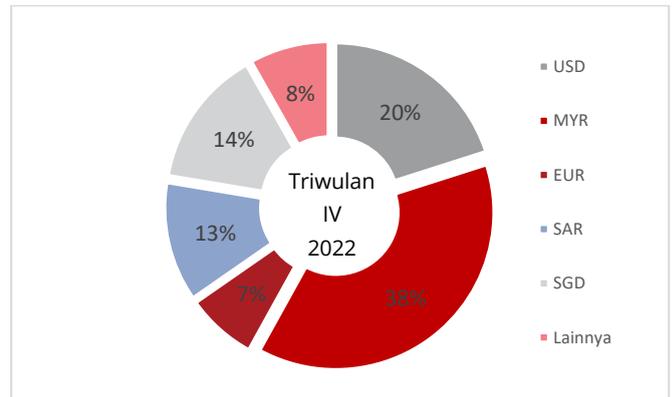
Pada tanggal 29 September 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* (VoA) yang menjadi pertanda akan kembali dibukanya penerbangan Internasional. Sebelumnya dalam menyelenggarakan VoA di seluruh wilayah Indonesia Kementerian Hukum & HAM hanya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi pasca qanun LKS yang diterapkan di provinsi Aceh mengakibatkan BRI tidak lagi dapat memberikan layanan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh. Kesiapan mekanisme VoA di Bandara SIM tentu akan memperlancar proses perizinan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Aceh.

Sejalan dengan telah dibukanya VoA di Bandara SIM, saat ini telah terdapat 3 maskapai penerbangan yang membuka rute internasionalnya di Aceh. Air Asia menjadi maskapai pertama yang membuka rute internasional pasca pandemi COVID 19. Pada 3 Oktober 2023 Air Asia resmi membuka kembali rute Aceh – Kuala Lumpur, dan disusul oleh Batik Air dan Fire Fly yang membuka rute Aceh – Penang.

Ke depannya transaksi penukaran UKA diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan dibuka kembalinya

penerbangan Internasional oleh beberapa maskapai penerbangan internasional.

**Grafik 5.16.** Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 38% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 20% (Grafik 5.16). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Di samping itu, Bank Indonesia telah melaksanakan kegiatan pemantauan langsung guna melakukan penertiban dan edukasi kepada para pedagang valuta asing yang tidak berizin selama tahun 2022. Sebanyak 2 (dua) pedagang valuta asing tidak berizin telah diberikan teguran dan edukasi atas kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk terus mendorong masyarakat yang ingin menjalankan usaha penukaran valuta asing agar terlebih dahulu mengajukan proses perizinan ke Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyelenggarakan *capacity building* kepada seluruh pedagang valuta asing berizin di Provinsi Aceh. Tujuan dari *capacity building* ini adalah agar seluruh pedagang valuta asing dapat lebih memahami potensi penyalahgunaan valuta asing baik sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme sekaligus menjalankan langkah mitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan melalui Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan memahami secara lebih dalam terkait risiko yang ada dan bagaimana mekanisme pelaporannya, diharapkan kewaspadaan setiap pedagang akan lebih meningkat utamanya mengenai profil *customer*.

## 5.4. Inklusi Keuangan

**Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana setiap masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.** Tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan mendukung pasar keuangan yang semakin dalam dan bervariasi, sehingga dapat menurunkan risiko sistemik dan kerentanan terhadap gejolak (*shock*) dalam perekonomian.

Inklusi keuangan juga mampu berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengakses produk dan jasa keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi yang berujung pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Guna mendukung percepatan peningkatan inklusi keuangan, maka kehadiran lembaga keuangan formal di seluruh daerah di Aceh merupakan hal yang harus diperhatikan. Layanan lembaga keuangan formal dimaksud terdiri dari layanan perbankan termasuk ketersediaan mesin ATM dan agen bank serta layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti pegadaian, asuransi, koperasi dan lembaga pembiayaan.

Untuk mendukung inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi, berbagai kebijakan stimulus pemerintah terus diberikan baik dari sisi fiskal maupun moneter dengan harapan mampu menjadi sentimen positif untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dari sisi fiskal, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan melanjutkan program bantuan sosial. Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia meningkatkan BI-7DRR menjadi 5,75%, hal ini merupakan langkah lanjutan untuk secara *front loaded, pre-emptive, dan forward looking* memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran.

Selain itu, Bank Indonesia juga turut berperan aktif pada proses penyaluran implementasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dan Program Elektronifikasi Pembayaran untuk mendorong inklusi keuangan digital. Peranan Bank Indonesia dalam Program BSNT yang terdiri atas Program Sembako<sup>3</sup> dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mendukung kelancaran penyaluran bantuan secara non tunai. Dukungan diwujudkan dengan menyediakan infrastruktur, sistem, dan mekanisme pembayaran bantuan sosial. Di sisi lain, Bank Indonesia berupaya

mendorong masyarakat untuk bermigrasi menggunakan sarana pembayaran non tunai dengan melakukan percepatan elektronifikasi sistem pembayaran di daerah baik sifatnya People to Government (P to G), Government to People (G to P), People to People (P to P), dan Government to Government (G to G).

### Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

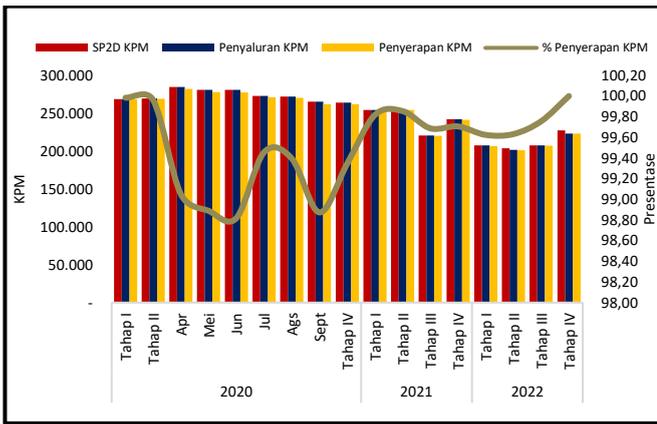
Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran BSNT, Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap IV tahun 2022 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 98,23% kepada KPM (Grafik 5.17). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap IV tercatat sebanyak 223.327 atau telah mencapai 99,99% dari target jumlah penerima sebanyak 223.328 KPM.

**Grafik 5.17.** Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)

menggunakan kartu kombo yang diberikan kepada KPM.

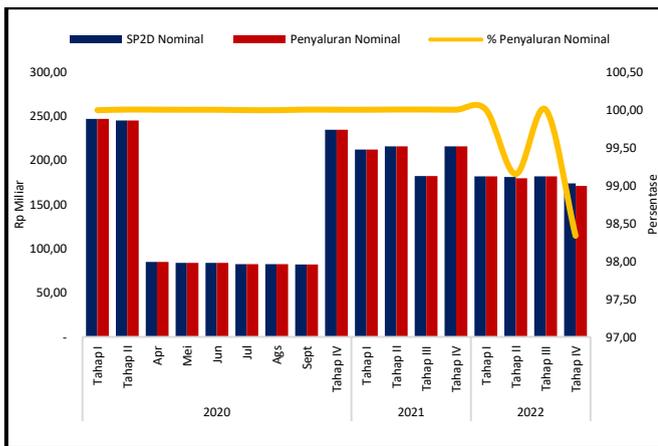
<sup>3</sup> Sejak Januari 2020, Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berganti nama menjadi Program Sembako. Mekanisme penyaluran tetap



Sumber: Himbara, diolah

Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada triwulan IV 2022, nominal bantuan yang disalurkan pada Tahap IV 2022 sebesar Rp170,78 miliar dengan persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 98,23% (Grafik 5.18). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yaitu Rp181,28 miliar.

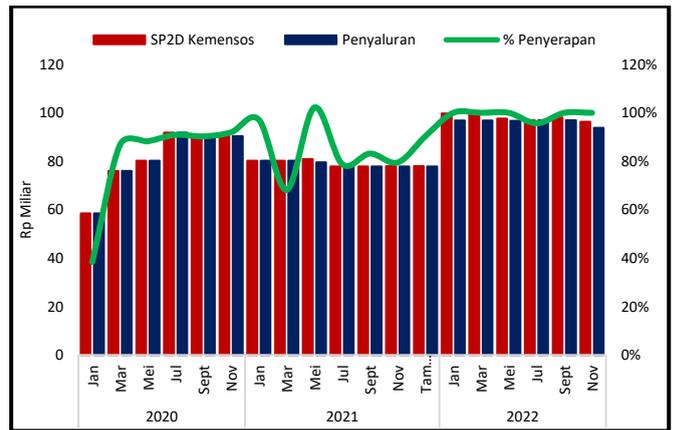
**Grafik 5.18.** Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, penyaluran bantuan Program Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat terbatas penanggulangan pandemi COVID-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000/bulan/KPM hingga triwulan laporan. Dalam rangka membantu meringankan dampak pandemi COVID-19, pada bulan Desember 2021 Pemerintah memberikan tambahan 2 (dua) bulan bantuan Program Sembako. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.

**Grafik 5.19.** Perkembangan Program Sembako (Nominal)

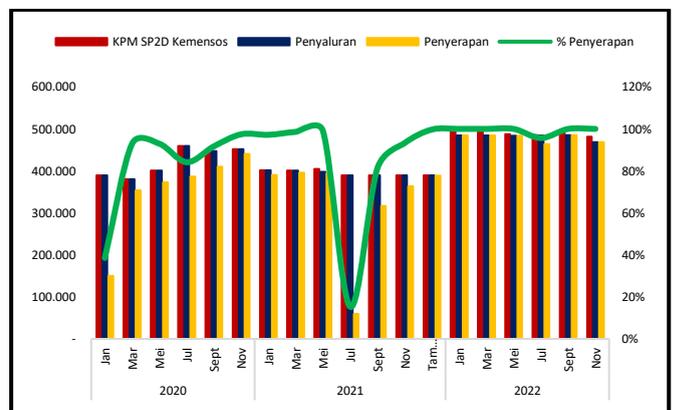


Sumber: Himbara, diolah

Sesuai hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) 17 Februari 2022 sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) 15 Februari 2022, seluruh penyaluran Program Sembako disalurkan melalui PT Pos secara tunai/cash khususnya untuk penyaluran Januari hingga Maret 2022 yang dimulai dari Februari 2022 dan disalurkan 3 (tiga) bulan sekaligus per KPM. Untuk penyaluran bulan berikutnya, pihak penyalur akan dievaluasi dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kemenko PMK dan Kemensos. Jumlah Penyaluran untuk per bulannya pada periode dimaksud sebesar Rp40,89 miliar.

Sementara itu, jumlah KPM program sembako mengalami penurunan menjadi 481 ribu KPM dari jumlah KPM posisi September sebanyak 489 ribu KPM (Grafik 5.20).

**Grafik 5.20.** Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

## Elektronifikasi Sistem Pembayaran

Elektronifikasi sistem pembayaran merupakan serangkaian upaya untuk mengubah pembayaran yang dilakukan secara tunai menjadi non tunai. Elektronifikasi menjadi bagian program strategis Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik agar mampu meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis sekaligus mendukung percepatan ekonomi digital di Indonesia.

Sasaran utama program elektronifikasi adalah

penciptaan ekosistem non tunai yang terintegrasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah, transaksi pembayaran ritel dan nilai besar, transaksi fasilitas dan transportasi umum, serta elektronifikasi di destinasi pariwisata. Instrumen yang dapat digunakan meliputi Uang Elektronik (*server* dan *chip based*), kartu kredit, dan kartu ATM/debit.

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat dan *stakeholders* terhadap berbagai fitur pembayaran non tunai, khususnya melalui kanal QRIS. Pekan QRIS Nasional merupakan salah satu kegiatan *flagship* yang dilakukan serentak di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk Aceh. Pada kegiatan tersebut Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Komunitas UMKM menyelenggarakan kampanye penggunaan QRIS yang dikemas dengan kegiatan *showcase* UMKM QRIS, sosialisasi dan edukasi, *user experience*, dan hiburan.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan *launching* 3 Pasar SIAP QRIS yang terdapat di Kota Banda Aceh, yaitu Pasar Seutui, Peuniti, dan Gampong Baru. Program ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Perbankan, dan Diskopukmdag melalui UPTD Pasar dalam melaksanakan elektronifikasi pada sendi sendi ekonomi masyarakat. Dengan adanya pasar SIAP QRIS kini seluruh pengunjung pasar memiliki alternatif metode pembayaran non tunai.

Dari sektor transportasi, perluasan penggunaan QRIS juga menyasar lingkungan bandara yang merupakan gerbang utama keluar masuknya masyarakat ke provinsi Aceh. Bank Indonesia bekerja sama dengan pengelola Bandara telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh mitra bandara. Dampaknya kini pengunjung bandara telah dapat melakukan pembayaran non tunai pada *merchant* yang terdapat di bandara, seperti kafe dan taksi bandara.

Elektronifikasi di lingkungan bandara tidak terbatas pada penggunaan QRIS saja, Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara juga mendorong penggunaan uang elektronik di lingkungan bandara. Saat ini pembayaran parkir di lingkungan bandara sudah tidak menerima uang tunai, dan hanya menerima Uang Elektronik sebagai penggantinya. Metode pembayaran ini selain mendukung program pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai juga dapat mempercepat proses transaksi pembayaran. Semakin berkembangnya produk dan layanan dari perbankan syariah di Provinsi Aceh, termasuk ketersediaan uang elektronik dan infrastruktur

pendukungnya, turut mendorong pertumbuhan ekosistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh.

Seluruh kegiatan di atas merupakan langkah proaktif Bank Indonesia bersinergi dengan PJP dalam memfasilitasi pelaku UMKM ataupun *stakeholders* lainnya dalam rangka meningkatkan *supply side* QRIS melalui akuisisi *merchant* QRIS. Di samping itu, Bank Indonesia bersama Perbankan dan Pemda juga terus melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan *user experience* masyarakat dalam menggunakan QRIS sehingga *demand side* masyarakat untuk menggunakan QRIS juga terus bertumbuh.

Bank Indonesia juga secara proaktif melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten terkait dengan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Harapannya pembentukan TP2DD akan menjadi katalis di daerah untuk mendorong perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum, termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.

Terkait infrastruktur jaringan telekomunikasi yang menjadi faktor penting dalam program elektronifikasi, masih terdapat beberapa daerah yang masuk dalam area titik buta (*blankspot area*) yang belum terjangkau teknologi informasi, sehingga pemanfaatan kanal pembayaran masih sangat terbatas. Ke depan, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah serta PJP akan terus melakukan upaya konkrit dan terkoordinasi untuk mewujudkan elektronifikasi sistem pembayaran yang terintegrasi sesuai dengan wewenang masing-masing instansi. Di sisi elektronifikasi sistem pembayaran ritel masyarakat umum, Bank Indonesia akan terus mendorong digitalisasi transaksi melalui penggunaan instrumen UE dan APMK serta kanal pembayaran QRIS melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan program *on-boarding*.





## BAB VI

# KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun berbanding terbalik pada aspek kemiskinan yang menunjukkan peningkatan persentase. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada pada urutan keempat, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

## 6.1. Ketenagakerjaan

**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menurun.** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2022 tercatat 6,17%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,30%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 63,50%, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 63,78%. Hal ini menunjukkan semakin rendah pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu perekonomian.

**Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

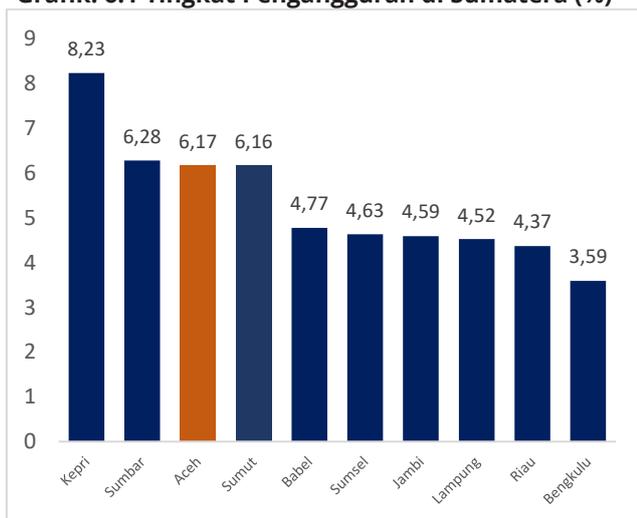


TINGKAT PENGANGGURAN %	
Agustus 2021	6,30
Agustus 2022	6,17

Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang disertai dengan peningkatan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja yaitu 2.5 juta orang (64,15%).

**Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)**



Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan ketenagakerjaan yang tercermin dari ketersediaan lapangan kerja cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut tercermin dari hasil *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 yang menunjukkan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja secara agregat. Hal tersebut sejalan dengan survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen terhadap tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan dibandingkan periode sebelumnya.

Ke depannya, diperkirakan indeks keyakinan konsumen akan Ketersediaan Lapangan Kerja terus membaik dikarenakan perbaikan ekonomi dan mobilisasi pasca Pandemi Covid-19.

**Tabel 6. 2. Perkembangan TPT**

PENGANGGURAN	2021	2022
	Agustus	Agustus
<b>Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)</b>		
Bekerja	2.361	2.395
Pengangguran	159	158
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>		
Persentase TPAK (%)	67,80	68,63
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		
TPT (%)	6,30	6,17

Sumber: BPS, diolah

Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar yaitu masing-masing 28,61% dan 19,36%. Selanjutnya sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 14,17% yang diikuti oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,10%. Penyerapan tenaga kerja terbesar kelima yaitu pada sektor Konstruksi (6,27%).

**Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor**

SEKTOR	Agustus 2022 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	28,61
Perdagangan Besar & Eceran	19,36
Industri Pengolahan	14,17
Akomodasi dan Makan Minum	7,10
Konstruksi	6,27
Jasa Pendidikan	4,81
Jasa Lainnya	4,46
Transportasi	4,29

Sumber: BPS, diolah

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yaitu sebesar 38,80 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 12,32 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021.

**Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)**

Pendidikan Tertinggi	Agustus 2021	Agustus 2022
Sekolah Dasar ke Bawah	37,69	38,80
Sekolah Menengah Atas	18,87	19,53
Sekolah Menengah Pertama	17,76	17,54
Sekolah Menengah Kejuruan	12,86	11,81
Diploma IV, S1, S2, S3	10,18	9,87
Diploma I/II/III	2,64	2,45

Sumber: BPS, diolah

Bila dilihat berdasarkan penduduk bekerja paling banyak yaitu Buruh/Karyawan/Pegawai menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar sekitar 37,66%. Sementara itu, yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 3,04%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan

buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 59,31%, sedangkan kegiatan formal sebanyak 40,69%, di mana keduanya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

**Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan**

Status Pekerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	37,46	37,66
Berusaha Sendiri	20,78	22,04
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	14,70	14,62
Pekerja Keluarga	13,68	13,08
Pekerja bebas di nonpertanian	5,86	5,43
Pekerja bebas di pertanian	4,43	4,13
Berusaha dibantu buruh tetap	3,09	3,04

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani<sup>4</sup> (NTP) pada akhir triwulan IV 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, NTP tercatat sebesar 110,18 atau mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 109,04. Kenaikan nilai NTP dibanding triwulan sebelumnya menunjukkan adanya penguatan tingkat daya beli petani. Namun, nilai yang melampaui 100 pada periode laporan menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor gabungan Pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 109,04 atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 105,16. NTUP menggambarkan kerugian yang diperoleh Petani dari selisih antara indeks harga pengeluaran yang terkait dengan keperluan produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) dengan indeks harga yang diterimanya. NTUP di atas 100

<sup>4</sup> Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

menunjukkan bahwa petani berada dalam posisi surplus.

**Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani**



**NILAI TUKAR PETANI (NTP)**

Triwulan III 2022	<b>106,65</b>
Triwulan IV 2022	<b>110,18</b> ▲

Sumber: BPS, diolah

## 6.2. Kemiskinan

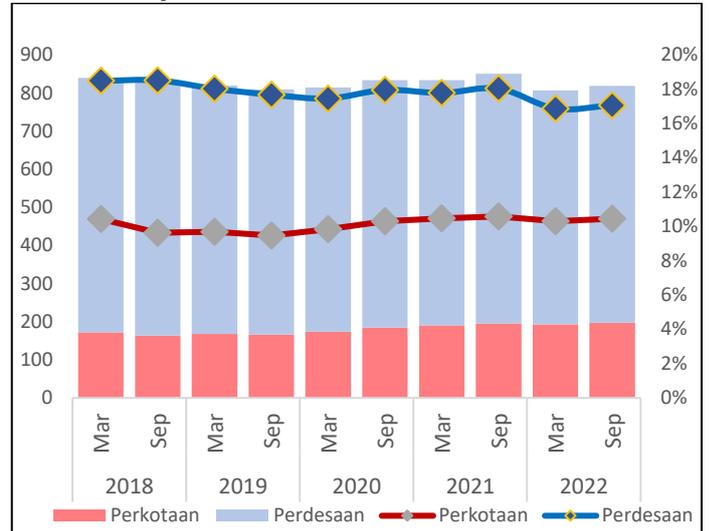
Berdasarkan data terakhir, persentase kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 14,75%, mengalami peningkatan dibandingkan semester sebelumnya yakni Maret 2022 sebesar 14,64%. Peningkatan persentase penduduk miskin didorong oleh peningkatan baik di pedesaan maupun perkotaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan meningkat masing-masing dari 16,87% dan 10,31% pada periode sebelumnya, menjadi 17,06% dan 10,35% pada periode laporan.

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada posisi September 2022 sebanyak 818,57 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 833,91 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun sebesar 0,98% (yoy) dari sebelumnya 654,79 ribu jiwa pada september 2021 menjadi 621,52 ribu jiwa pada September 2022. Sementara itu, kuantitas penduduk miskin di perkotaan tercatat sedikit meningkat dari sebelumnya 195,47 ribu jiwa pada September 2021 menjadi 196,95 ribu jiwa pada September 2022.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh semakin membaik, perlahan meningkatkan optimisme pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil survei konsumen Bank Indonesia per Januari 2023, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih berada di atas 100, yang mengindikasikan masyarakat optimis akan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di saat ini.

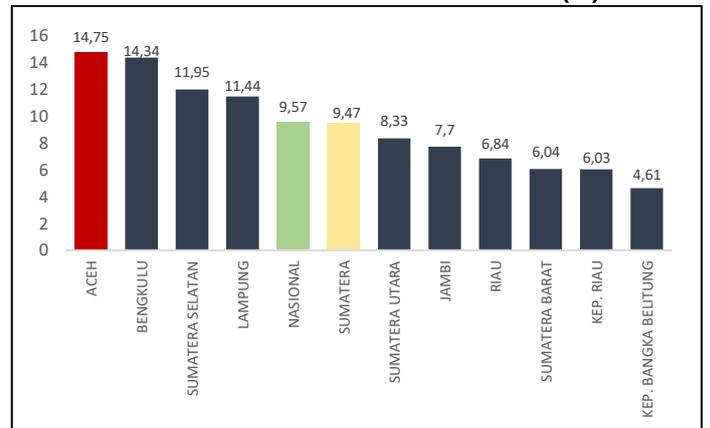
Data tingkat kemiskinan pada September 2022 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dengan porsi sebesar 14,75%. Persentase ini bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera (9,47%) dan Nasional (9,57%).

**Grafik 6. 1. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.2. Penduduk Miskin di Sumatera (%)**



Sumber: BPS, diolah

Peningkatan persentase kemiskinan juga turut mempengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil survei di Provinsi Aceh, pada periode Maret 2022 – September 2022, garis kemiskinan mengalami perubahan sebesar 6,57% sehingga pendapatan per kapita perbulan menjadi Rp.617.293,- dari sebelumnya sebesar Rp579.227,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap Nilai Garis Kemiskinan baik di Perkotaan maupun Pedesaan yakni sebesar Rp468.255,- per

kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp149.038,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan sebesar 74,47% di perkotaan dan 76,65% di pedesaan yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna, telur ayam ras, dan kue basah. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 25,53% di perkotaan dan 23,35% di pedesaan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi yang juga perlu diperhatikan yaitu seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan (P2).

**Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya (P2) Kemiskinan**

KEMISKINAN (%)		
SEPTEMBER 2021	15,53	▼
SEPTEMBER 2022	14,75	
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)		
SEPTEMBER 2021	2,95	▼
SEPTEMBER 2022	2,89	
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)		
SEPTEMBER 2021	0,81	▼
SEPTEMBER 2022	0,78	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode September 2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). P1 mengalami penurunan dari 2,95% pada September 2021 menjadi 2,89% pada September 2022. Begitupula dengan P2 yang

mengalami penurunan setelah sebelumnya 0,81% pada September 2021 menjadi 0,78% pada September 2022. Turunnya nilai Indeks Kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

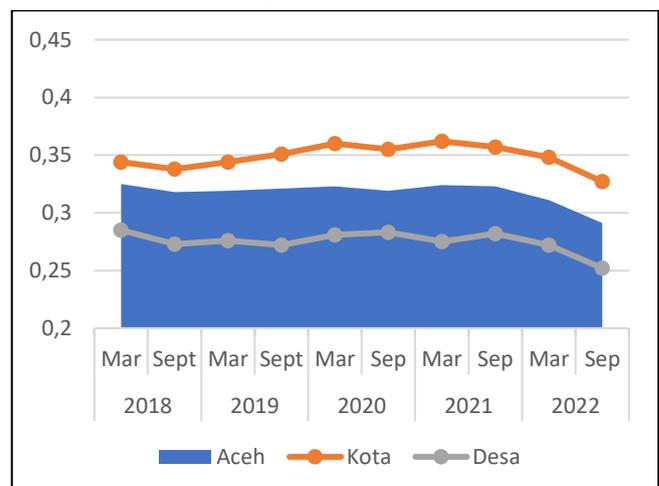
**Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)**

Daerah	2021		2022	
	SEPTEMBER		SEPTEMBER	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,70	0,44	2,13	0,56
Pedesaan	3,59	0,99	3,29	0,89
Gabungan	2,95	0,81	2,89	0,78

Sumber: Data BPS, diolah

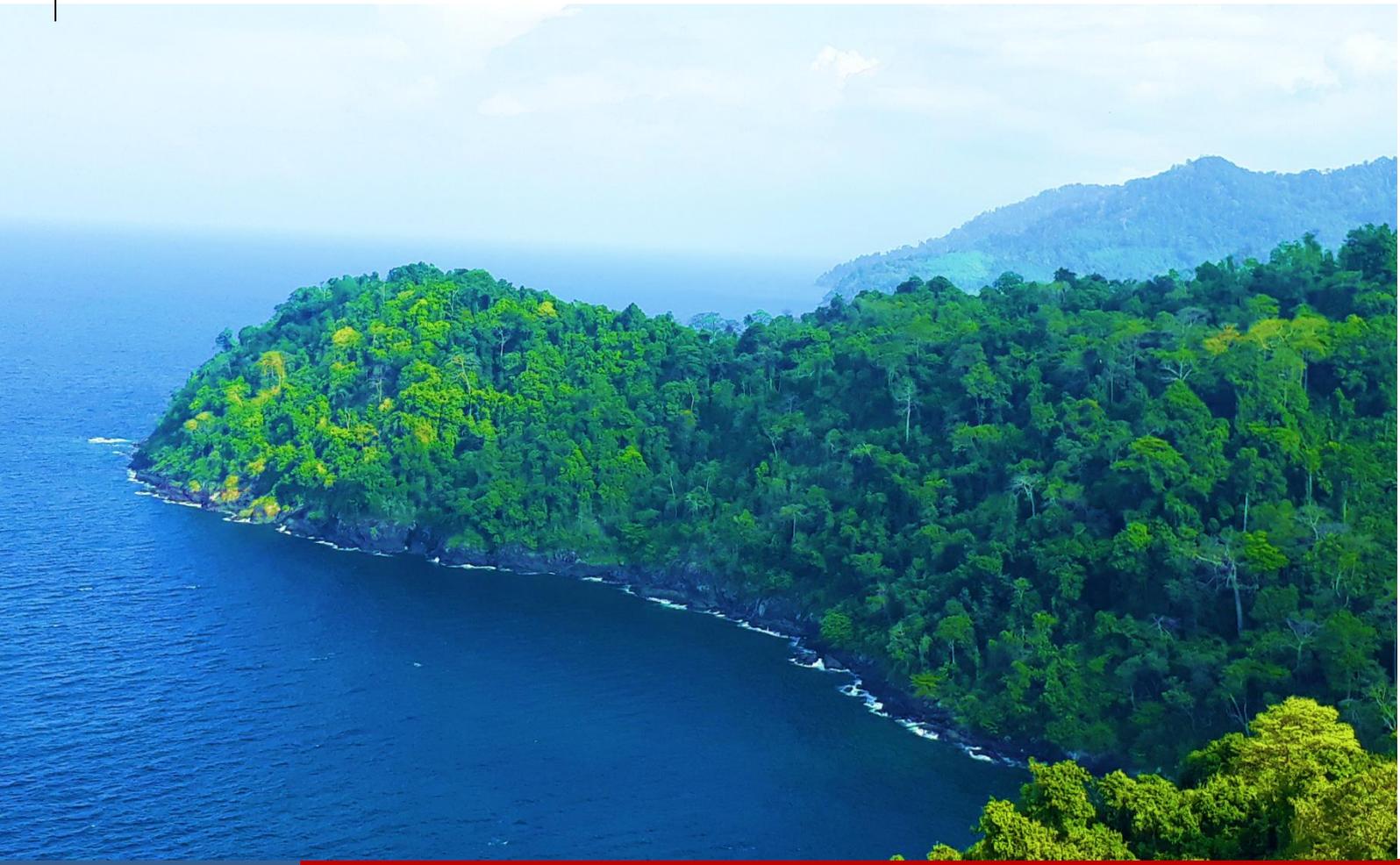
Dalam pengukuran ketimpangan kemiskinan, digunakan indikator Rasio Gini<sup>5</sup>. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada September 2022 berada pada 0,327, sedangkan pada pedesaan berada pada 0,252. Terjadi penurunan rasio di perkotaan dan pedesaan pada periode September 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut mendorong secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi 0,291 pada September 2022 setelah berada pada 0,323 pada tahun sebelumnya.

**Grafik 6. 3. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah**



Sumber: BPS, diolah

<sup>5</sup>Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



## BAB VII

# PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

---

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 3,20%-3,70%(yoy) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (4,21%, yoy). Kondisi tersebut diperkirakan oleh normalisasi ekspor luar negeri yang sudah tumbuh tinggi pada periode-periode sebelumnya. Laju inflasi tahun 2022 diperkirakan berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar  $3\pm 1\%$ , dengan perkiraan peningkatan inflasi didorong oleh bahan-bahan makanan.

## 7.1. Prospek Makroekonomi

Kinerja pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh positif meskipun dengan kecenderungan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan *World Economic Outlook "Inflation Peaking Amid Low Growth"* oleh International Monetary Fund (IMF) pada bulan Januari 2023, perekonomian global tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,9% (yoy) (Tabel 7.1). Pertumbuhan ekonomi untuk negara maju dan berkembang diperkirakan mengalami perlambatan, terutama untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Inggris.

Tabel 7.1 *Global Economic Growth Outlook (%yoy)*

Wilayah	2022	2023*
World Output	3,4	2,9
Advance Economies	2,7	1,2
United States	2,0	1,4
Euro Area	3,5	0,7
Japan	1,4	1,8
United Kingdom	4,1	-0,6
Emerging Market	3,9	4,0
China	3,0	5,2
India	6,8	6,1
ASEAN-5	5,2	4,3

Sumber: *International Monetary Fund (IMF)*

Keseimbangan risiko tetap lebih condong ke bawah, tetapi risiko turun telah termoderasi sejak rilis WEO sebelumnya pada Oktober 2022. Pada sisi *upside*, dorongan yang lebih kuat dari permintaan yang terpendam (*pent-up demand*) di banyak negara atau penurunan inflasi yang lebih cepat dapat terjadi. Pada sisi *downside*, kondisi kesehatan yang lebih parah di China serta perang Rusia Ukraina yang berpotensi kembali meningkat dapat menghambat pemulihan, sementara kondisi pembiayaan global yang lebih ketat dapat memperburuk perihal hutang. Pasar keuangan juga dapat tiba-tiba berubah harga sebagai tanggapan atas berita inflasi yang merugikan, sementara fragmentasi geopolitik lebih lanjut bisa

terjadi menghambat pemulihan ekonomi.

Momentum perbaikan ekonomi nasional diperkirakan berlanjut pada tahun 2023, meskipun dampak perlambatan ekonomi global perlu diwaspadai. Perkembangan perekonomian domestik terakselerasi oleh kinerja ekspor luar negeri yang meningkat, perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berlanjut. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi domestik ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian. Sejumlah indikator terkini di tahun 2023 tercatat baik seperti indeks keyakinan konsumen, ekspor non migas, aliran modal asing, serta *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur yang mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Perekonomian domestik diperkirakan akan tetap tumbuh dengan kecenderungan yang lebih rendah dalam rentang 4,50-5,30% (yoy) pada tahun 2023. Ke depan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas dunia usaha. Meskipun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor luar negeri dan kenaikan inflasi.

**Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 3,20%-3,70% (yoy), lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh 4,21% (yoy).** Hal ini didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan mobilitas seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 di Aceh. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Aceh diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), dan total net ekspor. Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU), laju pertumbuhan ekonomi diyakini akan ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian.

Meningkatnya pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh meningkatnya

pendapatan dan daya beli masyarakat. Langkah pemerintah yang telah mencabut peraturan pembatasan sosial (PPKM) semakin mendorong aktivitas dan mobilitas masyarakat yang akan diikuti oleh tingkat belanja yang lebih tinggi. Selain itu, berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Februari 2023 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Provinsi Aceh pada beberapa bulan terakhir dan didukung oleh optimisme perekonomian secara nasional. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 113,8 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 112,86. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari 2023 tercatat sebesar 111,27 atau masih melanjutkan tren perbaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 110,18.

Di sisi lain, kinerja komponen konsumsi pemerintah pada 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, terdapat penurunan pagu anggaran baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Berdasarkan Qanun No.6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, rencana anggaran belanja Aceh 2023 sebesar Rp11,09 triliun, lebih rendah jika dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2022 yang sebesar Rp16,17 triliun. Defisit anggaran diperkirakan menurun menjadi Rp0,91 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,82 triliun pada tahun 2021. Penurunan anggaran APBD 2023 tersebut disebabkan oleh menurunnya penerimaan besaran dana otonomi khusus (Otsus) dari Rp7,5T pada tahun 2022 menjadi Rp3,9T atau setara dengan 1% plafon DAU Nasional. Penurunan Otsus tersebut juga sesuai dengan MoU Helsinki di mana mulai tahun 2023 hingga tahun 2027, besaran dana otonomi khusus berkurang menjadi 1% plafon DAU Nasional.

Di sisi lain, pada tahun 2023 diperkirakan

intensitas serta nominal *refocusing* tidak setinggi pada tahun 2022 sehingga diperkirakan mendorong kinerja pada 2023. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), realisasi belanja negara pada Triwulan IV 2022 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terdapat deviasi sebesar minus Rp370,33 miliar atau -0,77 persen. Secara persentase, pendapatan negara terealisasi sebesar 125,25 persen sementara belanja negara terealisasi sebesar 99,17 persen.

Kinerja PMTB/investasi pada 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh, target realisasi investasi mengalami kenaikan sebesar 47,05% menjadi 10,0 triliun rupiah dari sebelumnya 6,8 triliun rupiah di tahun 2022. Realisasi investasi PMA dan PMDN pada triwulan IV 2022 mencapai Rp1,05 triliun, turun sebesar 56,76% (yoy). Dengan realisasi tersebut, keseluruhan tahun 2022 menjadi lebih rendah dari perkiraan awal dan masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kendala yang menghambat realisasi investasi pada 2022, antara lain; 1. Penguasaan lahan dalam bentuk HGB terlalu singkat (1 atau 3 tahun) sehingga menghambat perusahaan untuk mendapatkan pinjaman modal/kredit dari Perbankan (*unbankable*), 2. Munculnya varian baru COVID-19 berpotensi mempersulit kedatangan kontraktor dari luar negeri (India), 3. Terlambatnya penandatanganan *power purchase agreement* (PPA) menahan investor PLTA memulai konstruksinya. Meskipun demikian, realisasi investasi pada 2022 masih didorong oleh proyek PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, pabrik pupuk NPK oleh PT Pupuk Iskandar Muda, PLTA 1 dan 2 di Peusangan, Jalan tol trans sumatera (JTTS) ruas Banda Aceh - Sigli, Pabrik CPO di Aceh Barat Daya (baru diresmikan PT Mon Jembe) serta Kawasan Industri/Berikat di Krueng Raya yang sedang dalam tahap konstruksi.

Sementara itu, ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 32,17% (yoy).

Hal ini diperkirakan didorong oleh normalisasi harga komoditas ekspor utama Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia, harga batu bara pada 2023 berpotensi mengalami penurunan menjadi USD 240/ton dari USD 320/ton pada tahun 2022. Harga kopi arabika juga diprediksi mengalami penurunan menjadi USD 5,50/kg dari USD 5,90/kg pada tahun 2022. Lebih lanjut, harga CPO diproyeksi mengalami kenaikan menjadi USD 1.670/ton dari USD 1.660/ton pada tahun 2022.

Dari sisi LU, perkiraan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 utamanya didorong oleh positifnya kinerja LU Industri Pengolahan, serta Pertambangan dan Penggalian. Secara umum proyeksi kinerja positif pada LU Industri Pengolahan didukung oleh sudah selesainya Pabrik Pupuk NPK milik PT. Pupuk Iskandar Muda yang diperkirakan dapat menyumbang akselerasi. Lebih lanjut, potensi migas yang tersedia cukup banyak di Aceh juga dapat mendukung LU Pertambangan dan Penggalian seiring dengan terus dilakukannya eksplorasi untuk mencari sumber sumber baru. Selain hal tersebut, pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh membaiknya perekonomian dunia serta normalisasi aktivitas masyarakat sejalan dengan langkah pemerintah melakukan vaksinasi masal COVID-19 dan booster yang berlanjut di tahun 2023. Hal ini juga didukung oleh telah dicabutnya peraturan pembatasan sosial (PPKM) pada tahun 2023. Faktor penahan pertumbuhan berasal dari lapangan usaha pertanian dan transportasi. Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan melambat akibat perkiraan produksi TBS yang lebih rendah pada tahun 2023. Hal ini diakibatkan oleh proses pemupukan yang kurang optimal pada tahun 2022 sebagai akibat tingginya biaya pemupukan. Lapangan Usaha Transportasi diperkirakan melambat secara tahunan yang disebabkan oleh sudah tingginya pertumbuhan LU Transportasi pada 2 tahun terakhir mengingat semakin dibukanya keran pembatasan sosial paska puncak COVID-19 pada tahun 2020.

Dari sisi kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang telah tumbuh sebesar 4,30% (yoy). Prospek sektor pertambangan dan penggalian yang lebih baik ditopang oleh cuaca yang kondusif dan larangan ekspor yang sudah dicabut mendukung pertumbuhan produksi batu bara. Dari sisi migas, produksi diperkirakan kembali meningkat setelah beroperasi kembalinya salah satu perusahaan energi yang beroperasi di Aceh. Lebih lanjut, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyampaikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) di laut Andaman atau 40 mil dari garis pantai Pidie Jaya (Pijay), Pidie, dan Bireuen. Di mana kegiatan pengeboran migas telah dimulai sejak Mei 2022 pada sumur Timphan-1 pada Wilayah Kerja (WK) Andaman II oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil sebagai operator di bawah pengawasan SKK Migas.

Selanjutnya, Lapangan Usaha Perdagangan diperkirakan akan melambat dengan tahun lalu yang tumbuh sebesar 6,36% (yoy). Perkiraan pertumbuhan yang masih positif didukung oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan mobilitas akibat pelonggaran pembatasan sosial dan dicabutnya peraturan PPKM. Meskipun demikian, terdapat faktor penahan pertumbuhan yang berasal dari *second round effect* kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga yang berturut-turut yang menahan konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, penghapusan insentif PPnBM pada akhir tahun 2022 juga diperkirakan menghambat LU Perdagangan pada tahun 2023.

Sementara itu dari sisi Transportasi dan Pergudangan, diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya meskipun tidak sebesar realisasi pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 7,24% (yoy). Kinerja yang diperkirakan positif pada 2023 tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat paska dilepasnya peraturan PPKM dan tren infeksi COVID-19 yang terus melandai di Aceh.

Dari sisi angkutan udara, tren peningkatan penerbangan domestik diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2023, didukung juga dengan pelonggaran syarat penerbangan udara. Lebih lanjut, adanya pembukaan penerbangan Citilink, Airasia, dan Medan pada rute Banda Aceh – Medan juga mendukung kinerja lapangan usaha. Tersedia juga penerbangan internasional dari Banda Aceh yang mendukung kinerja LU. Dari sisi pergudangan, dengan meningkatnya *trend* belanja *online* dan pengiriman kargo diperkirakan dapat mendongkrak industri kargo dan pergudangan. Hal ini juga terkonfirmasi dari laporan salah satu pelaku bisnis pengiriman kargo dan pergudangan yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023.

Prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam rentang 3,20-3,70% (yoy). Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan sedikit tertahan yang bersumber dari kenaikan suku bunga acuan dan risiko inflasi meskipun kinerjanya diperkirakan akan tetap tinggi. Dari sisi Konsumsi Pemerintah, terdapat risiko penurunan akibat turunnya alokasi dana otonomi khusus (Otsus) menjadi 1% di tahun 2023. Selanjutnya dari komponen Investasi/PMTB diperkirakan akan lebih tinggi, disebabkan oleh proyek pemerintah melalui PSN yang memiliki timeline diselesaikan pada tahun 2023 sehingga akan cepat diselesaikan. Meskipun, menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), direncanakan tidak ada Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di 2023 dan berfokus pada penyelesaian proyek *existing*.

## 7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan perkiraan dari The International Monetary Fund (IMF), Inflasi global diperkirakan menurun dari 8,8% (yoy) pada 2022 menjadi 6,6% (yoy) pada 2023, meskipun demikian inflasi

diperkirakan akan kembali menurun menjadi 4,3% (yoy) pada 2024. Angka tersebut masih berada diatas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Inflasi masih didorong oleh kenaikan harga pada komoditas pangan dan energi akibat dampak konflik global. Sejalan dengan kenaikan inflasi global, inflasi domestik diperkirakan akan kembali kedalam target inflasi dalam rentang 3±1% (yoy).

**Secara keseluruhan tahun 2023, laju inflasi gabungan kota di Aceh diperkirakan akan berada di batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3±1% (yoy).** Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode Januari 2023 masih tercatat sebesar 5,52% (yoy). Meskipun demikian, diperkirakan akan semakin menurun sepanjang tahun 2023. Secara umum, kenaikan inflasi didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan lancarnya mobilitas masyarakat yang sempat tertahan akibat pandemi COVID-19 sebelumnya serta kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dari sisi komoditas bahan makanan, pembatasan sosial yang telah ditiadakan diperkirakan akan meningkatkan mobilitas dan permintaan masyarakat akan komoditas pangan. Selain itu, risiko cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi akan berdampak pada tangkapan yang komoditas perikanan. Lebih lanjut, penerapan HPP yang berimbang pada naiknya PPN serta risiko *spillover* konflik eropa diperkirakan akan semakin memperkuat peningkatan inflasi sisi tersebut.

Dari sisi barang yang harganya diatur oleh Pemerintah, kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2023 sebesar 10% turut mendukung kenaikan inflasi. Meskipun demikian, diperkirakan tidak terjadi kenaikan harga BBM seperti tahun 2022.

Meskipun demikian, kenaikan yang lebih tinggi diperkirakan dapat semakin terkendali seiring respon kebijakan Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan BI *7 days reverse repo rate* (BI7DRR) 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Januari 2023.

Inflasi gabungan kota Aceh pada 2023 diperkirakan mereda jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini didorong oleh beragam macam kegiatan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) yang dilakukan oleh TPPI, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh. Pemerintah Aceh, BI, bersama-sama dalam TPID, Satgas Pangan, serta pihak-pihak terkait terus berkoordinasi dan bersinergi untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Strategi dan antisipasi manajemen pasokan untuk komoditas perikanan (salah satu inflator terbesar) juga terus digalakkan. Diantaranya melalui *pemanfaatan cold storage* eksisting, pembangunan *cold storage* baru, kerja sama antar daerah, dan operasi pasar. Hal ini diperkirakan mampu meredam gejala kenaikan harga sehingga secara keseluruhan tahun 2023, inflasi gabungan kota Aceh diperkirakan berada di bawah batas atas sasaran inflasi Nasional.

### 7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

#### Pertumbuhan Ekonomi

1. **Mengurangi tingginya angka kemiskinan Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja** melalui langkah taktis replikasi *piloting* pengembangan kelompok subsisten melalui sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam usulan *piloting* tersebut, i. *initial assessment*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan *initial assessment* terkait kelompok potensial yang akan dilakukan *piloting* pengembangan kelompok subsisten. ii. *implementing partner*, Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), DPMG bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) *screening potential implementing*

*partner* di Aceh (industri yang mampu menjadi offtaker) termasuk potensi pemanfaatan BUMG di gampong-gampong. iii. Pendampingan, BI, OJK, Kemenkeu dan OPD teknis melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha kepada kelompok subsisten terpilih terkait dengan: Pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan. iv. pendampingan (lanjutan), fasilitasi promosi produk dari *implementing partner* daerah. v. *monev*, monitoring dan evaluasi pelaksanaan oleh seluruh pihak terkait. Terakhir, vi. replikasi, replikasi *success story* yang telah dilaksanakan secara *rapid* di berbagai kabupaten.

2. **Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.** *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan pemodal, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.
3. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut belum teroptimalkan dengan baik. Diperlukan

perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.

4. **Dualisme sertifikasi produk halal di Aceh.** Berdasarkan Undang-Undang no 33 Tahun 2014 tentang produk Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas untuk menerbitkan sertifikasi halal produk. Sementara Qanun Aceh no 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Menyatakan sertifikasi produk halal di Aceh diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh. Hingga saat ini proses sertifikasi halal di Aceh masih melalui LPPOM MPU, namun masyarakat yang memerlukan sertifikasi halal nasional masih belum dapat memilikinya. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian terhadap tumpang tindih regulasi sertifikasi halal yang ada di Aceh. Sebab kedua dasar hukum yang digunakan merupakan peraturan yang sah.
5. **Percepatan realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.** Belanja modal diperkirakan memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian sehingga percepatan realisasi belanja modal menjadi hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Diperlukan langkah kebijakan yang ketat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat pelaksanaan belanja di daerah, antara lain melalui: penerapan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di daerah, melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan, dan memberlakukan sistem *reward/punishment*. *Reward* dilakukan melalui Dana Insentif Daerah yang diberikan ke daerah berprestasi berdasarkan kinerja keuangan termasuk total penyerapan belanja daerah. *Punishment* diberlakukan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum terhadap daerah dengan jumlah simpanan tidak wajar.
6. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMi yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID-19 dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2022.
7. **Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan.** Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi *jumping* lapangan usaha dari LU pertanian, perikanan dan kehutanan ke LU perdagangan besar dan eceran, tanpa melalui penambahan nilai yang dapat diberikan oleh LU industri pengolahan. Hal ini penting agar provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan oleh industri pengolahan.
8. **Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri.** Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladang berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang mana bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan

mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM.

9. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Di tengah pandemi COVID-19, transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak. Melalui transaksi non tunai/digital, diharapkan risiko penularan COVID-19 melalui uang kartal dapat dicegah. Ekosistem non tunai/digital di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan penerapannya melalui Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dengan sinergi pemda, BI, perbankan, serta pihak terkait lainnya.
10. **Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh***. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor.
11. ***Debottlenecking* kendala atau hambatan investasi di Aceh**. Dalam forum *focus group discussion* (FGD) *Aceh Gayo Investment Dialog* (AGASID) 2022, diketahui beberapa kendala/hambatan investasi antara lain; Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di pihak Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di Aceh dalam menyiapkan proposal proyek yang layak dan komprehensif dan juga materi promosi krusial lainnya. Sebagai solusi dari kendala ini, RIRU Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* penyusunan proposal investasi yang

didalam terdapat 7 aspek penting dalam penyusunan proposal investasi. Termasuk juga di dalamnya simulasi perhitungan kelayakan proyek investasi. Status *clean and clear* untuk beberapa proyek investasi di Aceh masih belum jelas, selain itu banyak proyek investasi masih membutuhkan kelengkapan data untuk dapat dikatakan proyek investasi yang dapat memikat investor. Selanjutnya, terdapat kendala sewa lahan maksimal 5 (lima) tahun yang dikeluhkan oleh para investor, sehingga diperlukan percepatan perumusan dan pengesahan aturan perubahan untuk perpanjangan sewa lahan tersebut.

## Inflasi

Pada tahun 2023, tekanan inflasi diperkirakan akan menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tetap diperlukan kerjasama dengan TPID Aceh untuk dapat menahan laju inflasi pada 2023. Pada awal tahun 2023, TPID Provinsi Aceh dan 23 Kabupaten/Kota berencana untuk melakukan Rapat Koordinasi Wilayah untuk mengeratkan proses pengendalian inflasi sepanjang tahun. Lebih lanjut, pengendalian inflasi juga akan mengikuti peta jalan atau *roadmap* jangka pendek (2022-2024) yang telah disusun sebelumnya. Sebagai respon lanjutan terkait lonjakan inflasi, Bank Indonesia telah dilakukan kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Aceh pada 18 Agustus 2022 oleh Gubernur Aceh dan kegiatan akan berlanjut pada tahun 2023. Perlu komitmen dari seluruh pihak untuk dapat mengimplementasikan peta jalan dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tersebut. Adapun program pengendalian inflasi Aceh masih mengacu pada *framework* 4K, antara lain:

1. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis didukung oleh program-program**, pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan), optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas beras,

pelaksanaan pasar murah (terutama menjelang HBKN), pelaksanaan sidak pasar, dan menetapkan harga eceran tertinggi (komoditas bahan pangan) melalui penyusunan Qanun (Perda).

2. **Ketersediaan Pasokan melalui dua program strategis yaitu peningkatan produksi pangan lokal dan importasi produk pangan.**

Peningkatan produksi pangan lokal terutama produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit, produksi komoditas peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam), Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi. Peningkatan produksi juga didukung oleh pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian; pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir (Aceh Tamiang), korporatisasi klaster petani pangan, dan Pengaturan jadwal tanam komoditas pangan. Selanjutnya, diperlukan juga impor komoditas yang sulit diproduksi secara lokal seperti bawang putih dan gula pasir.

3. **Kelancaran Distribusi melalui dua program strategis yaitu, penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD), serta meningkatkan infrastruktur perdagangan.**

Program strategis pertama, dijabarkan menjadi inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi, Peningkatan transaksi KAD, Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI), pelaksanaan Pasar Lelang (Komoditas lokal dan Ekspor). Selanjutnya, program strategis kedua dijabarkan melalui, peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan yaitu melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi UMKM pangan binaan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *Cold Storage* untuk

komoditas perikanan.

4. **Komunikasi Efektif melalui tiga program strategi yaitu, memperbaiki kualitas data dan laporan, peningkatan kapasitas dan koordinasi Provinsi dan Kab/Kota, dan mengendalikan ekspektasi inflasi.**

Perbaikan kualitas dan laporan dicapai melalui penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kab/kota, serta peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan melalui program rilis pers/media terkait perkembangan.

5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh**

secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bijak berkonsumsi dan himbauan penggunaan cabai kering.

6. **Mewujudkan ketahanan pangan di Aceh**

untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian modern dan perekonomian sirkular. Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi scheduling tanam, dan penyimpanan. i) Kemandirian Pupuk (Petani) dilakukan melalui pengembangan pupuk

organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*) proses produksi perlu dilakukan. Dibutuhkan kapasitas, standarisasi dan legalitas yang cukup serta mumpuni untuk pengembangannya. Salah satu contohnya dengan pengembangan pupuk dengan dekomposer. ii) Kemandirian Bibit (Produsen bibit), bibit cabai merah keriting (CMK) yang dikenal dengan udeng atau odeng dan cabai merah varietas Bemeri adalah varietas cabai lokal unggul berasal dari Kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh. Permasalahan yang muncul dalam proses pembibitan varietas lokal di atas adalah masih terbatasnya petani di Aceh yang membudidayakan varietas tersebut. Selain itu, kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik dari segi kualitasnya. Masih perlu dilakukan pemuliaan tanaman agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas. Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah. Begitu pun untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor. iii) Informasi *scheduling* tanam, dilakukan melalui menghubungkan info antara pedagang besar yg mengendalikan pasar dan pedagang pengepul di daerah pertanian yg menjadi pemasok komoditas tersebut. Selanjutnya, pedagang pengepul meneruskan info tersebut ke para petani untuk dilakukan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, iv) penyimpanan, khususnya untuk komoditas pangan dipandang perlu adanya *cold supply chain*, yang suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen dari komoditas pertanian. *Buffer stock* yang ada saat ini dapat digunakan untuk memertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar. Informasi tersebut juga dapat digunakan

untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai Kerja sama Antar Daerah (KAD).

7. **Menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 18 Agustus 2022** yang antara lain mencakup usulan, Pembentukan satu data terpadu, Pemetaan pelaku pasar dan sentra produksi di Aceh, *Timing* panen dan sistem *stock* serta koordinasi dengan bulog untuk *cold supply chain*, Anggaran tanggap darurat dapat dimanfaatkan untuk ongkos logistik bahan pangan. Dana gampong bersama-sama membangun pabrik beras premium. Kemudian akan disusun Pergub untuk ASN wajib membeli beras premium produksi Bulog Aceh/Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Anggaran / APBA pada tahun depan diarahkan untuk mendorong pengendalian inflasi.
8. **Penanganan Inflasi Komoditas Beras.** Pasokan beras kerap kali didatangkan dari luar Aceh pada periode-periode tertentu, padahal jika dihitung secara tahunan, produksi beras Aceh mengalami surplus. Gabah dari Aceh dijual ke Sumatera Utara, kemudian beras dijual kembali ke Aceh. Harga beras dapat meningkat/ lebih tinggi daripada harga lokal. Beras lokal berpotensi untuk kalah saing dengan beras luar dan berdampak pada pendapatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain: Menginisiasi optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola oleh profesional terutama untuk komoditas beras dan Meningkatkan kualitas pengolahan/penggilingan padi di Aceh untuk menjadi beras kualitas super.
9. **Mempercepat implementasi 7 (tujuh) upaya konkrit penanganan inflasi Kabupaten/Kota se-Aceh sesuai arahan Kemendagri.** Program-program tersebut antara lain; Operasi Pasar Murah, Sidak Pasar, Kerjasama Antar Daerah (KAD), Gerakan Menanam, Realisasi Bantuan Tidak Terduga (BTT), Dukungan Transportasi APBD/A, serta Rapat Koordinasi.

Sampai dengan Minggu ke-2 November, masih terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang belum melaksanakan/melaporkan program tersebut ke Kemendagri.

### Kekhususan Sertifikasi Halal Provinsi Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh menjadi tupoksi Pembagian Daerah Aceh dan Kawasan Khusus yang memberikan keistimewaan dan kewenangan bagi Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam serta penyelenggaraan kehidupan adat yang berasaskan agama Islam. Peraturan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi peraturan daerah yang disebut Qanun Aceh. Qanun mengatur hubungan sosial dan muamalah/transaksi antar masyarakat, diantaranya Qanun Jinayat yang mengatur Tindakan yang dilarang dalam syariat Islam, Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengatur industri keuangan di Aceh harus berdasarkan sistem keuangan Islam, serta Qanun Jaminan Produk Halal.

Keberadaan Qanun Aceh telah memberikan warna yang berbeda bagi kehidupan sosial dan ekonomi di Aceh, seperti halnya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Aceh. Qanun Aceh Tahun 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menegaskan penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Pemerintah Aceh bahkan mendorong penyelenggaraan dan penguatan produk halal dengan melalui subsidi biaya sertifikasi halal bagi UMKM di Aceh. Oleh sebab itu, para pelaku usaha dan UMKM di Aceh memiliki lebih banyak opsi dalam pengurusan sertifikat halal yakni; melalui LPPOM MPU Aceh, mengikuti self-declare BPJPH, maupun melalui BPJPH MUI.

Integritas LPPOM MPU Aceh dalam penyelenggaraan produk halal di Aceh telah teruji sangat baik, masyarakat Aceh sudah sangat mengenal logo halal LPPOM MPU Aceh pada setiap produk di Aceh termasuk pada makanan, obat-obatan, serta kosmetik. Logo halal bahkan menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat Aceh dalam mengambil keputusan untuk berbelanja. Hal ini merupakan salah satu keuntungan yang dapat membantu akselerasi percepatan produk halal di Aceh. Hingga saat ini, seluruh sertifikat dan logo produk halal masih diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, Namun begitu, keterbatasan SDM di LPPOM MPU Aceh menyebabkan jumlah produk yang mendapatkan sertifikat halal menjadi sangat terbatas.

Oleh sebab itu, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH Kemenag maupun LPPOM MPU harus menjadi fasilitator bagi akselerasi produk halal di Bumi Serambi Mekkah, sinergi dari kedua penerbit sertifikat halal mesti dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMKM dalam pengurusan perizinan dan sertifikat halal. Disamping itu, sinergi ini diharapkan dapat memperkuat *Halal Value Chain* (HVC) di Provinsi Aceh.

--000--

# DAFTAR ISTILAH

<b>Administered prices</b>	Salah satu disgregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
<b>Andil inflasi</b>	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
<b>APBA</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
<b>Bobot inflasi</b>	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
<b>Dana Perimbangan</b>	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
<b>Faktor Fundamental</b>	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
<b>Faktor Non Fundamental</b>	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan ( <i>volatile foods</i> ), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah ( <i>administered price</i> )
<b>Indeks Ekspektasi Konsumen</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
<b>Indeks Harga Konsumen (IHK)</b>	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
<b>Indeks Kondisi Ekonomi</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
<b>Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)</b>	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
<b>Investasi</b>	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
<b>Inflasi inti</b>	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

<b>Liaison</b>	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
<b>Migas</b>	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
<b>Mtm</b>	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
<b>Omzet</b>	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
<b>PDRB</b>	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<b>Perceived risk</b>	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
<b>Qtq</b>	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
<b>Sektor ekonomi dominan</b>	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
<b>Volatile food</b>	Salah satu disgregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<b>Yoy</b>	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

## TIM PENYUSUN

### PENANGGUNG JAWAB

**Rony Widijarto P.**

### KOORDINATOR PENYUSUN

**Yon Widiyono**

### TIM PENULIS

**Alrikko Putra**

**Garry Rahmadhian Sutiasa**

**Fina Ananda**

**Andika Indra Kusuma**

**Lintang D. Ratri**

**M. Fikrisani**

## KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

*Softcopy* dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>